



## **BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum Kesatu huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir pada Tahun 2024, Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;
- b. bahwa dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kerinci Berakhir Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perencanaan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan pertimbangan sumberdaya yang tersedia.



4. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Kerinci dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Daerah.
5. Perangkat, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sungai Penuh dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 merupakan Penjabaran dari Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026.
- (2) RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) tahun.
- (3) RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi :
  - a. penyusunan RKPD Tahun 2025-2026;
  - b. penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026;
  - c. pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dua tahun;
  - d. acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci karena memuat seluruh kebijakan publik; dan
  - e. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) sistematika dokumen RPD Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan
  - b. BAB II Gambaran Umum
  - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
  - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis
  - e. BAB V Tujuan dan Sasaran
  - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
  - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
  - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - i. BAB IX Penutup
- (2) Rincian RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- Dalam rangka penyusunan Perencanaan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 :
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menggunakan RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 sebagai acuan penyusunan RKPD serta pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran;
  - b. Perangkat daerah menggunakan RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal **21 FEBRUARI** 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal **21 FEBRUARI** 2024  
SEKRETARIS DAERAH,



ZAINAL EFENDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR **1**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TANGGAL 21 FEBRUARI 2024  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2025-2026

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci di tahun 2024. Sejalan dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka pemilu kepala daerah serentak secara nasional baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, membutuhkan dokumen rencana pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada sisi perencanaan bagi Kabupaten Kerinci yaitu tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berakhir Pada Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci harus menyusun



dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 atau RPD Tahun 2025-2026. Selain itu seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkada kemudian akan menjadi pedoman bagi Pj. Bupati Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman penyusunan RKPD periode yang sama, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Proses penyusunan RPD Tahun 2025-2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan penyusunan RPD meliputi penyusunan Rancangan Awal RPD dengan tahapan analisis data dan informasi, evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD Tahun 2019-2024 (sampai dengan tahun 2023), perumusan isu strategis, perumusan pohon kinerja dan cascading, dan penyusunan dokumen draft rancangan awal RPD; 2) Penyusunan rancangan RPD; 3) Pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik; 4) Perumusan rancangan akhir RPD; 5) Fasilitasi rancangan akhir RPD; dan 6) Penetapan Perkada RPD. Penyusunan dokumen RPD dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Renstra PD.

Secara substansi, penyusunan RPD Tahun 2025-2026 tetap memperhatikan beberapa hal antara lain: 1) penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2025; 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2019-2024; 4) isu-isu strategis yang berkembang; 5) kebijakan nasional; dan 6) regulasi yang berlaku saat ini. Selain itu, perumusan isu strategis dan

kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Tahun 2025-2026 juga memperhatikan keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang dinilai masih relevan di Kabupaten Kerinci hingga tahun 2026.

RPD Tahun 2025-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 yang memuat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RPD Tahun 2025-2026 juga menjadi pedoman penyusunan RKPD untuk periode tahun 2025-2026.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  18. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RPD tidak berbeda dengan RPJMD terkait posisinya dengan regulasi lainnya. RPD Tahun 2025-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPD/RPJMD Kabupaten lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Kerinci. RPD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra PD, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pada pemerintahan Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dijabarkan pertahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang pada akhirnya akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RPJMN juga sebagai pedoman Penyusunan Rencana strategis kementerian dan lembaga (Renstra KL) yang menjadi pedoman penyusunan Rencana kerja kementerian dan lembaga (Renja KL).

Hubungan antara RPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPD Kabupaten Kerinci dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 Merupakan Penjabaran visi, misi dan program prioritas Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMN 2019-2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci 2025-2026.

2. RPD Kabupaten Kerinci dengan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 Merupakan Penjabaran visi, misi dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci 2025-2026. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kerinci dua tahun mendatang.

3. RPD Kabupaten Kerinci dengan RPJPD Kabupaten Kerinci

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Kerinci tahun 2025-2026 merupakan Rencana Pembangunan tahap ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci tahun 2006-2025. Karena itu, dalam penyusunan RPD Kabupaten Kerinci sasaran dan arah kebijakan tahun ke empat dalam RPJPD Kabupaten Kerinci tahun 2006-2025 menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026.



4. RPD Kabupaten Kerinci dengan RTRW Kabupaten Kerinci  
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kerinci tahun 2025-2026, harus berpedoman juga pada RTRW Kabupaten Kerinci sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kerinci.
5. RPD Kabupaten Kerinci dengan RKPD Kabupaten Kerinci  
Pelaksanaan RPD Kabupaten Kerinci 2025 – 2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang memuat program prioritas, kegiatan dan subkegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/dusun/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Kerinci.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPD Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut.

##### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan RPD Tahun 2025-2026 adalah merumuskan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025-2026 yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2026.

##### **b. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan dokumen RPD Tahun 2025-2026 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Kerinci selama kurun waktu 2025- 2026;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kerinci yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2026; serta
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, dokumen RPD Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPD.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Memuat kondisi umum daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

##### **BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat kondisi realisasi APBD tahun anggaran 2019-2014 (dari tahun 2019 hingga tahun 2023) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2026.

**BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Memuat permasalahan pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta isu strategis daerah.

**BAB V : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026, serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome serta indikatornya.

**BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

Memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan *cascading* pada bab sebelumnya.

**BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat kerangka pendanaan seluruh program perangkat daerah tahun 2025-2026, dan daftar program perangkat daerah tahun 2025-2026 dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

**BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) beserta targetnya yang akan dicapai di tahun 2025-2026.

**BAB IX : PENUTUP**



Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RPD Tahun 2025- 2026, serta menggarisbawahi tentang pentingnya RPD bagi pembangunan daerah Kabupaten Kerinci selama tahun 2025-2026.

## **BAB 2**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Aspek Geografis dan Demografi**

##### **2.1.1. Aspek Geografi**

###### **a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kabupaten Kerinci berdasarkan karakteristik wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga kawasan utama, yaitu: *kawasan pertama* merupakan kawasan pegunungan disekitar Gunung Kerinci dan merupakan kawasan yang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kerinci lainnya. *Kawasan kedua* yaitu kawasan perairan darat yang terletak dibagian Timur Kabupaten Kerinci dengan orientasinya adalah Danau Kerinci, dimana kawasan ini perkembangannya masih sangat lambat. *Kawasan ketiga* yaitu kawasan dibagian tengah Kabupaten Kerinci yang mengelilingi wilayah Kota Sungai Penuh dan merupakan kawasan padat penduduk dan berkembang cukup pesat karena imbas atau pengaruh perkembangan Kota Sungai Penuh.

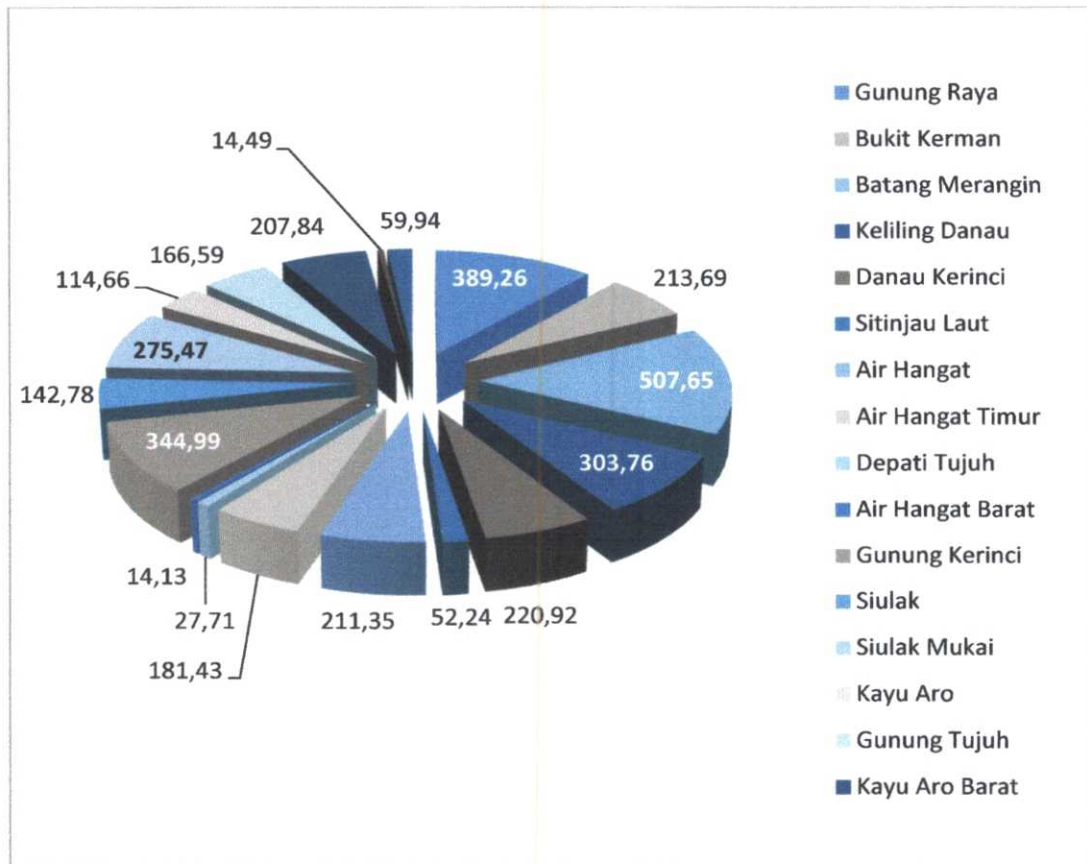
###### **b. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Kerinci memiliki luas wilayah 344.890 Ha atau 3.448,90 Km<sup>2</sup>. Dimana 59,35% luas wilayah tersebut merupakan wilayah TNKS dan sisanya 40,65% digunakan untuk kawasan budidaya dan permukiman penduduk.

Wilayah administrasi Kabupaten Kerinci, terdiri dari 18 wilayah kecamatan, dimana kecamatan-kecamatan tersebut jika diurut dari wilayah terluas adalah sebagai berikut: Batang Merangin (507,65 km<sup>2</sup>), Gunung Raya (389,26 km<sup>2</sup>), Keliling Danau (303,76 km<sup>2</sup>), Gunung Kerinci (344,99 km<sup>2</sup>), Siulak Mukai (275,47 km<sup>2</sup>), Danau Kerinci (220,92 km<sup>2</sup>), Bukit Kerman (213,69 km<sup>2</sup>), Air Hangat (211,35 km<sup>2</sup>), Kayu Aro Barat (207,84 km<sup>2</sup>), Air Hangat Timur (181,43 km<sup>2</sup>), Gunung Tujuh (166,59 km<sup>2</sup>), Siulak (142,78 km<sup>2</sup>), Kayu Aro (114,66 km<sup>2</sup>), Sitingau Laut (52,23 km<sup>2</sup>), Depati VII (27,71 km<sup>2</sup>), Danau

Kerinci Barat (59,94 km<sup>2</sup>), Tanah Cogok (14,46 km<sup>2</sup>) serta Air Hangat Barat (14.13 km<sup>2</sup>). Luas wilayah Kabupaten Kerinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Kerinci Menurut Kecamatan**  
 (km<sup>2</sup>/sq.km)



Sumber: Kerinci dalam Angka, Tahun 2022

Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Kerinci adalah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bungo dan Merangin Provinsi Jambi



4. Sebelah Barat : Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

### **c. Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Provinsi Jambi, dimana secara astronomis berada diperlintasan transportasi darat utama yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Dari aspek geografis Kabupaten Kerinci terletak diantara  $01^{\circ}40'$  Lintang Selatan sampai dengan  $02^{\circ}26'$  Lintang Selatan dan diantara  $101^{\circ}08'$  Bujur Timur sampai dengan  $101^{\circ}50'$  Bujur Timur.

Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan yang bergelombang halus sampai perbukitan sedang dan pergunungan. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batumannya terlihat ke arah utara akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan bergelombang sampai pergunungan yang diikuti dengan variasi dan berbagai jenis batuan. Sedangkan kearah Selatan dijumpai morfologi dataran rendah dengan jenis batuan yang relatif sejenis.

### **d. Topografi**

Wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan dengan bentangan wilayah dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya, dan berada pada ketinggian 500 – 3.805 mdpl. Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki 5 (lima) klasifikasi lereng, dimana sekitar 35,53 persen atau hampir separuh wilayah Kabupaten Kerinci merupakan dataran bergelombang dengan kemiringan 15-25 persen. Sedangkan untuk wilayah datar dan relatif datar hanya mencapai 26,55 persen

sampai dengan 24,75 persen terdiri dari kemiringan lebih kecil dari 8 persen dan 8-15 persen.

#### **e. Geologi**

Secara geologi, struktur dan karakteristik Kabupaten Kerinci berada dalam sistem patahan (sesar) Sumatera yaitu Sesar Semangko yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian mulai dari Lampung sampai Aceh. Sebagian besar (98,44%) wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan yang membentang dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya yang berada pada ketinggian 500 mdpl - 3.805 mdpl merupakan bagian dari Bukit Barisan. Sebahagian Kabupaten Kerinci atau sekitar 81,22 persen wilayahnya terletak pada ketinggian di atas 1.000 mdpl dan sisanya atau 18,78 persen terletak di daerah dataran rendah 500 -1.000 mdpl dengan rata-rata curah hujan pertahun yang cukup tinggi.

#### **f. Hidrologi**

Pada dasarnya kondisi hidrologi Kabupaten Kerinci dapat terlihat dari adanya sumber-sumber air, baik berupa air permukaan, mata air, maupun air tanah:

##### **1. Air permukaan (sungai)**

Wilayah Kerinci merupakan bagian dan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang sepanjang pantai barat Sumatera. Titik tertinggi adalah puncak Gunung Kerinci. Terdapat banyak dataran sepanjang lembah Bukit Barisan tersebut. Pegunungan Bukit Barisan yang berada di sebelah barat dan timur Kerinci ini menjadi titik tertinggi di wilayah Kabupaten ini sehingga semua sungai yang mengalir kearah tengah dan selatan menuju dan bermuara ke Danau Kerinci.

Sungai yang terdapat di Kabupaten ini antara lain adalah : Sungai Sikai, Sungai Rumpun, Sungai Tanduk, Sungai Cubadak, Sungai Dadap, Sungai Simpang Tutup, Sungai Siulak Deras, Sungai

Koto Rendah, Sungai Bukit Sembahyang, Sungai Dusun Baru, Sungai Pendung Mudik, Sungai Air Patah, Sungai Terung, Sungai Semurup, Sungai Tutung, Sungai Hiang, Sungai Batang Sangkir, Sungai Betung Kuning, Sungai Cupak, Sungai Raja Seleman, Sungai Talang Kemulung, Sungai Lubuk Pagar, Sungai Tapan, Sungai Air Jernih, Sungai Air Terjun, Sungai Air Lintah, Sungai Talang Kemuning, Sungai Rawa Air Lingkat, Sungai Lumpur dan Sungai Renah Sako.

Berdasarkan identifikasi peta Topografi untuk wilayah Kabupaten Kerinci terdapat sebanyak 88 sungai dan anak sungai, beberapa diantaranya dimanfaatkan untuk irigasi, pemandian umum dan mencuci pakaian oleh masyarakat.

## **2. Mata Air**

Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki mata air yang terbentuk dari dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan batuan kedap air dibawahnya. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa danau, dan air terjun di daerah pegunungan.

## **3. Air Tanah**

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah di Kabupaten Kerinci umumnya relatif dalam, sekitar >100 cm, hal ini berdasarkan peta land unit, LREP 1 tahun 1990, diketahui bahwa kedalaman tanah di Kabupaten Kerinci sebagian besar berada pada kedalaman 101-150 cm dengan luasan mencapai 76,99% dari luas wilayah. Kecamatan Sitinjau Laut, Danau Kerinci, Keliling Danau, dan Gunung Raya memiliki kedalaman efektif tanah cukup dangkal yaitu antara 26-50 cm, sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.



**Tabel 2.1**  
**Kedalaman Efektif Tanah di Kabupaten Kerinci**

Kedalaman	Luas Ha)	%
26-50 cm	7.387	1,94
51-75 cm	5.459	1,43
76-100 cm	33.113	8,69
101-150 cm	293.212	76,99
>150 cm	21.046	5,53
Daerah air/Rawa	20.633	5,42

Sumber : Peta land unit, LREP 1 Tahun 1990 Lembar Sungai Penuh dan Lembar Painan

**g. Klimatologi**

Kondisi klimatologis di Kabupaten Kerinci diantaranya curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis, dan perputaran arus udara. Selama periode tahun 2018-2022, curah hujan tahunan di Kabupaten Kerinci relatif sedang hingga tinggi. Hal ini yang menyebabkan rata-rata suhu 22,4°C dengan kelembaban tertinggi pada 83 persen dan terendah 79,1 persen serta tekanan udara berada pada kisaran tertinggi 1.015,6 mb dan terendah pada 922,1 mb. Data klimatologi Kabupaten Kerinci tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Data Klimatologi Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**

Uraian	Rata-Rata				
	2018	2019	2020	2021	2022
Suhu (°C)					
· Maksimum	28,9	29,3	29,4	31,2	32,6
· Minimum	18,6	19,1	18,8	17,2	16,6
· Rata-rata	22,9	22,8	23,7	23	22,4
Kelembaban Relatif (%)	80,7	82	81	83	79,1
Tekanan Udara (mb)	1.014,60	1.015,30	1.015	923,5	922,1
Kecepatan Angin (knot)	5	4	5	4,5	4

Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	170,9	156,9	181,8	313.1	76,6
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	------

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2023

### 2.1.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.

Berdasarkan interpretasi Citra Satelit *Spot 6* tahun 2020 diketahui bahwa 228.348,97 ha atau 66,21 persen lahan di Kabupaten Kerinci merupakan kawasan hutan, sebagian besar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kerinci merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 204.703,00 ha atau 2.047,30 km<sup>2</sup> dan membentang ke empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Penggunaan Lahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2022**

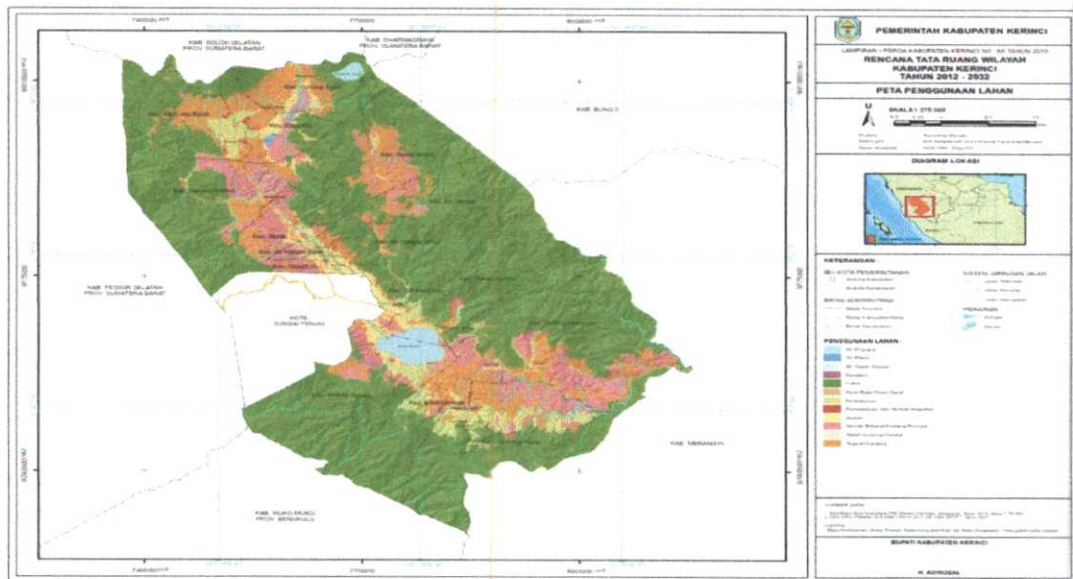
No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Air Danau / Situ	5.533,46	1,6
2.	Air Empang	33,72	0,01
3.	Air Rawa	297,64	0,09
4.	Air Tawar Sungai	396,95	0,12
5.	Bandara	21,65	0,01
6.	Hutan	228.348,97	66,21
7.	Pasir / Bukit Pasir Darat	45,41	0,01
8.	Perkebunan	46.597,88	13,51

9.	Permukiman dan Tempat Kegiatan	2.705,75	0,78
10.	Sawah	13.706,05	3,97
11.	Semak belukar/padang rumput	15.959,94	4,63
12.	Tanah Kosong / Gundul	91,16	0,03
13.	Tegalan / Ladang	31.150,39	9,03
Total		<b>344.890,00</b>	<b>100</b>

Sumber : Interpretasi Peta Citra Satelit Spot 2007 tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.3. luas penggunaan lahan terbesar adalah hutan seluas 228.348,97 ha atau 66,21 persen diikuti oleh perkebunan seluas 46.597,88 ha atau 13,51 persen dan tegalan / ladang seluas 31.150,39 ha atau 9,03 persen. Selengkapnya dapat diamati pada Tabel 2.2 di atas. Adapun Jenis Penggunaan Lahan di wilayah Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Gambar 2.2.

**Gambar 2.2**  
**Peta Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Kerinci**



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024



## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

**Tabel 2.4**  
**Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2018-2022 (%)**

Sektor PDRB		2018	2019	2020	2021	2022
<b>A.</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,66	51,11	49,25	47,60	46,97
<b>B.</b>	Pertambangan dan Penggalian	1,50	1,53	1,68	1,77	1,80
<b>C.</b>	Industri Pengolahan	2,92	2,92	2,80	2,73	2,71
<b>D.</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
<b>E.</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32
<b>F.</b>	Konstruksi	6,59	7,09	10,17	12,31	12,89
<b>G.</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,80	9,77	9,14	8,86	8,85
<b>H.</b>	Transportasi dan Pergudangan	2,68	2,72	2,52	2,46	2,55

<b>I.</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,89	0,83	0,81	0,81
<b>J.</b>	Informasi dan Komunikasi	7,11	7,23	7,49	7,70	7,98
<b>K.</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03
<b>L.</b>	Real Estate	1,77	1,79	1,69	1,63	1,58
<b>M.N.</b>	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>O.</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,75	5,58	5,25	5,09	4,87
<b>P.</b>	Jasa Pendidikan	4,42	4,41	4,37	4,25	4,16
<b>Q.</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,70	1,74	1,73	1,76	1,81
<b>R.S.T.U.</b>	Jasa lainnya	1,71	1,73	1,59	1,57	1,57
<b>PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Bappeda-Litbang Kab.Kerinci.2022.

Dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Kerinci sektor pertanian menempati urutan pertama sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angka pada tabel menunjukkan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hal ini, sektor pertanian perlu mendapatkan prioritas pengembangan.

Pemerintah Kabupaten Kerinci diharapkan meningkatkan sektor pertanian menjadi sektor yang maju. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan kelompok tani dan alat-alat moderen dalam bidang pertanian lainnya untuk menerapkan sapta usaha tani yang lebih baik lagi. Pemerintah Kabupaten Kerinci perlu memanfaatkan PAD secara lebih optimal dan menggali sumber-sumber PAD lainnya.

Sektor konstruksi menempati urutan kedua sebesar 11,11 persen, adanya pembangunan seperti pembangunan gedung kantor, rumah sakit, perbaikan jalan dan jembatan serta didukung



Pemkab Kerinci melalui Dinas PUPR telah menggelar pelatihan, pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) tingkat terampil untuk menunjang pertumbuhan sektor ini.

Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB (menggunakan pendekatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum) tidak mencapai angka 1 persen, pembangunan sektor pariwisata menjadi salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, kebijakan ini tentunya didasarkan pada berbagai potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci.

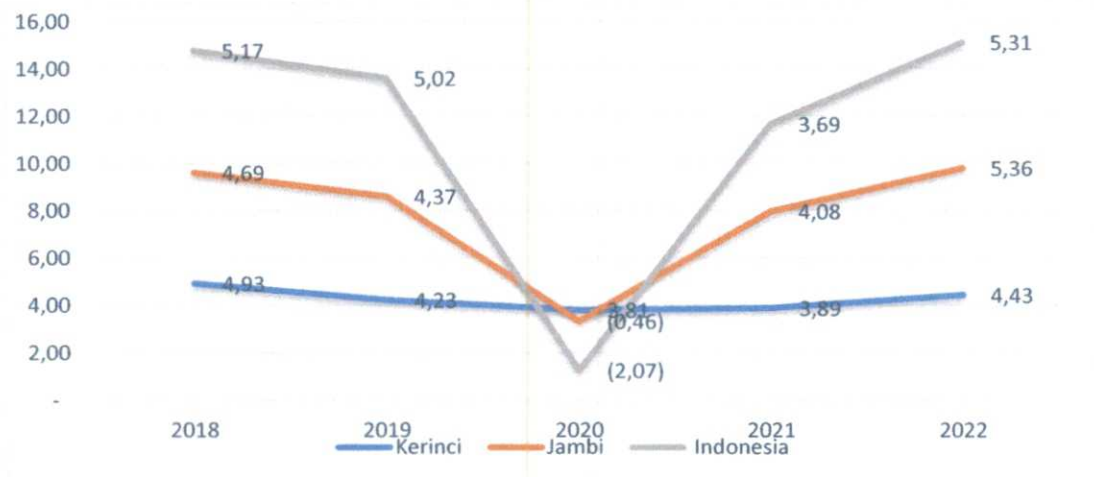
Tahun 2022 kedatangan wisatawan ke Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan yang didominasi melonjaknya wisatawan domestik. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 229 yang nantinya akan berpengaruh kepada meningkatnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Data ini menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memajukan sektor pariwisata dengan melakukan pembenahan infrastruktur objek wisata. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan *length of stay* wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 4,25 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 3,89 persen, hal ini seiring dengan menurunnya angka kasus *Covid-19* dan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,54 persen. Pertumbuhan positif tersebut menggambarkan pemulihan ekonomi di Kabupaten



Kerinci masih terus berlanjut dengan mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan *multiplier effect* terhadap pemulihan ekonomi.

**Gambar 2.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kerinci, Provinsi Jambi dan Nasional**



Sumber : Bappeda-Litbang Kab.Kerinci.2022.

Upaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi Kabupaten Kerinci perlu terus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh *stakeholder* terkait melalui penyesuaian program kerja dan upaya mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah mendorong promosi investasi, menjaga kinerja ekonomi agar mampu mendorong penciptaan tenaga kerja, serta menjaga tingkat inflasi.

## 2. PDRB Per Kapita

Perkembangan nilai PDRB suatu daerah menunjukkan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah. Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga atau pendapatan terus menerus bertambah. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Kerinci terlihat pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan secara positif. Pada gambar berikut ini

diperlihatkan pertumbuhan dan kontribusi setiap sektor pada PDRB Kabupaten Kerinci dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

**Gambar 2.4**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**

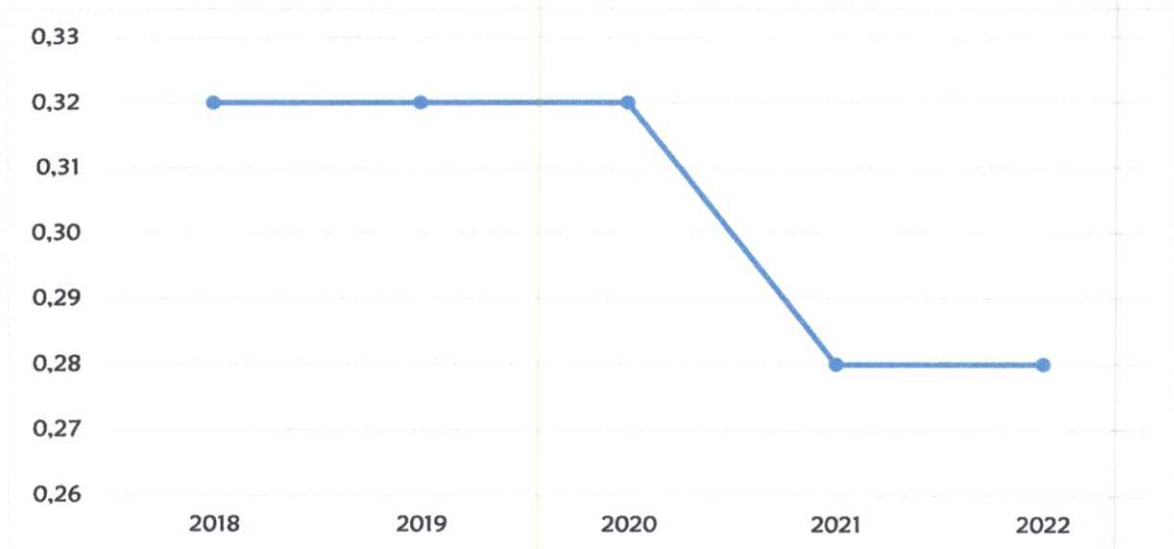


Sumber : Bappeda-Litbang Kab.Kerinci.2022.

### 3. Gini Ratio

Koefisien gini (*Gini Ratio*) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.5.

**Gambar 2.5**  
**Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**



Sumber: Sumber : BPS, diolah.

Angka Gini ratio selama periode 2018-2022 menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat masuk kategori ketimpangan rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Kerinci untuk mereduksi gini ratio sehingga distribusi pendapatan semakin merata dengan memberikan kesempatan dan dukungan kepada masyarakat dalam menggali potensi terutama pada sektor industri ekonomi kreatif dan pariwisata yang melibatkan *stakeholder* terkait.

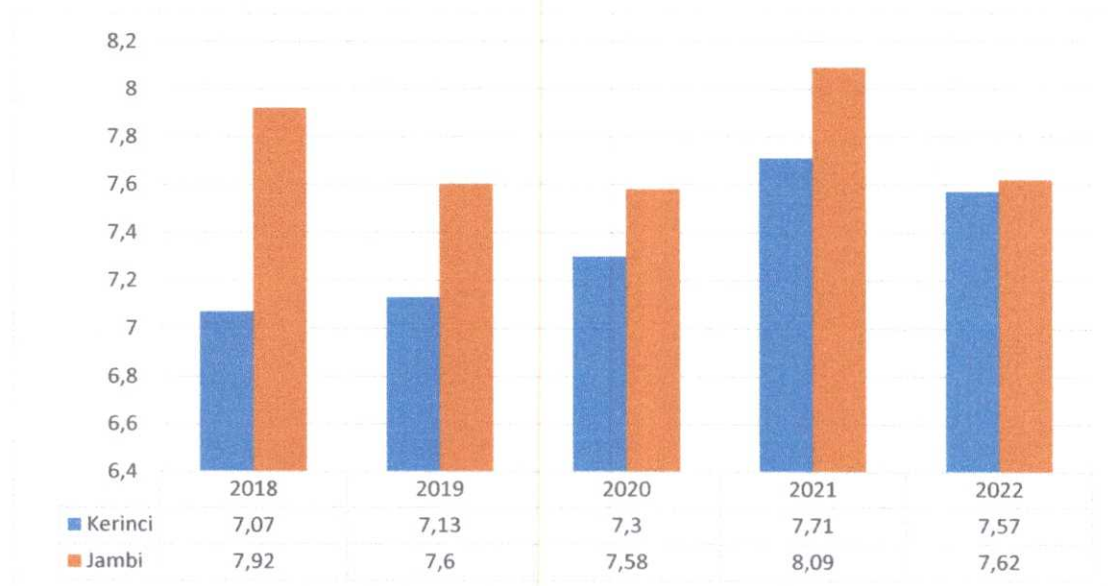
#### **4. Kemiskinan**

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.



Peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021 dipicu pandemi *covid-19* yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kabupaten Kerinci memiliki sektor unggulan dan didukung program pemerintah telah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun 2022.

**Gambar 2.6**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi Tahun 2018-2022**



Aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat, oleh karena itu informasi mengenai profil dan karakteristik kemiskinan sangat diperlukan oleh para perencana dan pengambil kebijakan (*stakeholder*). Upaya mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kerinci dapat dilakukan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta adanya dukungan dari pemerintah, *stakeholder* dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, angka penduduk miskin ekstrim kabupaten kerinci mencapai 4.132

orang atau 1,72 persen pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 lalu hanya mencapai 1.523 orang atau 0,64 persen saja, yang menyebar di beberapa Kecamatan. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (*purchasing power parity*) per kapita per hari (setara Rp9.089 per hari), melemahnya sektor ekonomi menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer, selain itu naiknya harga kebutuhan pokok juga akan berdampak dengan meningkatnya angka kemiskinan, jika tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Sosial melakukan berbagai upaya dalam penghapusan kemiskinan ekstrim, program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial diharapkan dapat mempercepat turunnya angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kerinci.

Data bantuan sosial dari Kementerian Sosial tahun 2023:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Program Keluarga Harapan (PKH)                 | : 9046 penerima   |
| 2. Bantuan Pangan Non Tunai                       | : 20.859 penerima |
| 3. BLT EL NINO                                    | : 18.385 penerima |
| 4. Pahlawan Ekonomi Nusantara<br>Penerima Manfaat | : 3 Keluarga      |
| 5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial        | : 1.107 penerima  |

### **5. Pengangguran**

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang di hadapi di setiap negara, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu negara yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak merata.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 terjadi peningkatan pesat

yaitu sebesar 7,07. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami kelumpuhan sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga meningkatkan angka pengangguran.

**Gambar 2.7**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**



Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kerinci, pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 2,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2,62 persen. Sedangkan tahun 2021 kembali menurun menjadi 2,32 persen, a danya pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Batang Merangin berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kerinci, sebanyak 74 persen pekerja lokal di wilayah sekitar proyek tersebut.

Pada tahun 2022 TPT Kabupaten Kerinci menjadi 2,63 persen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah penduduk pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Ketika populasi meningkat, penawaran tenaga kerja juga akan meningkat. Jika permintaan tenaga kerja tidak mampu menyerap banyaknya penawaran tenaga kerja maka pengangguran akan meningkat.



Tantangan kedepan untuk menurunkan angka TPT di Kabupaten Kerinci adalah:

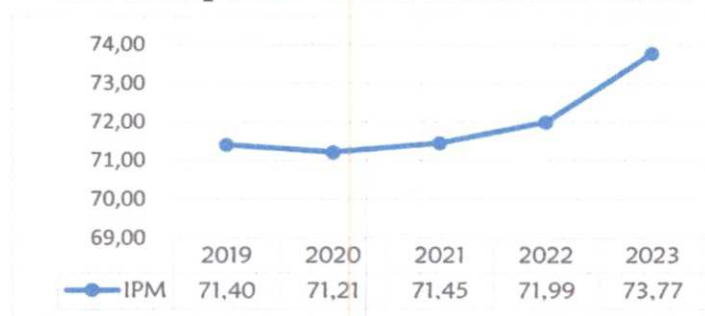
- a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri ekonomi kreatif dan dunia usaha khususnya disektor pariwisata dan jasa (produk batik dan barista);
- b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan;
- c. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana balai latihan kerja (BLK);
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

## 2.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), direpresentasikan dalam tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak. Gambaran IPM Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam grafik berikut :

**Gambar 2.8**  
**IPM Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2023**



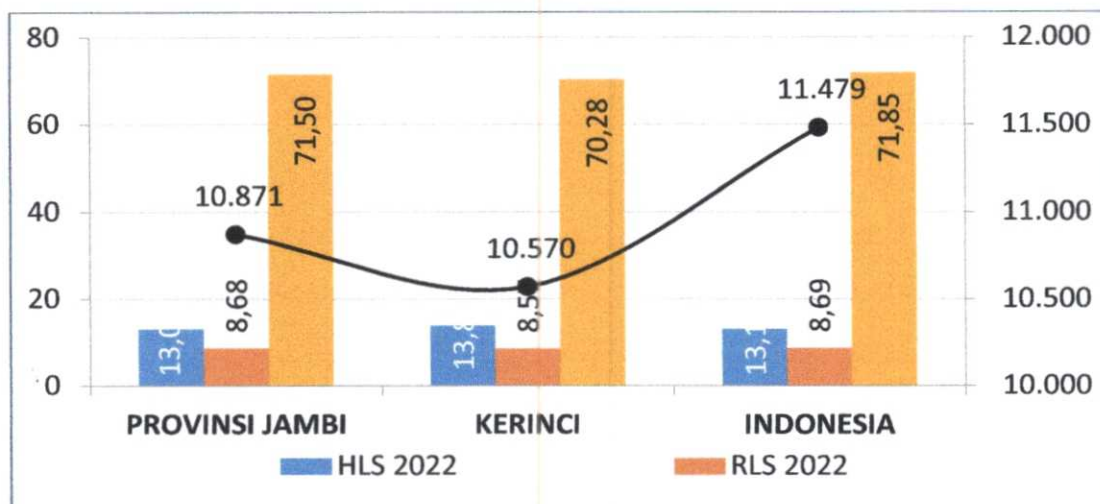
Sumber : BPS Kabupaten Kerinci.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kerinci meningkat tiap tahunnya, hal ini menandakan keberhasilan dalam tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak. Pendidikan yang diproksikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS di Kabupaten Kerinci tercatat mencapai 13,89 tahun pada 2023. Ini artinya, anak-anak di kabupaten Kerinci yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan setidaknya hingga diploma 1.

RLS (Rata-rata Lama Sekolah) di Kabupaten Kerinci diangka 8,57 persen, artinya jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam *pendidikan* formal selama 8,57 tahun. Batas nilai maksimum secara nasional (sesuai dengan standar global UNDP) adalah 15, artinya RLS Kabupaten Kerinci masih jauh tertinggal dari angka maksimum.

Bidang kesehatan dapat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH Kabupaten Kerinci adalah 70,28 persen. Harapan Hidup yang di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Kehidupan yang layak adalah indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah barang pokok.

**Gambar 2.9**  
**HLS,RLS,UHH Kabupaten Kerinci ,Provinsi Jambi,dan Nasional**  
**Tahun 2022**



Peningkatan angka IPM Kabupaten Kerinci ini tentu saja menjadi landasan yang kokoh untuk terus berupaya lebih baik. Pemerintah daerah dan pihak terkait di Kabupaten Kerinci dapat menggunakan momentum positif ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi ketimpangan, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

## 2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi .

**Tabel 2.5**  
**IKG Kabupaten Kerinci Tahun 2020 – 2022**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
1	Provinsi Jambi	Persen	0,558	0,554	0,540



2	Kerinci	Persen	0,592	0,568	0,571
---	---------	--------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Indeks Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2021 Kabupaten Kerinci mengalami penurunan sebesar 0,024 persen dibanding tahun sebelumnya diangka 0,592 persen. Angka IKG di Kabupaten Kerinci menjelaskan ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Namun pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,003 persen dari tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia dan kesetaraan gender saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan satu sama lain. Kesetaraan gender adalah prinsip dasar hak asasi manusia yang menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Saat semua individu, termasuk perempuan, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan sumber daya lainnya, hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan sejahtera. Pada akhirnya akan tercipta pembangunan manusia yang berkualitas di suatu wilayah.

Untuk menurunkan angka IKG, Pemerintah Kabupaten Kerinci perlu melakukan tindakan afirmatif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan seperti menekan angka perkawinan dini, menyediakan lingkungan kerja "ramah perempuan dan keluarga" mulai dari fasilitas sanitasi-air bersih yang memadai, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak yang aman dan nyaman, melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi perempuan yang berijazah SMP/SMA, dan menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi perempuan.

### **2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga**

#### **1. Kebudayaan**

Pentingnya kebudayaan untuk mengembangkan suatu pendidikan dalam mengupayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai budaya-budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan pembangunan daerah serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebudayaan merupakan warisan sosial seperti bahasa dapat dipindahkan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Kebudayaan masyarakat itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Kabupaten Kerinci memiliki kebudayaan yang sangat banyak namun ada beberapa bentuk kebudayaan yang mejadi kebanggaan dan daya tarik tersendiri seperti *Kenduri Sko, Kenduri Peresmian Pernikahan Tari Tale Keberangkatan Haji, Tari Tupai, Tari Upacara Asyiek, Tari Ngugah Harimau, Lemang Kantong Semar, Pesta Perndan* lain-lain.

Keputusan Presiden RI nomor 84 Tahun 1999 bahwa Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan seni dan budaya yang potensial. Penampilan seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pertunjukan dan pameran seni dan budaya. Semakin banyak seni dan budaya hasil kreatifitas pelaku seni budaya yang dipertunjukan melalui penyelenggaraan event menunjukkan bahwa semakin beragam kebudayaan daerah tersebut.

**Tabel 2.6**  
**Data Wisata Budaya Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2023**

No	Event/ Wisata Budaya	Tahun	Keterangan
1.	Tour de Singkarak	2019	Kerjasama dengan Sumbar
2.	Petik Teh Massal (rekor muri)	2019	Rekor Muri
3.	Festival Kerinci	2019, 2020, 2021,2022	
4.	Kenduri Swarna Bhumi/ Kenduri Sko (Tanjung Tanah)	2022	Kerjasama dengan Mendikbud RI
5.	Kerintji Mountain Bike Gran Fondo 2022	2022	Kerjama degan Pemprov. Jambi
6.	Kayu Aro Culture Festival 2023	2023	Sedekah Hasi Bumi

Sumber : Disparbud Kab.Kerinci, 2023.

## **2. Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol norma sosial. Oleh sebab itu generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa pelopor serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk dapat ikut berperan dalam proses pembangunan. Capaian prestasi olahraga menjadi kebanggaan bagi suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah berupaya untuk meningkatkan capaian prestasi olahraga dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga maupun melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelatih dan atlet.

Peran pemerintah daerah melalui Dispora dalam memaksimalkan potensi para atlet dan mampu memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan prestasi atlet. Saat ini keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi



harus ditangani secara profesional. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk pengembangan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas masyarakat tentu saja membutuhkan stimulasi bagi peningkatan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kerinci menyiapkan, menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi menyiapkan angkatan muda untuk dapat berkompetisi diajang nasional dan internasional serta diarahkan pada pembangunan sosial yang positif yang kemudian diterapkan di Kabupaten Kerinci sebagai sebuah kabupaten yang mampu mengembangkan potensi olahraga masyarakat. Pengelolaan gelanggang olahraga itu sendiri pada saat ini masih terkendala anggaran untuk memenuhi kapasitas sarana prasarana penunjang untuk pelatihan olahraga atlet, Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan pendanaan dan dukungan prasarana dan sarana olahraga dianggap belum kuat dan itu sering dituding menjadi salah satu sebab terpuruknya prestasi olah raga, begitu juga dengan kepedulian masyarakat dan *stakeholders* terkait dirasa belum memadai.

### **3. Pariwisata**

Kabupaten Kerinci dengan keindahan alam dan keanekaragaman kekayaan hayati menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola secara baik. Objek wisata Kabupaten Kerinci terdiri dari wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi. Pembatasan mobilitas masyarakat dan akses keluar masuk dari negara lain, menyebabkan jumlah wisatawan di Kabupaten Kerinci berkurang secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 kedatangan wisatawan ke Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan yang didominasi

melonjaknya wisatawan domestik. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 229.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2018	7.661	223.259	230.920
2019	7.720	250.903	258.623
2020	138	186.678	186.825
2021	-	252.324	252.324
2022	229	327.234	327.463

Sumber : Disparbud Kab. Kerinci, 2022.

Dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Bappeda Litbang melakukan Kajian Pengembangan Pariwisata dan Strategi Peningkatan PAD bekerjasama dengan Universitas Andalas (UNAND) dan Universitas Negeri Padang (UNP), dimana hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengambil kebijakan dalam memajukan sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan.

## **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

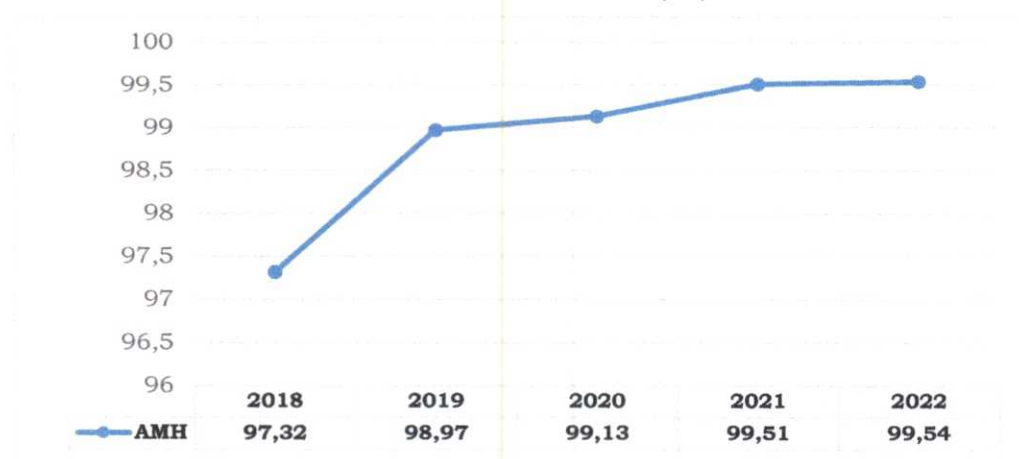
### **1. Pendidikan**

#### **a) Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka melek huruf merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis.

Persentase penduduk yang melek huruf di Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022 memiliki trend meningkat. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan program keaksaraan yang diperoleh penduduk dalam meningkatkan kemampuan kata-kata tertulis. Pada tahun 2022 AMH di Kabupaten Kerinci hampir menyentuh angka 100 persen sebagai capaian maksimal, yaitu 99,54 persen artinya sebesar 99,54 persen penduduk di Kabupaten Kerinci yang berusia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Data selengkapnya dapat kita lihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.10**  
**Angka Melek Huruf Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2018-2022 (%)**



*Sumber : Dinas Pendidikan ,2022.*

#### **b . Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Indikator pengetahuan penduduk yang dapat mewakili tingkat keterampilan yang telah memperoleh pendidikan, diantaranya melalui rata-rata lama sekolah dari keseluruhan jenjang dan tingkat pendidikan formal yang pernah/sedang diduduki. Semakin tinggi mereka mengenyam pendidikan, diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik.

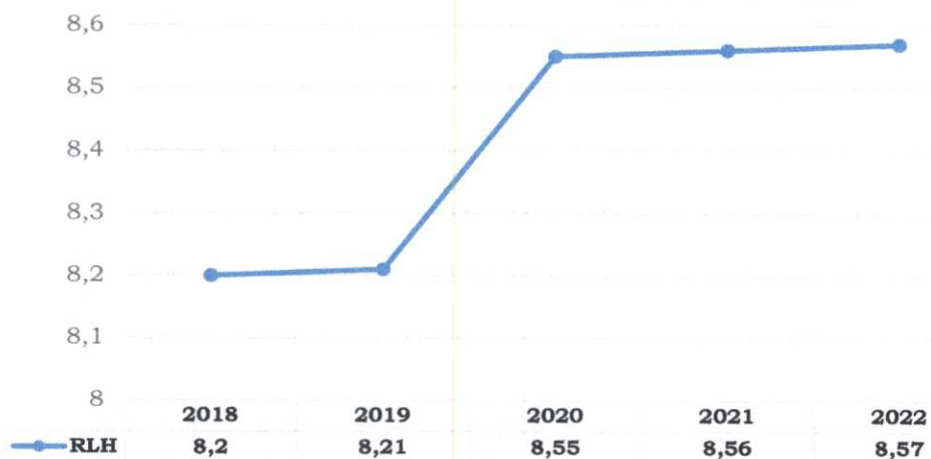
Tantangan ke depan bagi perencanaan pendidikan dengan mengentaskan penduduk Kabupaten Kerinci untuk menuntaskan



wajib belajar 9 tahun. Konsekuensinya anggaran pendidikan difokuskan pada pemerataan pendidikan dan terus dilakukannya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Demikian juga program peningkatan kesejahteraan rumah tangga, terutama yang di dalamnya ada anak-anak usia sekolah SD sampai dengan SLTP juga harus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan indikator ini dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya pendidikan serta membutuhkan waktu yang relatif panjang. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi pemerintah daerah dan dukungan sektor swasta. Data selengkapnya dapat kita lihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.11**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2018-2022

### **c . Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada APK, korelasinya yaitu semakin

tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8**  
**Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>SD/MI</b>	Persen	107,11	97,21	101,04	103,27	97,91
2	<b>SMP/MTs</b>	Persen	95,72	61,97	76,54	100,02	82,72

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022.

Angka Partisipasi Kasar (APK) selama kurun waktu lima tahun di Kabupaten Kerinci berfluktuatif. Dari data yang ada menunjukkan Kerinci mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya pada tahun 2021. Skor APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan untuk tingkat SD/MI menjadi 97,91 persen dan tingkat SMP/MTs menjadi 82,72 persen.

#### **d . Angka Partisipasi Murni**

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada dijenjang pendidikan tertentu. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Kegunaannya adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk

usia sekolah. Angka partisipasi murni di Kabupaten Kerinci tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>SD/MI</b>	Persen	97,30	96,74	95,38	95,38	90,56
2	<b>SMP/MTS</b>	Persen	91,29	71,90	65,38	66,51	70,73

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Pada tabel di atas menunjukkan APM tingkat SD/MI sebesar 90,56 persen artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 90 orang bersekolah di bangku SD/MI. Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 di SMP/MTS (66,51%) lebih rendah dibanding SD/MI. Kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas, dan motivasi dalam menempuh pendidikan lebih tinggi menjadi faktor pemicu lebih rendahnya APM tingkat SMP/MTS.

Pendidikan sebagai urusan wajib berpelayanan dasar, memiliki Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM urusan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud 32 tahun 2018 mengharuskan capaian setiap tahun adalah 100%. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator pada urusan pendidikan khususnya capaian SPM belum maksimal. Pemenuhan terhadap indikator SPM di Kabupaten Kerinci tahun 2022 pada indikator Angka Melek Huruf mencapai 99,54 persen, Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI adalah 97,91 persen sedangkan tingkat SMP/MTs mencapai 82,72 persen. Untuk capaian Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI 90,56 persen dan tingkat SMP/MTs adalah 70,73 persen. Data capaian peneraparan bidang pendidikan secara keseluruhan adalah 73,39 persen.



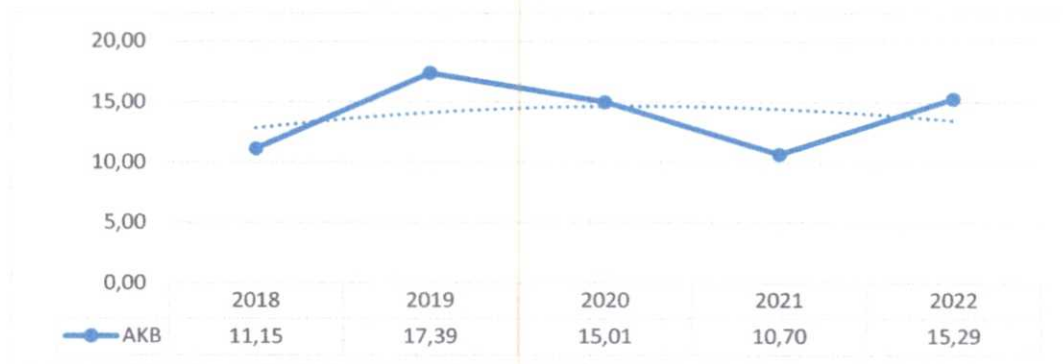
Penerapan Standar Pelayanan Minimal membutuhkan mekanisme lintas sektor melalui berbagai forum di tingkat Kab/Kota, termasuk mendorong peran Tim Penerapan SPM Kab/Kota untuk aktif berkoordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi dan Sekretariat Bersama (Pemerintah Pusat). Monitoring atau pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk mengawasi secara terus menerus kegiatan staf dalam melaksanakan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Semakin baik proses pengawasan, pengendalian, dan penilaian (P3), maka semakin tinggi pencapaian cakupan indikator yang memenuhi target SPM.

## 2. Kesehatan

### a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Capaian skor AKB harus terus dilakukan melalui program-program pemerintah untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Grafik AKB di Kabupaten Kerinci ditunjukkan pada gambar berikut.

**Gambar 2.12**  
**Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kerinci tahun 2022 sebesar 15,29 per 1000 kelahiran hidup atau terdapat 15 orang bayi meninggal disetiap 1000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan

tahun 2021 dimana AKB sebesar 10,70 per 1000 kelahiran hidup, maka pada tahun 2022 capaian kinerja ini mengalami penurunan. Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2021 sebanyak 10 bayi, di tahun 2022 naik menjadi 5 bayi.

Hal ini menjadi salah satu indikasi belum berhasilnya program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi. Masih banyak masyarakat daerah pedesaan terkendala pembiayaan persalinan sehingga masyarakat enggan pergi ke fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi ibu saat akan melahirkan merupakan salah satu faktor meningkatnya AKB. Faktor-faktor lainnya seperti infeksi, kelahiran prematur, dan gangguan perkembangan.

#### **b. Angka Kematian Balita**

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. AKABA di Kabupaten Kerinci lebih rendah dibandingkan dengan AKB. Angka kematian balita di Kabupaten Kerinci harus terus diturunkan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan, serta fasilitas dan pelayanan kesehatan. AKABA di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.13**  
**Angka Kematian Balita di Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**



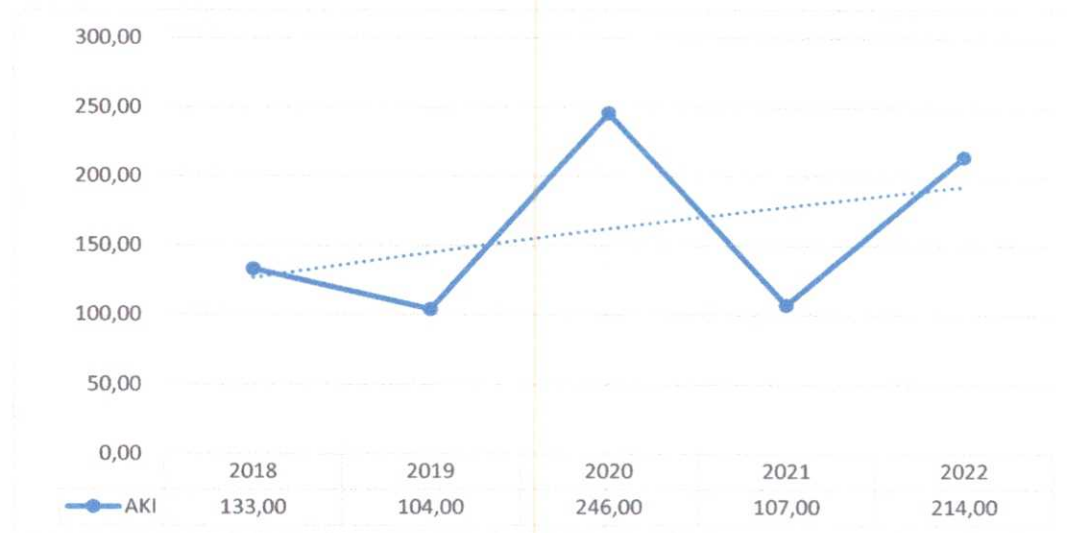
Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Kerinci perlu menjadi perhatian karena jika melihat trend 5 tahun terakhir, tidak menutup kemungkinan akan ada peningkatan kembali tahun berikutnya. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor - faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan sebab lainnya. Olehnya itu, perlu ada peningkatan upaya penanganan kematian balita misalnya pada program Manajemen Balita Sakit (MTBS) dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK).

### c. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 AKI di Kabupaten Kerinci menunjukkan angka 214, artinya terjadi 214 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup.

**Gambar 2.14**  
**Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan, 2022



Dukungan penuh dalam menekan angka kematian dari pemerintah berupa support anggaran baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan diupayakan semaksimal mungkin dapat mencapai kepada seluruh masyarakat melalui unit-unit pelayanan yang ada disetiap kecamatan.

#### **d. Pravelensi Stunting**

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci angka stunting di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sebesar 26,7 persen dan pada tahun 2022 menjadi 24,7 persen. Penurunan angka stunting ini merupakan hasil dari kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, angka penurunan ini belum mampu memenuhi target nasional yaitu 14 persen. Faktor penyebab stunting itu beragam, seperti pola makan anak, pola asuh orang tua, faktor keturunan, asupan gizi yang kurang terhadap ibu hamil dan balita, pernikahan usia dini, serta faktor lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menekan angka stunting hendaknya berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan gizi. Fokus pada pendekatan komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan balita, serta peningkatan distribusi suplemen gizi.

Langkah untuk menurunkan angka pravelensi stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan pihak lainnya antara lain :

1. KEMENAG : Bimbingan Perkawainan bagi calon pengantin

2. PEMDES : Penguatan Kader KPM, pengawasan pemanfaatan dana desa terkait program stunting
3. BKKBN : Pendampingan Keluarga Berisiko
4. Dinkas : Aksi Bergizi
5. Ketahanan Pangan : PMT fortifikasi (provinsi)
6. Bappeda : Rencana Penganggaran APBD terkait Program stunting.

Inovasi di bidang kesehatan menjadi salah satu strategi dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Kerinci, seperti melakukan pendampingan calon pengantin, Ibu hamil, Ibu hamil pasca persalinan dan pendampingan pengolahan makanan bergizi serta adanya Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan melibatkan Baznas, Bank Pembangunan Jambi dan PTPN VI diharapkan dapat memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2024 yaitu 14 persen.

#### **e. Insidensi Tuberkulosis**

Tuberkulosis paru masih menjadi masalah kesehatan prioritas global karena menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia untuk penyakit infeksi. Provinsi Jambi menduduki peringkat kelima di Indonesia. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, penyakit ini terbanyak diderita penduduk. Pada tahun 2022 tingkat prevalensi tuberkulosis Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 14,17 persen, yaitu diangka 69,26 persen. Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki tantangan besar dalam menurunkan angka insidensi tuberkulosis, keterlibatan dan kerjasama banyak pihak sangat diperlukan dalam menekan menyelesaikan masalah ini. Berikut gambar tingkat prevalensi tuberkulosis Kabupaten Kerinci tahun 2018-2022 :

**Gambar 2.15**  
**Tingkat Pravelensi Tuberkulosis di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Kerinci ,2022

Upaya pencegahan yang dilakukan agar terhindar dari penyakit tuberkulosis diantaranya adalah dengan membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu yang dilakukan adalah jika batuk harus menutup mulut dan tidak meludah disembarang tempat, mengisolasi peralatan makan dan minum penderita, mengurangi hubungan atau komunikasi dengan penderita dan membuka pintu dan jendela setiap pagi.

Petugas kesehatan perlu melakukan pemberian Komunikasi, Informasi dan, Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara optimal bekerja sama dengan kader kesehatan di desa tentang upaya pencegahan tuberkulosis paru, agar terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan penyakit tuberkulosis sehingga dapat menekan dan mencegah penularan penyakit.

Disamping itu perlu ditingkatkan kegiatan kunjungan rumah bagi petugas kesehatan untuk mengevaluasi kemampuan penderita terkait keperawatan mandiri penderita penyakit tuberkulosis paru dan mencegah terjadinya penularan tuberkulosis paru. Petugas Kesehatan melakukan penyuluhan, baik melalui Leaflet , ataupun media yang



lain serta memberikan bimbingan dan konseling diikuti dengan demonstrasi kepada penderita Tuberkulosis paru dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian Penderita Tuberkulosis paru dalam pengobatan dan pencegahan penularan.

#### **f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan**

Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS. Implementasinya dimulai sejak tahun 2014, kebijakan ini menjamin segala macam kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Pada tahun 2022 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sudah sangat tinggi hampir menyentuh angka 100 persen yaitu 99,38 persen. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Kesehatan menganggarkan dana sebesar Rp. 7.074.194.400 untuk program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sosialisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Kerinci sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Prinsip Dasar SPM Bidang Kesehatan: 1) Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah; Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah; 4) Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhannya; serta 5) berlaku secara nasional. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus

dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Capaian SPM bidang kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Kerinci adalah 26,71 persen, masih rendahnya angka capaian SPM dalam pelayanan kesehatan mengindikasikan mutu pelayanan kesehatan belum berjalan maksimal. Kendala teknis dan non teknis seperti masih adanya ibu hamil yang tidak kontrol ke faskes, proses dokumentasi data, dan kurangnya data dukung yang diinput dalam pelaporan SPM.

SPM Bidang Kesehatan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

### **3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

#### **a. Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Kabupaten Kerinci sangat penting karena mempermudah akses transportasi, memfasilitasi aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain aspek fisik, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,

sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Agar tetap mampu berperan dengan baik, infrastruktur jalan harus dijaga kualitasnya melalui pemeliharaan baik rutin maupun berkala.

Panjang jalan Kabupaten Kerinci sampai tahun 2022 adalah 933,12 km dengan kondisi Baik sepanjang 377,29 km atau 40,43 persen. Bila dilihat dari kategori Mantap dan Tidak Mantap maka pada tahun 2022 jalan Kabupaten Kerinci yang dalam kondisi Mantap adalah sepanjang 458,38 atau 49,12 persen, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari data pada tabel 2.10 tiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas PUPR melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan, namun ada pula sejumlah jalan yang tidak mendapat perawatan. Sehingga pada akhirnya mengalami kerusakan dan tak langsung diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Untuk dapat mempertahankan jalan dalam kondisi mantap, maka sistem pemeliharaan yang ada sekarang perlu di kaji ulang dengan membuat sistem pemeliharaan yang benar-benar terprogram sesuai dengan identifikasi tingkat kerusakan yang terjadi, agar dapat menghemat biaya anggaran perbaikan jalan yang rusak.



**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2018-2022**

KEADAAN		STATUS JALAN									
		JALAN KABUPATEN									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
<b>I. JENIS PERMUKAAN</b>											
a.	Aspal / Penetrasi Macadam	499,19	53,5	484,25	51,9	508,55	54,5	425,,23	46,15	430,03	46,68
b.	Telford / Kerikil	132,82	14,2	140,26	15	141,23	15,1	160,22	17,39	155,52	16,88
c.	Tanah / Belum Tembus	301,11	32,3	308,62	33,1	283,34	30,4	335,87	36,46	335,77	36,44
<b>JUMLAH</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>		<b>933,1</b>		<b>921,32</b>		<b>921,32</b>	
<b>II. KONDISI JALAN</b>											
a.	Baik	367,13	39,3	393,6	42,2	403,23	43,2	371,29	39,79	377,29	40,43
b.	Sedang	51,33	5,5	42,15	4,52	53,65	5,75	78,99	8,47	81,09	8,69
c.	Rusak Ringan	243,93	26,1	228,93	24,5	185,55	19,9	64,83	6,95	58,13	6,23
d.	Rusak Berat	270,73	29	268,44	28,8	290,69	31,2	418,01	44,80	416,61	44,65
<b>JUMLAH</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>	
<b>III. KEMANTAPAN JALAN</b>											
a.	Mantap	418,46	44,9	435,75	46,7	456,88	49	450,28	48,26	458,38	49,12
b.	Tidak Mantap	514,66	55,2	497,37	53,3	476,24	51	482,84	51,74	474,74	50,88
<b>JUMLAH</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>		<b>933,12</b>	

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2022

## **b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

**Tabel 2.11**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Penduduk di Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan (km)	933.120	933.120	933.120	933.120	933.120
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	237.731	238.682	250.259	254,241	261.970
	<b>Rasio</b>	<b>3,92</b>	<b>3,90</b>	<b>3,72</b>	<b>3,67</b>	<b>3,56</b>

Sumber : Dinas PUPR,diolah 2022.

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 rata-rata rasionya sebesar 3,75 persen yang nilai yang menunjukkan kecenderungan menurun yang diduga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang dihadapkan dengan panjang jalan yang tidak bertambah dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

## **c. Rasio Layanan Irigasi**

Pengertian rasio layanan irigasi adalah perbandingan panjang saluran irigasi terhadap luas lahan budidaya. Rasio layanan irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pembangunan irigasi ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi hasil pertanian.



**Tabel 2.12**  
**Rasio Layanan irigasi di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Saluran Irigasi	10.320	4.849	800	2064	3975
2	Luas lahan budidaya pertanian	16.022	16.022	12.943,97	12.943,97	12.943,97
3	Rasio	64,4	30,3	6,2	15,9	30,7

Sumber : Dinas PUPR, 2021.

Rasio layanan irigasi di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, baik panjang saluran irigasi maupun luas lahan budidaya pertanian artinya kemampuan saluran untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan tidak berjalan secara optimal. Data tahun 2016 angka rasio cukup baik, yaitu 64.4 % menurun lagi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 namun pada tahun 2020 ada penambahan saluran irigasi sepanjang 1911 meter, kenaikan rasio ini disebabkan oleh pemeliharaan saluran irigasi atau memang ada pembangunan saluran baru.

Masalah utama irigasi meliputi pendangkalan waduk, pendangkalan bendung dan kanal, kerusakan saluran akibat lemahnya pemeliharaan, sistem irigasi tidak lagi sesuai dengan tuntutan perubahan iklim, buruknya distribusi dan pengelolaan air, serta perbaikan dan pemeliharaan yang acap kali dijadikan proyek segelintir orang. Pendangkalan juga dipicu longsornya dinding saluran irigasi karena dinding saluran umumnya berupa tanah. Dinding saluran irigasi yang tak memadai juga memicu kebocoran penyaluran air. Air irigasi merembes di dinding-dinding tersebut sehingga menurunkan debit air. Persoalan irigasi yang tidak memadai terus menjadi momok petani, tidak berfungsinya saluran irigasi dapat mengurangi hasil panen.

#### **4. Penataan Ruang**

##### **a. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)**



Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kabupaten Kerinci sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci.

**Tabel 2.13**  
**Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016 – 2020**

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas RTH (ha)	17	18	19	20	20
2	Luas kawasan perkotaan (ha)	1.804,72	1.804,72	1.804,72	1.804,72	1.804,72
3	Persentase RTH terhadap luas kawasan perkotaan	0,94	0,99	1,05	1,11	1,11

Sumber : Dinas PUPR, 2021.

Data menunjukkan bahwa tiap tahun luas RTH Kabupaten Kerinci meningkat namun belum memenuhi standar 20% sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kabupaten Kerinci.

Capaian Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci mencapai angka 91,08 persen pada tahun 2022, artinya **tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas** jika bernilai antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang (RTR).

Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan mengoptimalkan target capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dibidang infrastruktur. Capaian secara keseluruhan SPM Pekerjaan Umum pada web <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> Kabupaten Kerinci adalah 82,77 persen.

Untuk meningkatkan angka capaian SPM faktor-faktor pendukung perlu ditingkatkan. Peningkatan ketersediaan fisik dan kualitas fisik tidak akan dapat tercapai tanpa dukungan anggaran. Untuk itu maka anggaran infrastruktur harus terus dipertahankan atau ditingkatkan melalui sumber-sumber pendanaan baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak swasta. Anggaran infrastruktur tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur baru tetapi anggaran pemeliharaan juga sangat diperlukan untuk menjaga kualitas infrastruktur yang ada. Sementara itu untuk anggaran yang terbatas dapat diprioritaskan pada infrastruktur yang diperkirakan akan membawa multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci.

Strategi lainnya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun sangat diperlukan. Peningkatan kesadaran masyarakat tidak hanya melalui sosialisasi tetapi juga harus ada harus ada penegakan aturan yang jelas.

## **5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Derajat kesehatan dapat dilihat dari kesehatan rumahnya dan kemampuan masyarakat untuk mengakses air bersih yang akan digunakan di rumah tangga. Dari Tabel 2. dapat dilihat bahwa jumlah



Rumah Tangga yang mengakses Air Bersih di Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan.

**Tabel 2.14**  
**Pengguna Air Bersih Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan (KK)	28224	30341	46422	46422	49040
Jumlah Rumah Tangga	68567	68883	69176	69436	69709
%	41,16	44,05	67,11	66,86	70,35

Sumber : Dinas PUPR, 2021.

Beberapa kriteria yang masuk sebagai rumah layak huni menurut BPS antara lain memiliki atap, dinding, dan lantai dengan ketahanan yang kuat; luas lantai per kapita minimal 7,2 m<sup>2</sup>; akses sumber air minum layak; dan sanitasi layak. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dinyatakan bahwa definisi Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Pada tahun 2022 Kabupaten Kerinci memiliki persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebesar 57,80 persen. Persentase rumah layak huni adalah 46.503 unit jumlah rumah layak huni dalam kabupaten Kerinci terhadap jumlah rumah 80.444 unit dalam kabupaten Kerinci dengan capaian sanitasi layak sebesar 57,66 persen, artinya 57,66 persen rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.

Akses terhadap air perpipaan, diukur dari proporsi rumahtangga yang menggunakan air perpipaan/ PDAM sebagai sumber air minum, Kabupaten Kerinci mencapai angka 43,80 persen



pada tahun 2022. Masyarakat yang tidak terhubung dengan PDAM biasanya memiliki sumur di tempat tinggal mereka dengan memanfaatkan mata air yang ada dalam memnuhi kebutuhan air sehari-hari.

Urusan pelayanan pada capaian SPM bidang Perumahan rakyat adalah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota. Capaian angka SPM bidang Perumahan Rakyat adalah 40 persen, angka ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan perumahan rakyat kepada masyarakat setempat. Beberapa faktor penyebab masih rendahnya angka SPM bidang perumahan rakyat adalah;

1. Perencanaan belum sesuai dengan kondisi dilapangan
2. Belum mempunyai basis data kebencanaan
3. Keterbatasan anggaran
4. Sulitnya menghitung capaian SPM ketika tidak terjadi bencana dan akibat program pemerintah
5. Sulit menentukan target sasaran akibat bencana.

## **6. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

### **1. Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

Polisi PamongPraja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas penda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,

menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio Jumlah Pol-PP Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.15.

**Tabel 2.15**  
**Rasio Jumlah Pol-PP Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Polisi Pamong Praja	265	234	234	192	204
2.	Jumlah Penduduk	234.882	235.802	237.731	238.682	250.259
3.	Rasio per 10.000 penduduk	<b>11,282</b>	<b>9,924</b>	<b>9,924</b>	<b>8,044</b>	<b>8,1515</b>

*Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci Tahun, 2021.*

Dari hasil perhitungan diperoleh rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Kerinci cenderung tetap dari tahun 2016-2020, namun jika dilihat secara rata-rata rasio polisi pamong praja sebesar 10,97. Artinya dari 10 orang Polisi Pamong Praja melayani 10.000 penduduk Kabupaten Kerinci.

## **2. Rasio Linmas per 10.000 penduduk**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah linmas menggambarkan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menciptakan mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

**Tabel 2.16**  
**Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	265	234	234	192	204
2.	Jumlah Pos Siskamling	285	285	285	287	287
3.	Jumlah Linmas	570	570	570	570	570

*Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci, 2021.*



### 3. Rasio Siskamling

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan merupakan perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Rasio jumlah pos siskamling tahun 2016-2020 cenderung tetap.

**Tabel 2.17**  
**Rasio Jumlah Siskamling Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siskamling	285	285	285	287	287
2.	Jumlah Desa	285	285	285	287	287
3.	Rasio	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.17 **Error! Reference source not found.** disajikan data rasio jumlah siskamling di Kabupaten Kerinci dimana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah siskamling sebanyak 1 siskamling per satu desa di 18 Kecamatan di Kabupaten Kerinci.

Sejalan dengan upaya menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, karena itu perlu terus dikembangkan program peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Rasio jumlah linmas menggambarkan upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menciptakan mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.



Angka capaian SPM bidang TRANTIBUMLINMAS masih 0 persen. Untuk mencapai SPM urusan wajib pemerintah secara baik perlu melakukan sejumlah strategi ,antara lain:

1. Adanya ASN yang mengikuti bimtek SPM Urusan Trantibumlinmas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sumber daya aparatur yang membidangi penerapan SPM di lingkungan pemerintah kabupaten. Ini juga sebagai respons atas berbagai perubahan sistem dan aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang selalu dinamis.
2. Perlunya konsistensi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, peran aparatur juga dibutuhkan untuk memastikan semua rencana yang tersusun dapat terlaksana dengan baik.
3. Konsistensi terhadap dokumen perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi, kabupaten/kota, maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) terutama yang secara langsung berkaitan dan mendukung capaian SPM.

#### 6. Sosial

##### **a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan**

Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Berbagai permasalahan sosial yang terjadi antara lain: anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila, keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin.

Jumlah PMKS Kabupaten Kerinci dihitung dengan jumlah individu penyandang PMKS dan keluarga penyandang PMKS. Jumlah PMKS yang paling banyak yaitu: keluarga fakir miskin, korban bencana sosia, dan lanjut usia terlantar.

**Tabel 2.18**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten**  
**Kerinci Tahun 2019-2020**

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	1	
2.	Anak Terlantar		1
3.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan salah		1
4.	Anak Nakal		1
5.	Anak Jalanan		
6.	Anak Berhadapan dengan Hukum		
7.	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	22	26
8.	Anak dengan Kedisabilitasan		
9.	Wanita Rawan Sosial		
10.	Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah		
11.	Lanjut Usia Terlantar	256	256
12.	Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan		
13.	Penyandang Cacat	70	58
14.	Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit		
15.	Tuna Susila		
16.	Pengemis	6	6
17.	Gelandangan		
18.	Bekas Narapidana	55	70
19.	Korban Penyalanggunaan NAPZA	5	2
20.	Korban Tindak Kekerasan Dewasa Lanjut Usia		
21.	Pekerja Migran Bermasalah		
22.	Korban Bencana Alam	1	555
23.	Korban Bencana Sosial	332	1.552
24.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		
25.	Keluarga Fakir Miskin (KK)	12.290	10.585
26.	Keluarga Berumah Tak Layak Huni (KK)		
27.	Keluarga Bermasalah Psikologis (KK)		

Sumber : Dinas Sosial Tahun, 2021.

Jumlah PMKS Kabupaten Kerinci tahun 2020 sebesar 6.473 orang. Jumlah yang menerima bantuan yang diberikan dengan berbagai program Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 5 persen. Selanjutnya PMKS yang tertangani (mendapatkan pemberdayaan) relatif masih rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 6 persen dan tahun 2020 sebesar 5 persen.

**Tabel 2.19**  
**PMKS Memperoleh Bantuan dan yang Tertangani di Kabupaten**  
**Kerinci Tahun 2019-2020**

No	Jenis PSKS	2019	2020
<b>A.</b>	<b>PMKS Memperoleh Bantuan</b>		
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	407	313



2.	Jumlah PMKS yang harusnya menerima bantuan	6.458	6.473
<b>Persentase PMKS diberikan bantuan (%)</b>		6	5
<b>B. Penanganan PMKS</b>			
1.	Jumlah PMKS yang tertangani/ memperoleh pemberdayaan social	407	313
2.	Jumlah PMKS yang ada	6.458	6.473
<b>Persentase PMKS yang Ditangani (%)</b>		6	5

Sumber : Dinas Sosial Tahun, 2021.

#### b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS merupakan potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusia, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial.

Jumlah PSKS aktif Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 264 orang menjadi 269 orang pada tahun 2020.

**Tabel 2.20**  
**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di**  
**Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020**

No	Jenis PSKS	2019	2020
1.	Pekerja Sosial Masyarakat		
2.	Taruna Siaga Bencana	73	73
3.	Panti Sosial		
4.	Karang taruna	75	75
5.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga		
6.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	4	6
7.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat		
8.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16	18
9.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	30	30
10.	Pendamping PKH	63	64
11.	Pendamping Anak	2	2
12.	Koordinator Bansos RASRA	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>264</b>	<b>269</b>

Sumber : Dinas Sosial, 2021.

Bidang sosial mendapat skor 56,97 persen dalam capaian angka SPM yang tertera pada website <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. Angka di atas perlu ditingkatkan karena menjadi tolak ukur dalam penjaminan mutu dan pelayanan sosial pada masyarakat. Belum akuratnya data, proses



dokumentasi yang belum optimal dan masih minimnya data dalam proses penginputan laporan SPM pada aplikasi. Penerapan SPM dalam bidang sosial tahun 2023 tertuang dalam program pemberdayaan sosial meliputi Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Sedangkan program rehabilitasi sosial meliputi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.

### **2.3.1. Fokus Urusan Wajib yang**

#### **2.3.1.1. Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

###### **a . Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga.

**Tabel 2.21**

**Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Kerinci**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	Jumlah KDRT	3	3	4	10	10
2.	Jumlah Rumah Tangga (KK)	68.33	68.33	81.80	81.80	81.80
3.	Rasio KDRT	0,004	0,004	0,005	0,012	0,012

Sumber : Dinas PPKB dan PA, 2021

Berdasarkan data diatas secara garis besar rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kerinci selama tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, dari jumlah KDRT sebanyak 3-4

meningkat menjadi 10 KDRT. Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.

## **2. Pangan**

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam SDGs, yang di antaranya adalah tanpa kemiskinan (target nomor 1) dan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan (target nomor 2). Dalam pencapaian target tersebut, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas dan peran untuk melakukan koordinasi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah dan mutunya), aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Kawasan pertanian di Kabupaten Kerinci secara umum terbagi menjadi empat kelompok yakni kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Kabupaten Kerinci memiliki kawasan pertanian yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dengan aneka ragam potensi pertanian dan peternakan untuk kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.



Pada tahun 2020 luas tanam tanaman padi di Kabupaten Kerinci seluas 13.706,05 ha dengan dengan produksi 72.779 ton dengan produktivitas 53,10 kw/ha. Selain padi, tanaman pangan yang dominan ditanam di Kabupaten Kerinci adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kedele. Tanaman buah-buahan yang potensial di Kabupaten Kerinci dan banyak dibudidayakan adalah: Jeruk, Manggis, Durian, dan Alpokat. Sedangkan untuk tanaman sayur-sayuran didominasi oleh Kentang, Kol, Cabe, dan Tomat.

Data pada buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022, Kabupaten Kerinci menduduki peringkat 90 dari 416 Kabupaten di seluruh Indonesia dengan skor IKP 81,94 persen. Artinya Kabupaten Kerinci mempunyai produksi pangan yang cukup dibanding kebutuhan. Angka stunting yang masih dibawah target nasional menjadi faktor penyebab belum maksimalnya IKP Kabupaten Kerinci.

### **3. Lingkungan Hidup**

#### **1. Persentase Penanganan Sampah**

Penanganan sampah di Kabupaten Kerinci dilakukan untuk menangani sampah rumah tangga dan pasar kecamatan. Semua timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan pasar-pasar di kecamatan setiap harinya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang pada saat ini fungsi TPA di Kabupaten Kerinci dilakukan oleh Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sembulun Pantai di Kecamatan Batang Merangin karena Kabupaten Kerinci tidak memiliki TPA. Untuk kedepannya Kabupaten Kerinci mendorong pembangun TPA Regional dengan sistem Sanitary *Landfill* dan dilengkapi dengan fasilitas pencegahan pencemaran lingkungan di lokasi IPST Sembulun Pantai.

Saat ini timbulan sampah di wilayah permukiman terutama wilayah pedesaan belum semuanya terangkut. Sebagian masyarakat menangani sampah masih dengan cara membakar atau menimbun sampah di belakang rumah dengan cara membuat lubang di tanah.



Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara, tanah dan air tanah dan mengganggu kesehatan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pembinaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Timbulan sampah dihitung dengan jumlah penduduk dikalikan produksi perkapita (sebesar 300 gr/hari perkapita) dikalikan jumlah hari setahun. Penanganan sampah dihitung dari jumlah Truk Pengangkut sampah dikalikan jumlah pengangkutan (*trip*) dikalikan jumlah hari sebulan pengangkutan (25 hari) dikalikan jumlah bulan setahun (12 bulan).

Untuk menghindari terjadinya Timbulan Sampah di tempat umum, dilakukan dengan membangun TPS dan penanganan sampah oleh komunitas masyarakat. Pengelolaan sampah oleh komunitas menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) berbasis masyarakat yang mampu mengurangi timbulan dan volume yang harus diangkut ke IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu). Penanganan sampah yang dilakukan pada tahun 2014 sebesar 3600 ton dan meningkat menjadi 3960 ton di tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya volume Timbulan Sampah sebesar 0,38 persen per tahun dimana pada tahun 2014 volume Timbulan Sampah di Kabupaten Kerinci sebanyak 25.623 ton dan mengalami peningkatan sebanyak 26.038 ton di tahun 2018.

**Tabel 2.22**  
**Persentase Penanganan Sampah Di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume Sampah yg ditangani (ton)	201.610	216.325	220.428	224.531	228.634
2.	Volume Timbulan Sampah (ton)	353.703	360.542	367.381	374.220	381.059
	Penanganan Sampah (%)	57	58	59	60	61

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

## 2. Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung TPS dibagi jumlah penduduk kali 100%. TPS per satuan penduduk tahun 2014 sebesar 0,15 persen dan tahun 2018 0,20 persen. Rasio jumlah TPS terhadap jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 1:1.983 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 1 : 1.486.

**Tabel 2.23**  
**Rasio Tempat Penampungan Sampah per Satuan Penduduk Di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPS (unit)	140	150	156	168	181
2.	Daya Tampung TPS (m <sup>3</sup> )	400	400	420	420	452,5
3.	Jumlah Penduduk	236.802	240.361	244.920	249.479	254.038
	Rasio TPS terhadap jumlah penduduk	0,067	0.067	0.069	0.07	0.07

**Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.**

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya volume Timbulan Sampah baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah. Salah satu cara untuk melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah. Upaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan terbentuknya kelompok masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang sampai dengan Tahun 2018 sudah ada 3 (tiga) Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah di Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.24**  
**Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020**

No	Nama Kelompok	Alamat / Lokasi Kegiatan
1.	Bank Sampah Bumi Jaya	Desa Pelompek Kec. Gunung Tujuh
2.	Bank Sampah Jernih Jaya	Desa Jernih Jaya Kec. Gunung Tujuh



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

### 3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air berdasarkan pengukuran kualitas air sungai dan danau yang dilakukan di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran Senyawa Pencemar.

**Tabel 2.25**  
**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	67,14	67,14	68,75	65,78	68,80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

### 4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative Project*, yaitu "*Common Information to European Air*" (Citeair II) dengan Judul CAQI Air Quality Index : *Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012*. *Common Air Quality Index* (CAQI) ini digunakan melalui *www.airqualitynow.eu* sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian, dan tahunan.

**Tabel 2.26**  
**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
----	--------	------	------	------	------	------



1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,6	84,5	96,74	88,4	88,4
----	-----------------------------	------	------	-------	------	------

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

## 5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya.

**Tabel 2.27**  
**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	bml	85,32	85,32	95,12	95,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

## 6. Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan

Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULHD yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebesar 96,55 persen dan tahun 2020 mencapai 86,84 persen. Namun jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi masih terbatas. Pada tahun 2016 usaha/kegiatan yang diawasi 58 usaha. Tahun 2020 usaha/kegiatan yang diawasi 38 usaha yang memiliki izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULHD. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam

pendanaan, sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia.

**Tabel 2.28**  
**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULHD	58	50	40	38	38
2	Jumlah Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULHD	56	48	35	33	33
	<b>Cakupan Pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan (%)</b>	<b>96,55</b>	<b>96,00</b>	<b>87,50</b>	<b>86,84</b>	<b>86,84</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

**7. Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULHD yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten**

Penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan pada tahun 2016-2020 sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan semua kasus mengenai lingkungan sudah dapat ditindaklanjuti dengan baik.

**Tabel 2.29**  
**Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Lingkungan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Jumlah Pengaduan (kasus)</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>2</b>
2	<b>Jumlah yang ditindaklanjuti (kasus)</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>2</b>
	<b>Penegakkan Hukum Lingkungan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021.

**5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**



Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan suatu wujud pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci.

**Tabel 2.30**  
**Penataan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
Pelayanan Akta Kelahiran sebanyak	233.398	Lembar
Akta Perkawinan Non Muslim	113	Lembar
Akta kematian	708	Lembar
Pelayanan Kartu Keluarga KK	80.060	Kartu
Pelayanan e- KTP	177.842	Perekaman
Telah dicetak e- KTP	177.319	keping
Telah didistribusikan e- KTP	177.319	Keeping
Mutasi penduduk :		
- Pindah	1.326	Lembar
- Datang	1.764	Lembar

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kerinci, 2021.

## **6. Perhubungan**

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Kerinci terus membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis moda transportasi baik transportasi di perkotaan maupun diperdesaan dalam usaha mendorong lancarnya arus transportasi orang/barang/jasa yang lebih efektif dan efisien.

### **a. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**

KIR merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kerinci, pemerintah melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR.



**Tabel 2.31**  
**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	370	410	459	510	580	11,89

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, 2021.

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 yang memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni sebanyak 320 unit angkutan umum pada tahun 2016 meningkat menjadi 580 unit angkutan umum pada tahun 2020, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,89 persen/per tahun artinya S angkutan umum di Kabupaten Kerinci yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

**b. Lama Pengujian KIR**

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kabupaten Kerinci adalah 65 menit Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon, pengisian formulir, pengujian atau pemeriksaan selama, pengetokan plat dan pemberian tanda samping, dan pengesahan hasil uji.

**Tabel 2.32**  
**Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di**  
**Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	65	65	65	65	65

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, 2021.

## 7. Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kerinci memiliki website yang dapat diakses melalui <https://kerincikab.go.id/>. Website tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Selain itu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (*running text*).

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Website Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Website	2	2	2	3	5	7

Sumber : Kominfo, 2021

## 8. Penanaman Modal

### a. Jumlah Investor

Investasi mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan karena menggambarkan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik.

Pada dasarnya kegiatan investasi dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) menggunakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modalnya.

Jumlah investasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah investasi di Kabupaten

Kerinci sebanyak 8 investor naik menjadi 42 investor pada tahun 2020.

**Tabel 2.34**  
**Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci**  
**(PMDN/PMA) Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit Usaha					
a. PMDN	8	9	11	40	42
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>42</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

**b. Nilai Investasi Berskala Nasional**

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Kerinci tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

**Tabel 2.35**  
**Jumlah Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Kerinci**  
**(PMDN/PMA) Tahun 2016-2020**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah (Proyek)	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah (Proyek)	Nilai Investasi (Rp)
2016	8	11.735.767.700.000	8	1.796.232.728.260
2017	9	12.143.427.800.000	9	2.300.123.150.260
2018	11	12.143.427.800.000	11	2.300.123.150.260
2019	40	12.484.424.300.000	40	2.364.685.037.947
2020	42	12.499.027.900.000	42	1.236.234.661.120

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

Nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Kerinci menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor adalah sebesar 1,7 Triliun, sedangkan pada tahun 2017-2018, nilai investasi yang ditambahkan adalah sebesar 503 Miliar Rupiah dan bertambah pada tahun 2019 sebanyak 64 Miliar Rupiah. Dengan



peningkatan jumlah investasi PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan. Lain halnya dengan tahun 2020, penurunan nilai investasi sangat signifikan dari 2,3 triliun menjadi 1,2 Triliun. Menteri Ketenagakerjaan, memaparkan bahwa salah satu target industri yang paling merasakan dampak dari COVID-19 adalah sektor pariwisata hal ini sejalan dengan dampak penurunan investasi untuk Kabupaten Kerinci pada sektor pariwisata yang berkaitan juga dengan sektor industri dan perdagangan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah, Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

#### **15. Perpustakaan dan Kearsipan**

Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Tetapi, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan/atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, mikrofiche, tape audio, CD, LP, dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-ROM dan internet.

Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

**Tabel 2.35**  
**Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda)	Unit	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri	Unit	284	284	284	284	284	284
3.	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda (Sekolah Swasta)	Unit	0	1	4	8	8	9
4.	Jumlah Perpustakaan Milik OPD	Unit	39	39	39	39	42	44
5.	<b>Total Jumlah Perpustakaan</b>	<b>Unit</b>	<b>285</b>	<b>286</b>	<b>289</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>294</b>

Sumber : Bagian Perpustakaan Kabupaten Kerinci Tahun, 2021.

Perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.36**  
**Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Unit	95	95	7.501	7.501	7.501
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Unit	8.989	8.989	14.051	14.051	14.051

Sumber : Bagian Perpustakaan Kabupaten Kerinci, 2021.

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Pertanian

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten sentra pertanian di Provinsi Jambi. Untuk sektor tanaman pangan di Kabupaten Kerinci adalah komoditi padi, pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Kerinci sebesar 98.689 ton dengan produktivitas 53.10 kw/ha yang ditanam pada lahan seluas 19.314 ha dan luas panen seluas 18.598 Ha.

**Tabel 2.37**  
**Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2020**

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kw/Ha)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Padi	19.314	19.314	18.598	18.598	98.689	98.689	53.10	53.10
2.	Jagung	1.670	1.670	1642	1642	13.768	13.768	88,85	88,85
3.	Kacang Tanah	328	328	328	328	519	519	15,82	15,82
4.	Ubi Kayu	256	256	235	235	7.508	7.508	319,50	319,50
5.	Ubi Jalar	860	860	787	787	33.729	33.729	428,58	428,58
6.	Kedele	127	127	690	690	845	845	12,25	12,25

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021.

#### 4. Peternakan

Peternakan yang berkembang dan dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Kerinci meliputi ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Ternak besar meliputi ternak Sapi, Kerbau, dan Kuda. Ternak kecil meliputi ternak Kambing dan Domba. Ternak unggas meliputi: ternak Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, dan Itik.

Populasi ternak besar di Kabupaten Kerinci cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2016 populasi ternak besar sebesar 13.159 ekor sedangkan pada tahun 2020 populasi sebesar 17.853 ekor. Populasi terbesar dari ternak besar di Kabupaten Kerinci adalah Sapi dimana pada tahun 2016 populasi Sapi di Kabupaten Kerinci sebesar 13.039 ekor mengalami penurunan populasi pada tahun 2020 sebesar 12.784 ekor. Populasi ternak besar yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 18.277 ekor atau dengan kenaikan sebesar 230 ekor persen dari tahun 2017.



**Tabel 2.38**  
**Populasi Ternak Besar di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020 (Ekor)**

No	Jenis Ternak	Populasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi	13.039	13.034	13.244	13.018	12.784
2.	Kerbau	4.949	4.902	4.930	4.952	4.967
3.	Kuda	120	111	103	102	102
	Jumlah	<b>13.159</b>	<b>18.047</b>	<b>18.277</b>	<b>18.072</b>	<b>17.853</b>

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Kerinci sangat berfluktuatif dengan kecenderunagn menurun. Pada tahun 2016 populasi ternak kecil sebesar 21.724 ekor namun pada tahun 2020 populasi ternak kecil mengalami penurunan dengan tingkat populai sebesar 15.276 ekor. Populasi terbesar dari ternak kecil di Kabupaten Kerinci adalah Kambing dimana pada tahun 2020 populasi Kambing di Kabupaten Kerinci sebesar 13.928 ekor, jika dibandingkan dengan tahun 2016 populasi Kambing mengalami penurunan sebesar 7.796 ekor.

**Tabel 2.39**  
**Populasi Ternak Kecil Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**  
**(Ekor)**

No	Jenis Ternak	Populasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kambing	21.724	15.152	13.522	13.906	13.928
2.	Domba	3.524	1.223	1.042	1.216	1.348
	Jumlah	21.724	16.375	14.564	15.122	15.276

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

Populasi unggas di Kabupaten Kerinci berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2016 populasi ternak unggas sebesar 1.151.629 ekor, mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 1.937.748 ekor. Populasi terbesar dari ternak unggas di Kabupaten Kerinci adalah ayam pedaging dengan populasi pada Tahun 2016 sebesar 348.070 ekor meningkat menjadi 1.267.129 ekor di Tahun 2020.

**Tabel 2.40**  
**Populasi Ternak Unggas Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020 (Ekor)**

No	Jenis Ternak	Populasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ayam Buras	252.010	256.225	256.369	256.135	257.246
2.	Ayam Pedaging	348.070	348.070	348.850	1.352.150	1.267.129
3.	Ayam Petelur	63.318	66.090	67.501	131.180	139.724
4.	Itik	488.231	357.306	277.718	272.895	273.649
	<b>Jumlah</b>	<b>1.151.629</b>	<b>1.027.691</b>	<b>950.438</b>	<b>2.012.360</b>	<b>1.937.748</b>

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

Produksi daging ternak di Kabupaten Kerinci cenderung menurun. Pada tahun 2016 produksi daging sebesar 2.368.936 kg turun menjadi 695.406 kg pada tahun 2020.

**Tabel 2.41**  
**Produksi Daging Ternak Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020 (kg)**

No	Jenis Ternak	Produksi Daging				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi	281.195	300.190	237.443	321.521	335.534
2.	Kerbau	21.069	54.812	27.160	56.952	60.244
3.	Kuda	882	-	-	0	0
4.	Kambing	179.956	179.956	48.135	51.690	50.130
5.	Domba	44.620	15.549	468	220	253
6.	Ayam Kampung	757.670	87.600	80.072	88.972	73.000
7.	Ayam Potong	599.106	599.106	510.271	561.732	230.450
8.	Ayam Petelur	72.646	9.960	10.486	135.409	144.229
9.	Itik	411.792	39.150	36.120	31.947	32.016
	<b>Jumlah</b>	<b>2.368.936</b>	<b>1.286.323</b>	<b>950.155</b>	<b>686.711</b>	<b>695.406</b>

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

Produksi telur di Kabupaten Kerinci selama periode 2016-2020 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 produksi telur sebesar 3.132.506,00 kg menjadi 1.547.639 kg pada tahun 2020. Untuk produksi telur terbesar



dihasilkan oleh ternak unggas Itik yaitu sebanyak 1.547.639 kg di tahun 2020.

**Tabel 2.42**  
**Produksi Telur di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (kg)**

No	Jenis Ternak	Produksi Telur				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buras	121.368,00	123.398	123.467,44	123.354	123.890
2.	Ras	478.684,00	499.640	510.307,32	4.069	4.334
3.	Itik	2.532.454,00	1.851.953	1.439.439,70	1.415.509	1.419.415
	Jumlah	3.132.506,00	2.474.991,09	2.073.214,46	1.542.932	1.547.639

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2021.

### 3. Perikanan

Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya selama periode Tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kedenderungan meningkat. Produksi perikanan pada Tahun 2016 adalah sebesar 3.330,50 ton meningkat menjadi 4.226,05 ton pada Tahun 2020.

**Tabel 2.43**  
**Produksi Perikanan Perairan Umum dan Budidaya di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Produksi (Ton)		Jumlah
		Perairan Umum	Budidaya	
1.	2016	1.009,00	3.330,50	4.340,00
2.	2017	2.000,00	4.000,00	6.000,00
3.	2018	3.000,00	5.000,00	8.000,00
4.	2019	1.999,15	4.312,85	6.312,00
5.	2020	1.981,23	4.226,05	6.207,28

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021.

Total produksi Ikan selama periode 2016-2020 sangat berfluktuatif. Pada Tahun 2016 produksi ikan adalah sebesar 101.047,70 ton menurun menjadi 5.869,25 ton Tahun 2020.



**Tabel 2.44**  
**Produksi Ikan Menurut Jenis Ikan (Ton) di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020**

Jenis Ikan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata
Nila	3.268,95	859,00	3.500,00	5.332,00	4.329,65	3.457,92
Mas	275,71	1.685,00	1.853,50	341,00	1.075,80	1.046,20
Semah	19,00	115.000,00	126,50	80,00	NA	-
Barau	142,00	406,00	446,60	282,00	199,80	295,28
Medik	241,00	371,00	408,10	225,00	220,86	293,19
Lainnya	97.101,00	564,00	620,40	28,35	43,14	19.671,38
<b>Jumlah</b>	<b>101.047,70</b>	<b>118.885,00</b>	<b>6.955,10</b>	<b>6.288,35</b>	<b>5.869,25</b>	<b>47.809,08</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan , 2021.

#### 4. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kerinci merupakan sektor yang memiliki potensi yang begitu banyak, namun sampai saat ini potensi bahan tambang dan mineral belum begitu dikembangkan. Beberapa potensi bahan tambang dan mineral masih perlu dilakukan penelitian kandungan deposit dan mutunya.

**Tabel 2.45**  
**Potensi Pertambangan Di Kabupaten Kerinci**

Bahan Galian	Jumlah	Lokasi
Granit	604 juta ton	Siulak Deras, Batu Hampar Lempur Tengah
Marmer	389 juta ton	Muara Imat, Tebing Tinggi
Obsidian	497	Bukit Cermin
Batu Gamping	680 juta ton	Siulak Deras, Koto Baru Hiang, Gua Kasah
Emas	-	Siulak Tenang, Kec. Kayu Aro Kec. Siulak
Batu Bara	-	Pungut
Tembaga	-	Siulak Tenang, Kec. Kayu Aro Kec. Siulak

Sumber : Laporan Perekonomian Kab. Kerinci, 2021.

Data pada tabel menunjukkan, bahwa Kabupaten Kerinci memiliki kekayaan pertambangan yang belum diolah, masih menjadi kekayaan yang terpendam. Kegiatan pertambangan yang banyak dikelola di Kabupaten Kerinci dalam bentuk Galian C berupa Pasir, Koral, dan hasil olahan lainnya.

## 5. Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

### a. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pedagang/usaha informal mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal. Formulasi pengukuran mencakup jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan penda pada tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang/usaha informal dikali 100%.

**Tabel 2.46**  
**Cakupan bina kelompok Pedagang / Usaha Informal di**  
**Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	66,67	100	83,33	83,33	83,33



2	Jumlah Kelompok	4	6	5	5	5
---	-----------------	---	---	---	---	---

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci, 2021.

Adapun capaian kinerja indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Kerinci sebesar 4 kelompok pedagang. Pada tahun 2017 cakupan bina kelompok pedagang di Kabupaten Kerinci sebesar 6 kelompok pedagang. Pada tahun 2018-2019 sebanyak 5 kelompok dengan persentase antara 67-100 persen.

## 6. Perindustrian

### a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pedagang/usaha informal mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal. Industri di Kabupaten Kerinci banyak bergerak dibidang pengolahan dan perdagangan hasil bumi meliputi: Industri teh, industri makanan olahan (dodol kentang, keripik kentang, aneka camilan, industri minuman olahan (Teh Kulit Kayu Manis/Teh Kayu Manis, Minuman Herbal dari rempahan), industri pemotongan & pengolahan kayu, dan industri pengolahan daging ayam kampung. Formulasi pengukuran diperoleh jumlah kelompok perajin yang mendapat bantuan binaan penda pada tahun n dibagi jumlah kelompok perajin dikali 100%.

**Tabel 2.47**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45,45	45,45	48,48	48,48	48,48
2	Jumlah Kelompok	15	15	16	16	16

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci, 2021.



Cakupan binaan kelompok pengrajin mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kelompok pengrajin tersebut terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang industri. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok pengrajin yang sudah ada, diharapkan dapat terus berkembang secara mandiri meskipun bantuan dari pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh kelompok pengrajin. Selain itu, pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutama bagi yang tergabung dalam kelompok tersebut.

#### **2.4. Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

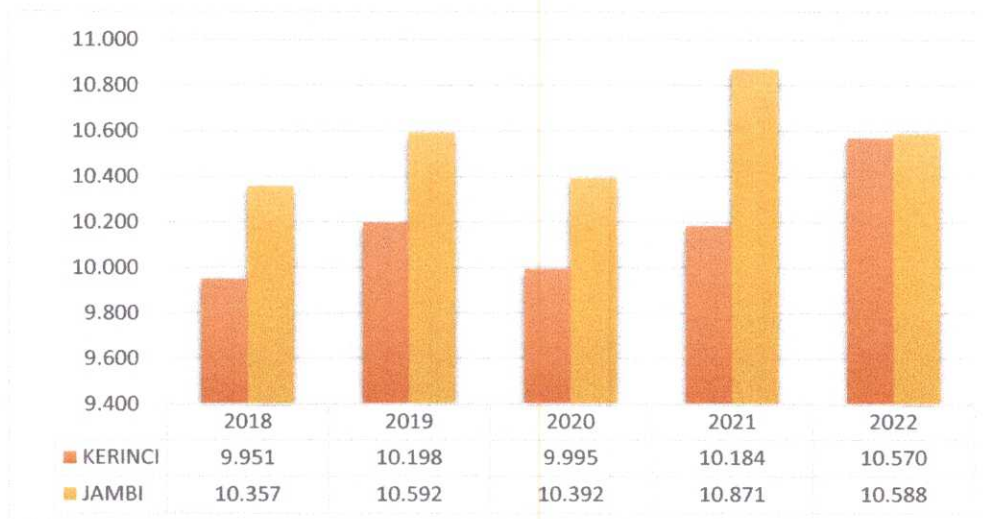
#### **2.3.3. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah.

##### **1. Pengeluaran Per-Kapita**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Gambar 2.16**  
**Pengeluaran perkapita pertahun di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2018-2022**



*Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2018-2022*

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

## **2. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

## **3. Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan Perkapita**

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp.390.086. Kelompok makanan padi-padian merupakan pengeluaran terbesar dari tahun 2016-2018.

**Tabel 2.48**  
**Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

NO	Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1.	Padi-padian/ <i>Cereals</i>	87.686	82.221	60.325	63.615	61.243
2.	Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	8.421	7.777	8.157	8.557	8.290
3.	Ikan/ <i>Fish</i>	41.720	42.056	35.453	37.225	38.124
4.	Daging/ <i>Meat</i>	15.147	14.434	8.229	8.518	8.749
5.	Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	17.051	15.549	11.521	14.389	13.332
6.	Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	52.350	25.821	35.186	43.920	42.453
7.	Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	5.949	5.570	5.066	5.239	5.097
8.	Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	15.696	16.934	11.655	12.789	11.600
9.	Minyak dan lemak/ <i>Oil and fats</i>	17.660	20.435	17.140	17.560	16.332
10.	Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	12.713	11.353	7.467	7.467	6.986
11.	Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	2.508	2.920	2.803	2.967	2.705
12.	Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	5.198	4.002	3.298	3.459	3.101
13.	Makanan dan minuman jadi <i>Prepared food</i>	88.749	75.917	89.101	90.562	89.744
14.	Tembakau dan sirih/ <i>Tobacco and betel</i>	83.606	65.097	43.761	42.588	41.602
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>390.086</b>	<b>454.454</b>	<b>339.164</b>	<b>295.240</b>	<b>288.115</b>

Sumber : (BPS) Kerinci Dalam Angka 2016-2020

#### 4. Pengeluaran Menurut Kelompok Bukan Makanan Perkapita

Rata-rata pengeluaran kelompok bukan makanan, di Kabupaten Kerinci selama periode tahun 2016-2020 adalah Rp. 364.284. Kelompok Perumahan, bahan bakar, penerangan dan air merupakan menjadi pengeluaran terbesar dengan angka pengeluaran per tahun sebesar Rp. 184.344. Kelompok pengeluaran terkecil adalah untuk kelompok Keperluan Pesta dan Upacara dengan rata-rata sebesar Rp. 13.049,00 per tahun.



**Tabel 2.49**  
**Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

No	Bukan makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	177.616	170.568	170.568	177.322	184.344
2	Aneka barang dan jasa	79.142	71.230	71.230	74.051	76.983
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	49.441	52.223	52.223	54.291	56.441
4	Barang yang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	25.418	40.093	40.093	41.681	43.331
5	Pajak pemakaian dan premi asuransi	15.243	18.908	18.908	19.657	20.435
6	Keperluan pesta dan upacara	9.264	15.031	15.031	15.626	16.245
<b>Jumlah</b>		<b>316.917</b>	<b>356.124</b>	<b>368.053</b>	<b>382.628</b>	<b>397.700</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, Tahun 2016-2020

### 2.3.4. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan nonbank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran, dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

#### 1. Transportasi

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat dan kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus

disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

**Tabel 2.50**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016- 2020**

No	Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Roda Dua	25.470	31.982	38.378	40.681	43.122
2	Roda Empat	4.389	7.949	11.526	12.218	12.951
<b>Jumlah Kendaraan</b>		<b>3.101</b>	<b>29.859</b>	<b>39.931</b>	<b>42.327</b>	<b>44.866</b>
1	Panjang Jalan	933,12	933,12	933,12	989	1.048
<b>Rasio</b>		<b>0,30</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

*Sumber: BPS, Jambi Dalam Angka Tahun 2016-2020*

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 mencapai 1: 0,30 ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 30 kendaraan sedangkan pada tahun 2020 diproyeksikan mencapai 1: 0,02 yang artinya 1 km hanya dapat diakses 2 kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci semakin padat dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **A. Transportasi Umum**

Ketersediaan jumlah angkutan umum guna memenuhi mobilitas orang dan barang. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2014-2018 cenderung menurun, dimana pada tahun 2014 berjumlah 60.678 dan pada tahun 2018 diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 44.579. Hal ini seiring dengan menurunnya jumlah kendaraan umum, dimana jumlah kendaraan umum di Kabupaten Kerinci pada tahun 2014 sebanyak 590 unit dan turun menjadi 400 unit pada tahun 2018. Hal ini



disebabkan oleh banyaknya masyarakat beralihdari penggunaan alat transportasi angkutan umum menjadi angkutan pribadi, terutama Sepeda Motor.

**Tabel 2.51**  
**Rincian dan Rata-rata Penumpang Angkutan Umum di**  
**Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	62.579	59.439	44.579	45.916	47.924
2	Jumlah Uji Kir Kendaraan bermotor	1.056	1.183	1.301	1.340	1.380
3	Jumlah Angkutan Umum	472	410	400	412	424
4	Jumlah Terminal Bis	-	-	-	-	-
5	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1

Sumber: BPS, Jambi Dalam Angka Tahun 2016-2020

#### **B. Penataan Ruang Wilayah**

Penataan wilayah merupakan salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012- 2032, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kabupaten Kerinci memiliki Kawasan Lindung terbesar dan sekaligus juga merupakan kawasan rawan bencana dimana lebih kurang 58,30 persen wilayah Kabupaten Kerinci adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga konsekuensinya daya tampung wilayah menjadi terbatas untuk dijadikan kawasan budidaya. Untuk itu, pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci diupayakan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan melalui intensifikasi lahan. Selain itu orientasi aktivitas



ekonomi masyarakat perlu didorong kearah kegiatan jasa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan dengan tetap mengandalkan komoditas unggulan wilayahnya.

Karakteristik wilayah Kabupaten Kerinci secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kawasan utama, yaitu kawasan pegunungan disekitar Gunung Kerinci dan merupakan kawasan yang lebih tinggi tingkat perkembangannya dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Kerinci lainnya. Kawasan kedua yaitu kawasan perairan darat yang terletak dibagian Timur Kabupaten Kerinci dengan orientasinya adalah Danau Kerinci dimana kawasan ini perkembangannya masih sangat lambat. Kawasan ketiga yaitu kawasan dibagian tengah Kabupaten Kerinci yang merupakan kawasan padat penduduk dan berkembang cukup pesat.

**Tabel 2.52**  
**Rencana Pola Ruang Di Kabupaten Kerinci**

<b>KAWASAN LINDUNG</b>		<b>(Ha)</b>	<b>(%)</b>
<b>I</b>	<b>Kawasan Lindung Setempat</b>		
1	Kawasan Sempadan Sungai	1.920	0,97
2	Kawasan Sempadan Danau	1.129	0,57
3	Kawasan Sempadan Mata Air	-	
<b>II</b>	<b>Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya</b>		
1	Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	194.216	98,23
<b>III</b>	<b>Ruang Terbuka Hijau</b>		
1	RTH Publik	331	0,16
2	RTH Private	173	0,08
<b>TOTAL (ha)</b>		<b>197.769</b>	<b>100</b>
<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>		<b>(Ha)</b>	<b>(%)</b>
<b>I</b>	<b>Kawasan Hutan Produksi</b>		
1	Kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	8.322	8,84
2	Kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M)	17.344	16,74
<b>II</b>	<b>Kawasan Hutan Rakyat</b>	1.202	0,25
<b>III</b>	<b>Kawasan Pertanian Tanaman Pangan</b>		
1	Kawasan Pertanian Lahan Basah	13.514	7,40
2	Kawasan Pertanian Lahan Kering	25.391	18,95
<b>IV</b>	<b>KAWASAN HOLTIKULTURA</b>	<b>21.902</b>	<b>17,53</b>
<b>V</b>	<b>KAWASAN PERKEBUNAN</b>	<b>39.589</b>	<b>28,37</b>
<b>VI</b>	<b>KAWASAN PERIKANAN</b>	<b>4.611</b>	<b>0,16</b>
<b>VI</b>	<b>KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.672</b>	<b>1,75</b>
<b>I</b>			
<b>TOTAL (ha)</b>		<b>134.547</b>	<b>100</b>

### C. Fasilitas Bank

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

**Tabel 2.53**  
**Jumlah Bank Umum per Kecamatan Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020**

No	Kecamatan	Bank	Jml Penduduk
1	Gunung Raya	1	7.970
2	Bukit Kerman	-	11.526
3	Batang Merangin	1	11.491
4	Keliling Danau	1	22.161
5	Danau Kerinci	-	15.862
6	Sitinjau Laut	1	14.180
7	Air Hangat	1	11.168
8	Air Hangat Timur	-	17.847
9	Depati VII	-	14.910
10	Air Hangat Barat	-	8.467
11	Gunung Kerinci	1	12.005
12	Siulak	4	20.518
13	Siulak Mukai	-	11.282
14	Kayu Aro	3	20.718
15	Gunung Tujuh	1	15.328
16	Kayu Aro Barat	2	20.369
<b>Kabupaten Kerinci</b>		<b>16</b>	<b>235.802</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kerinci, 2021.

Bank umum yang beroperasi di Kabupaten Kerinci belum tersedia layanan pada setiap Kecamatan. Hal yang menjadi catatan dari tabel diatas adalah tidak semua kecamatan sudah mendapatkan layanan keuangan dari bank umum.

### D. Perusahaan

Perusahaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di



suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas risiko bisnis/ usaha.

**Tabel 2.54**  
**Jumlah Perusahaan Yang Berbadan Hukum Di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit)**

Tipe Badan Hukum	2020
Perseroan terbatas	22
CV/Firma	80
Koperasi	9
Perseorangan	195
Lainnya	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>306</b>

Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan **Error! Reference source not found.** diatas diketahui jumlah perusahaan yang berbadan hukum di Kabupaten Kerinci pada tahun 2016 sebanyak 306 perusahaan yang terdiri dari Perseroan Terbatas sebanyak 22 perusahaan, CV/Firma sebanyak 80 perusahaan, Koperasi sebanyak 9 unit, dan Perseorangan sebanyak 195 perusahaan.

#### **E. Fasilitas Rumah Makan dan Restoran**

Ketersediaan Rumah Makan dan Restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya Rumah Makan dan Restoran menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

**Tabel 2.55**  
**Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Unit)**

Uraian	2016	2107	2018	2019	2020
Rumah Makan	81	-	-	-	-
Restoran	-	-	-	-	-

Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020

Jumlah Rumah Makan dari tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 46 unit menjadi 81 unit. Dalam menangkap trend



wisata *back to nature* dan *special interest* didorong perkembangan wisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam, seni budaya, dan kehidupan pedesaan.

#### F. Fasilitas Penginapan/Hotel

Ketersediaan Penginapan/Hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembang investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan Wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan Penginapan/Hotel. Pada tahun 2018 di Kabupaten Kerinci tercatat 2 sarana Hotel dan 7 unit Pondok Wisata. Secara rinci dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**

**Tabel 2.56**  
**Jumlah Hotel/Penginapan/Pondok Wisata di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2021**

No	Nama Akomodasi	Jenis	Kelas	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Alamat
1	B.Darmin Homestay	Pondok Wisata	1	6	14	Dusun 2 Kersik Tuo RT 06
2	Family Homestay	Pondok Wisata	1	8	17	RT 03 No.116 Lindung Jaya Kayu Aro
3	Paiman Homestay	Pondok Wisata	2	10	13	Jl. Raya Ma. Labuh Sungai Penuh RT 02
4	Subandi Homestay	Pondok Wisata	1	5	18	Jl. Raya Ma. Labuh Sungai Penuh RT 03
5	Timan B Homestay	Pondok Wisata	1	6	12	Mekar Jaya RT 05
6	Indah Wisma	Pondok Wisata	1	5	8	Batang Sangir Kayu Aro
7	Serambi Madinah	Hotel Melati	2	15	15	Sungai Medang
8	Mess Pemda	Pondok Wisata	2	5	13	Tanjung Bungo Kayu Aro
9	Hotel Zahza	Hotel				Sungai Sikai Gn. 7

Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2021

## G. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih (*clean water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sedangkan air minum (*drinking water*) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih terdiri dari: 1) Air Hujan; 2) Air Sungai dan Danau; 3) Mata Air; 4) Air Sumur Dangkal; dan 6) Air Sumur Dalam.

Produksi Air Bersih di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah distribusi Air bersih pertahun, peningkatan produksi dan distribusi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan pada akhirnya terjadi peningkatan jumlah pelanggan pengguna Air Bersih.

**Tabel 2.57**  
**Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

Uraian	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kapasitas Produksi Per Detik (Liter)	456	526	526	526	526
Produksi Air Pertahun (M <sup>3</sup> )	10.629.447	11.120.600	11.120.600	11.120.600	11.120.600
Distribusi Air Pertahun (M <sup>3</sup> )	10.072.378	10.534.632	10.534.632	10.534.632	10.534.632
Hydran Air (Unit)	52	6	6	6	6

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, 2021.

## H. Fasilitas Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Sebagian besar kebutuhan energi listrik untuk saat ini masih dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah Pelanggan Listrik meningkat dari 59.215 pelanggan pada tahun 2016 menjadi 67.922 pelanggan pada tahun 2020.

Adapun jumlah daya terpasang juga akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Pelanggan. Rasio ketersediaan



daya listrik tiap Pelanggan cenderung menurun yaitu dari 910,31 kWh tahun 2016 menjadi 985,35 kWh pada tahun 2020.

**Tabel 2.58**  
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Pelanggan	Daya Terpasang (kWh)	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (kWh)
2016	59.215	53.904.179	910,31
2017	62.176	54.982.263	928,52
2018	65.285	56.081.908	947,09
2019	66.590	57.203.355	966,03
2020	67.922	58.347.622	985,35

Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2016-2020 \*) Data Proyeksi

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Adanya tenaga listrik yang terpasang pada suatu daerah atau wilayah, maka dapat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi. Pembangkit Listrik Negara (PLN) telah meluaskan jaringan dan pelayanannya sampai ke desa-desa, yang diharapkan pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik dapat digunakan sebagai suatu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik, berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Setiap rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik belum tentu sebagai pelanggan listrik karena masih ada beberapa rumah tangga yang menggunakan listrik atas nama satu pelanggan. Kondisi seperti ini terjadi terutama di desa-desa terpencil karena jarak jaringan listrik dengan rumah penduduk terlalu jauh, sehingga satu unit meteran listrik dipakai oleh beberapa rumah.



**Tabel 2.59**  
**Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik Di**  
**Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Listrik PLN (%)	88,85	90,11	95,83	99,36	95,22

*Sumber : BPS Provinsi Jambi*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada umumnya rumah tangga sudah menggunakan listrik baik PLN maupun Non PLN sebagai sumber penerangan utama. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus meningkat pada tahun 2018 mencapai 88,85 persen meningkat menjadi 99,36 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 menurun menjadi 95,22 persen. Artinya masih terdapat sebesar 4, 78 persen rumah tangga yang menggunakan Non PLN sebagai sumber penerangan. Data menunjukkan tahun 2022 sebanyak 1,69 rumah tangga menggunakan penerangan non PLN dan 3,10 persen rumah tangga menggunakan penerangan bukan listrik.

### **2.3.5. Iklim Berinvestasi**

#### **A. Kemudahan Perizinan**

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

**Tabel 2.60**  
**Jenis Perizinan dan Lama Proses Perizinan Di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2020**

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)
1	SITU	90
2	SIUP	90
3	TDP	90
4	TDG	90
5	STDI	90
6	SIUI	90
7	DEPOT ISI ULANG	90
8	HULLER-PENYONGSONG BERAS	90
9	IUKS	90
10	IUKU	90
11	AMDAL	90
12	HO	90
13	IMB	90
14	SIUJK	90
15	HOME STAY	90
16	RESTORAN	90
17	PUSAT SENI DAN HIBURAN	90
18	PANGGUNG TERBUKA	90
19	TAMAN REKREASI	90
20	PENTAS PERTUNJUKAN SATWA	90
21	DUNIA FANTASI	90
22	PADANG GOLF	90
23	KOLAM PANCING	90
24	GELANGGANG RENANG	90
25	GELANGGANG PERMAINAN KECUALI VIDEO	90
26	GELANGGANG BOWLING	90
27	GELANGGANG BILLIARD	90
28	SALON KECANTIKAN	90
29	PANTI MANDI UAP	90
30	IZIN KARAOKE	90
31	IZIN BIOSKOP	90
32	FITNES CENTER	90
33	PEMASANGAN REKLAME	90
34	PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI	90
35	SOP PELAYANAN IZIN MENARA	90
36	WARUNG INTERNET	90
37	IZIN PENDIRIAN ANGKUTAN UMUM	90
38	IZIN TRAYEK	90
39	USAHA ANGKUTAN BARANG, PENUMPANG	90



40	KARTU PENGAWAS MENGANGKUT PENUMPANG	90
41	PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR	90
42	IZIN PENDIRIAN CUCIAN KENDARAAN BERMOTOR	90
43	PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA SETARA RUMAH SAKIT KELAS C DAN D	90
44	POLIKLINIK, KLINIK SWASTA DAN KLINIK BERSAMA	90
45	KLINIK BERSALIN, RUMAH BERSALIN	90
46	LABORATORIUM KESEHATAN	90
47	PRAKTER DOKTER GIGIe	90
48	PRAKTER DOKTER SPESIALIS	90
49	PRAKTER APOTEKER	90
50	PRAKTER AHLI GIGI	90
51	PRAKTER KEPERAWATAN	90
52	PRAKTEK BIDAN	90
53	IZIN APOTIK	90
54	SURAT IZIN OPTIKAL	90
55	SURAT IZIN TOKO OBAT	90
56	PRAKTEK FISIOTERAPI	90
57	OKUPASI TERAPI	90
58	RADIOLOGI	90
59	PENGOBATAN TRADISIONAL	90
60	PRAKTEK TUKANG GIGI	90
61	IZIN PENELITIAN	90
62	PAUD	90
63	BALAI LATIHAN KERJA	90
64	KURSUS	90
65	USAHA PETERNAKAN	90
66	PERKEBUNAN BUDIDAYA	90
67	PERKEBUNAN PENGOLAHAN	90

Sumber : Dinas Penanaman Modal ,PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2021

## **B. Pengenaan Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan



oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

**Tabel 2.61**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**

Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>39.494.502.703</b>	<b>85.760.743.969</b>	<b>80.481.173.933</b>	<b>157.920.004.804</b>	<b>81.665.603.731</b>
Pendapatan Pajak Daerah	11.005.025.803	12.070.757.135	13.559.599.616	85.903.587.127	11.719.259.396
Hasil Retribusi Daerah	3.258.488.022	3.264.337.400	2.879.364.300	2.815.332.900	2.972.321.100
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.687.090.363	8.066.340.479	8.295.781.214	8.779.012.971	8.962.116.224
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.543.898.514	62.359.308.955	55.746.428.803	60.422.071.806	58.011.907.011

Sumber : BPKAD Tahun 2021

### **2.3.6.Sumber Daya Manusia**

#### **A. Kualitas Tenaga Kerja**

Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut mutu sumber daya manusia, baik kemampuan fisik maupun non fisik. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan berketerampilan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik tersebut maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Jumlah ASN yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari tahun 2016-2020 berjumlah sebesar 130 orang dimana pada tahun 2016 sebesar 35 orang, tahun 2017 sebanyak 41, tahun 2018 sebanyak 63, tahun 2019 sebanyak 55 orang, dan tahun 2020 sebanyak 130 orang.

**Tabel 2.62**  
**Jumlah ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar Di Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2016-2020**

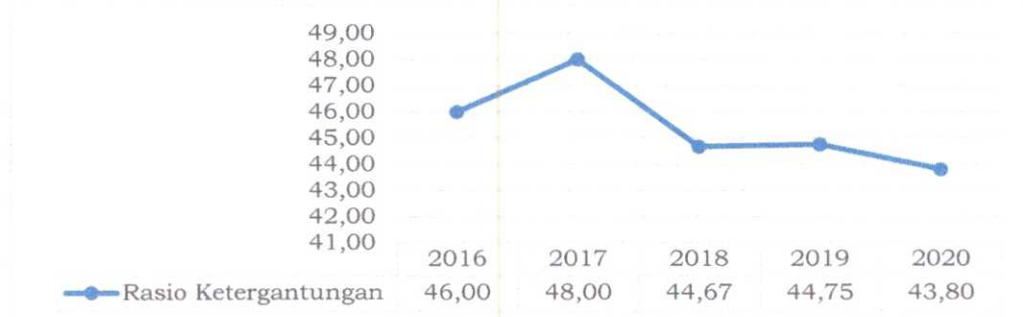
No	Uraian	Sumber Dana	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1.	Profesi	Dana Pusat	2	0	2	0	0	Tugas Belajar
2.	S1	Dana Pusat	1	0	1	0	0	Tugas Belajar
3.	S2	Dana Pusat	0	4	0	4	4	Tugas Belajar
4.	S3	Dana Pusat	-	-	-	-	-	Tugas Belajar
5.	S2	Dana Daerah	1	1	1	1	1	Tugas Belajar
6.	Profesi	-	-	-	-	-	1	Izin Belajar
7.	DIII/DIV	-	-	-	19	32	6	Izin Belajar
8.	S1	-	21	32	37	20	81	Izin Belajar
9.	S2	-	10	4	7	3	51	Izin Belajar
<b>Total</b>			<b>35</b>	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>130</b>	

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Kerinci Tahun 2021

### B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Gambar 2.17**  
**Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2020**



Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Diolah)

**Gambar 3.12**  
**Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2023**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2023 (diolah)

Belanja transfer Kabupaten Kerinci Sepanjang periode tahun 2019-2023, belanja transfer Kabupaten Kerinci kecenderungan meningkat yaitu dari Rp. 297,22 Milyar pada tahun 2019 meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 302,71 milyar atau rata-rata tumbuh sebesar 2,66 % per tahun. Pertumbuhan terbesar belanja transfer terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 307,18 milyar.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kerinci tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, juga untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan. Berdasarkan KUA yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci, secara umum kebijakan-kebijakan perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah diungkapkan pada bagian selanjutnya.

#### **3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mencapai target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan



pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam rangka memaksimalkan kemampuan keuangan daerah tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik. Kebijakan pendapatan daerah dituangkan dalam beberapa tindakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajerial pengelola pajak dan retribusi daerah, untuk itu telah dibentuk organisasi perangkat daerah (OPD) khusus yang menangani pengelolaan pajak dan retribusi daerah
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi melalui perencanaan target, pengawasan, dan evaluasi yang konsisten;
3. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi, serta dari lembaga pemerintah non departemen, baik dalam rangka realisasi pendapatan transfer;
4. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diantaranya optimalisasi manajemen kas daerah tanpa mengganggu substansi proses pembangunan; dan
5. Mengupayakan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan porsi bagi hasil dan insentif yang lebih besar.

Untuk mewujudkan kebijakan pendapatan sebagaimana tersebut di atas, pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan secara profesional serta adanya inovasi dan kreatifitas dari OPD penghasil PAD, sehingga upaya penggalian dan upaya untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan daerah dapat dilakukan. Secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah:

1. Optimalisasi penerimaan daerah, khususnya PAD berdasarkan potensi dan regulasi yang sudah ada, melalui manajemen operasional pemungutan, diantaranya dengan mencegah

- kebocoran penerimaan pendapatan daerah semaksimal mungkin dan memotivasi aparat pemungut untuk berupaya secara optimal memenuhi target yang ditetapkan;
2. Pengembangan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan alokasi anggaran APBN dan APBD Provinsi baik berupa tambahan pendapatan transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan;
  3. Meningkatkan fungsi-fungsi manajemen penerimaan bagi OPD penghasil dan instansi terkait serta koordinasi yang terpadu terhadap seluruh stakeholder;
  4. Mengupayakan pengelolaan aset dan sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah secara lebih profesional tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga pelayan publik.

### **3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah disusun untuk mencapai sasaran pembangunan daerah, melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam seperangkat urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pada masing-masing OPD. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD setiap tahun difokuskan kepada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan tanpa mengabaikan porsi dari belanja yang lain. Oleh sebab itu untuk lebih terarahnya APBD Kabupaten Kerinci ditetapkan pokok-pokok kebijakan umum penganggaran sebagai berikut.

1. Alokasi terbesar belanja daerah digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS merupakan kewajiban pemerintah daerah atas

penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/ kabupaten;

2. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran belanja;
3. Pengalokasian dana untuk bantuan penunjang operasional organisasi sosial kemasyarakatan serta pemberian bantuan honorarium bagi guru MDA/TPA/TPSA/TPQ dan sejenisnya, serta pemberian bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan;
4. Pembiayaan program dan kegiatan OPD adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Alokasi dana dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kerinci. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan maka prioritas anggaran juga diberikan untuk program sanitasi dan kebersihan seperti pengelolaan sampah;
6. Untuk tujuan dan sasaran Kabupaten Kerinci, dukungan anggaran melalui program dan kegiatan pembinaan serta fasilitasi dunia usaha dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang perdagangan dan pariwisata yang boleh dikatakan merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Daerah
8. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sarana dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk;
9. Alokasi dana dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan desa; dan



10. Alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD baik penunjang operasional rutin maupun dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat baik dalam bentuk pembinaan maupun fasilitasi.
11. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian internal di seluruh OPD. Optimalisasi peran inspektorat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.

### **3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan daerah lebih ditekankan kepada upaya menutupi perkiraan defisit APBD melalui upaya peningkatan penerimaan pembiayaan/penurunan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah meliputi semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dimana sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sementara untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yaitu:

1. Investasi pemerintah daerah pada BPD (Bank Jambi); dan
2. Investasi pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang dinilai sehat dan diperkirakan mampu menggenjot pendapatan daerah di masa yang akan datang.
3. Jika memungkinkan untuk membatasi melakukan kebijakan penambahan hutang daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci dalam 2

(dua) tahun ke depan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Kapasitas riil keuangan daerah dimaksud merupakan penerimaan /pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai belanja, yaitu belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja pengeluaran untuk pembiayaan yang bersifat wajib, mengikat, dan prioritas utama lainnya. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- A. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut;
- B. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
- C. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Kabupaten Kerinci;
- D. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan; dan
- E. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

### **3.3.1. Proyeksi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Data Masa Lalu**

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagubelanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas,

pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Kerinci dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 2 (tahun) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, Akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dirincikan melalui:

1. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2019-2024;
2. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Kerinci dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi setiap SKPD;
3. Pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045.



4. Mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum terlaksana pada RPJMD tahun 2019-2024; dan
5. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
6. Rincian gambaran tentang total pendapatan, total belanja dan total pembiayaan selama 2 (dua) tahun kedepan, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.11**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 s.d 2026**

NO	URAIAN	PROYEKSI	
		2025	2026
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>36.814.335.164,25</b>	<b>38.655.051.922,46</b>
4.1.01	Pajak Daerah	16.912.093.128,00	17.757.697.784,40
4.1.02	Retribusi Daerah	5.977.020.000,00	6.275.871.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.725.222.036,25	10.211.483.138,06
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.274.000.000.000,00</b>	<b>1.388.660.000.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.172.000.000.000,00	1.277.480.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.000.000.000,00	111.180.000.000,00
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>12.570.000.000,00</b>	<b>13.431.300.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.570.000.000,00	10.431.300.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.323.384.335.164,25</b>	<b>1.440.746.351.922,46</b>

*Sumber Data; APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (diolah)*

Jika mengamati data proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun kedepan yang terus meningkatkan, tentunya sudah dianalisis secara seksama dari berbagai aspek. Dengan demikian, ambisi untuk terus meningkatkan proyeksi pendapatan daerah tentunya harus dibarengi dengan berbagai upaya, kerja keras, kerja keras dan kerja bersinergitas dari seluruh jajaran birokrasi pemerintahan daerah dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi. Dengan meningkatkan pendapatan daerah, diharapkan akan dapat mendukung terlaksananya tujuan dan sasaran dan program kerja bupati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Optimisme peningkatan dimaksud yaitu dari Rp. 1.323.384.335.164,25 pada tahun 2025, dan diharapkan pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp. 1.440.746.351.922,46 pada tahun 2026 dengan rata-rata peningkatan setiap item pendapatan sebesar 4 persen.

Selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 2 (dua) tahun kedepan baik untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Data belanja dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel 3.11 sebagai berikut;

**Tabel 3.12**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 s.d 2026**

NO	URAIAN	PROYEKSI	
		2025	2026
1	2	3	4
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	-	-
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>836.000.000.000,00</b>	<b>903.560.000.000,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	560.000.000.000,00	604.800.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.000.000.000,00	293.760.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi		
5.1.05	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>152.300.000.000,00</b>	<b>173.500.000.000,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.000.000.000,00	63.000.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000.000,00	80.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.300.000.000,00	2.500.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>22.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	22.500.000.000,00
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>336.084.335.164,25</b>	<b>362.186.351.922,46</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.288.911.312,80	2.403.356.878,44
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.795.423.851,45	359.782.995.044,02
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.344.384.335.164,25</b>	<b>1.461.746.351.922,46</b>

Sumber Data; APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (diolah)

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, untuk proyeksi pembiayaan di Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 secara rinci dapat dilihat pada table 3.12 sebagai berikut;



**Tabel 3.13**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 s.d**  
**2026**

NO	URAIAN	PROYEKSI	
		2025	2026
1	2	3	4
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-	-
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21.000.000.000,00</b>	<b>21.000.000.000,00</b>
<b>6,3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-	-

*Sumber Data; APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (diolah)*

### **3.3.2.Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut;
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;



3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan; dan
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 2 (dua) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3.15 berikut.

**Tabel 3.14**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 s.d 2026**

No	Uraian	Proyeksi	
		2025	2026
1	2	3	4
1	Pendapatan	1.323.384.335.164	1.440.746.351.922
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.000.000.000	30.000.000.000
<b>Total penerimaan</b>		<b>1.353.384.335.164</b>	<b>1.470.746.351.922</b>
<b>Dikurangi:</b>			
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	560.000.000.000	604.800.000.000
<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>		<b>793.384.335.164</b>	<b>865.946.351.922</b>

*Sumber Data; APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (diolah)*

Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 2 (dua) tahun kedepan, selanjutnya proyeksi rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 2 (dua) tahun ke depan.

**Tabel 3.15**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 s.d 2026**

No	Uraian	Proyeksi	
		2025	2026
1	2	3	4
<b>Kapasitas riil kemampuan</b>		<b>793.384.335.164</b>	<b>865.946.351.922</b>
1	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	612.084.335.164,25	660.946.351.922,46
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	152.300.000.000	173.500.000.000
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	29.000.000.000	31.500.000.000

Sumber Data; APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (diolah)

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan/pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan keberbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, sebagai berikut :

**Prioritas I** untuk membiayai belanja wajib yang telah diatur dalam perundang-undangan.

**Prioritas II** untuk membiayai belanja dalam rangka menjalankan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci

**Prioritas III** untuk membiayai belanja prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lainnya.

## **BAB 4**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **4.1. Permasalahan**

Permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini mencakup aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah serta aspek pelayanan umum.

##### **4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

###### **4.1.1.1. Aspek Geografi**

Pada aspek geografi, permasalahan pembangunan mencakup aspek kondisi dan pemanfaatan fisik ruang serta dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Kerinci merupakan daerah rawan bencana, mengingat wilayah Kabupaten Kerinci berada dekat dengan lokasi pertemuan lempeng aktif sumatera dan berada pada jalur rangkaian gunung api aktif dunia (*ring of fire*). Dalam struktur geologinya, Kabupaten Kerinci dilalui oleh sesar utama yang berarah barat laut-tenggara yaitu sesar siulak. Sesar ini terdiri atas dua sesar yang sejajar dan membatasi danau kerinci dengan panjang kurang lebih 37 Km dan lebarnya 17 km. Berdasarkan kondisi ini, wilayah Kabupaten Kerinci menjadi daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi (gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung api). Selain tiga jenis bencana ini, Kabupaten Kerinci juga rawan terhadap bencana akibat faktor hidrometeorologi (banjir, kekeringan dan angin puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kerinci tahun 2022 memperlihatkan terjadi kenaikan dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat risiko bencana, namun masih dalam kategori sedang. Meskipun IRB Kabupaten Kerinci pada tahun 2022 berada pada tingkat sedang dengan skor 132,02, bukan berarti terbebas dari ancaman bencana yang ada.

Adanya lahan-lahan kosong ataupun terlantar, seiring dengan



kebijakan pembangunan yang kedepannya lebih memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti pengembangan infrastruktur hijau, akan meningkatkan potensi lahan yang dapat difungsikan dan dapat memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan.

Alih fungsi lahan berdampak pada semakin meningkatnya intensitas banjir dan genangan pada wilayah tertentu. Alih fungsi lahan disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan lahan untuk perluasan permukiman, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya, Tantangan ke depan adalah menekan laju alih fungsi lahan serta mengembangkan kawasan permukiman dengan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan pemanfaatan ruang dan iklim global.

Pencemaran sungai semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya partisipasi masyarakat dan serta lemahnya pengendalian dan pengawasan. Kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah domestik yang terbatas. Program penanganan sampah melalui *Reduce, Reuse & Recycle* (3R) mulai dari hulu dan layanan persampahan masih belum diterapkan secara optimal.

Selanjutnya, seiring dengan intensitas perubahan iklim yang semakin menguat telah berdampak pada ancaman menurunnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian pada beberapa wilayah terdampak, dikarenakan meningkatnya potensi gangguan organisme pengganggu tanaman maupun oleh banjir dan kekeringan. Upaya pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim masih terbatas.

Belum optimalnya pengembangan ekowisata terintegrasi, disebabkan oleh masih terbatasnya amenities yang dilengkapi dengan fasilitas maupun pengembangan ekonomi kreatif di dalam kawasan ekowisata. Pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif secara terintegrasi berbasis kawasan memberikan *trickle down effect* lebih

besar dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih inklusif.

#### **4.1.1.2. Aspek Demografi**

Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, Alam dan Ruang. Dengan jumlah penduduk mencapai 253,9 ribu jiwa (2022) serta laju pertumbuhan 0,72 persen akan meningkatkan kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut juga akan berimplikasi terhadap meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya alam dan ruang, salah satunya adalah kepadatan penduduk yang akan berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas baik barang maupun jasa yang perlu ditopang dengan optimalisasi aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Aksesibilitas dan konektivitas masih perlu ditingkatkan sehingga dirasa menjadi suatu kebutuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penataan ruang.

Pada kualitas sumber daya manusia saat ini tingkat rata-rata lama sekolah dibawah capaian provinsi dan nasional serta prevalensi *stunting* pada balita sebesar 24,2 persen (tahun 2022). Kondisi ini menjadikan tantangan bagi sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam mewujudkan sumber daya manusia Kerinci yang berkualitas dan berdaya saing pada setiap tingkatan struktur penduduk.

Tren penduduk usia produktif Kabupaten Kerinci cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan angka tersebut mencapai 68,99 % di tahun 2022, yang berdampak pada kebutuhan lapangan pekerjaan. Di sektor ketenagakerjaan, kompetensi angkatan kerja masih belum sejalan dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja dikarenakan belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi.

Saat ini komposisi penduduk Kabupaten Kerinci sudah menuju



pada kondisi *ageing population* dimana penduduk lansia jumlahnya 9,01 persen pada tahun 2022. Selain itu perlindungan dan pemberdayaan lansia di Kabupaten Kerinci masih perlu ditingkatkan.

#### **4.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat mencakup kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

##### **4.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi**

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi terkait dengan akses masyarakat terhadap sektor-sektor ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi barang dan jasa. Tantangan pencapaian kesejahteraan ekonomi adalah pengendalian inflasi, dimana harga-harga di tingkat konsumen rentan oleh gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan optimalnya stabilitas pasokan dan sistem rantai pasok yang belum optimal. Keterjangkauan pangan belum menjangkau keseluruhan masyarakat khususnya masyarakat rentan, serta tingginya ketergantungan konsumsi pangan beras.

Meskipun persentase penduduk miskin di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan pada tahun 2022, indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat 0,41 poin dari 0,81 di tahun 2021 menjadi 1,22 di tahun 2022. Indeks keparahan kemiskinan juga meningkat sebanyak 0,16 poin dari 0,15 di tahun 2021 menjadi 0,31 di tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa bagi penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan secara rata-rata pengeluarannya semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin jauh seseorang dari garis kemiskinan, tentu akan semakin sulit juga untuk mendorong penduduk tersebut untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin meningkat. Beberapa faktor penyebabnya antara lain masih



terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah.

TPAK Kabupaten Kerinci pada tahun 2022 tercatat sebesar 73,53 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 70,9 persen. Bertambahnya jumlah penduduk Angkatan kerja yang lebih besar dari penambahan jumlah penduduk usia kerja mengakibatkan peningkatan pada besaran TPAK pada tahun 2022. Dari 139.997 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, 2,63 persen diantaranya merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,32 persen. Munculnya lapangan usaha baru berbasis digitalisasi pada gilirannya menuntut SDM yang lebih berkualitas yang sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. Penguatan sektor IKM, UMKM dan Ekraf yang unggul dan berdaya saing menjadi hal yang mendesak dalam rangka mempercepat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor lapangan usaha.

Meskipun Indeks Gini Kabupaten Kerinci pada tahun 2022 dalam kategori rendah yaitu 0,28, tetapi diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kondisi ini sejalan dengan semakin meingkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan menjadi faktor penyebab peningkatan ketimpangan pendapatan.

Harga jual produk dan harga pupuk berpengaruh terhadap nilai tukar petani, produksi, luas lahan, dan pestisida, karena semakin tinggi luas lahan usaha tani yang dimiliki maka pengeluaran untuk faktor produksi juga akan semakin tinggi, demikian pula produksi dan pestisida menambah pengeluaran usaha tani sehingga indeks harga yang dibayarkan melebihi indeks harga yang diterima. Oleh Karena itu nilai tukar petani masih perlu ditingkatkan.

Pada tahu 2022, TPT dari tamatan SMA/ sederajat masih

merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 67,56 persen. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, kerjasama dengan perusahaan dan sistem informasi pencari kerja masih perlu ditingkatkan.

Posisi IPM Kabupaten Kerinci berada pada IPM kelompok tinggi karena nilainya lebih dari 70. Namun dibawah capaian IPM Provinsi Jambi 71,63 dan nasional 71,94 pada tahun 2022. Dimensi pembentuk IPM hanya harapan lama sekolah yang capaian nya diatas Provinsi Jambi dan nasional di tahun 2022.

#### **4.1.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya**

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial budaya terkait dengan akses terhadap hak-hak dasar di sektor-sektor sosial dan budaya dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Keluarga yang sehat dapat dilihat dari indikator diantaranya Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merupakan dimensi umur panjang dan hidup sehat UHH Kabupaten Kerinci tahun 2022 sebesar 70,28 tahun, masih di bawah Provinsi Jambi 71,50 tahun dan nasional 71,85 tahun. Kondisi ini disebabkan lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah akses terhadap sanitasi layak dan akses terhadap air minum layak yang belum optimal, masih besarnya angka perkawinan usia dini yang dapat berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Permasalahan kesehatan selanjutnya adalah tingkat kesadaran (*awareness*) yang masih rendah terhadap kesehatan serta tantangan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Hingga pada tahun 2022 penduduk di Kabupaten Kerinci yang memiliki BPJS Kesehatan ada sebanyak 38,42 persen, sementara 60,34 persen tidak memiliki jaminan kesehatan.

Belum optimalnya kualitas keluarga. Kualitas keluarga mempunyai peranan penting dalam pembangunan manusia di



Kabupaten Kerinci. Permasalahan kualitas keluarga Kabupaten Kerinci masih belum optimalnya ketahanan legalitas struktur, ketahanan fisik keluarga, kualitas ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan sosial-psikologi dan ketahanan sosial budaya keluarga. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari status perceraian. Persentase penduduk perempuan dengan status cerai hampir mencapai dua kali lipat dari persentase penduduk laki-laki yang berstatus cerai. Sehingga akan berdampak terhadap kualitas dan kelangsungan keluarga, karena perempuan yang bekerja lebih sedikit dari laki-laki.

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak masih perlu di tingkatkan. Prevalensi Stunting di Kabupaten Kerinci tahun 2022 sebesar 24,2 persen atau dapat diartikan dari 100 balita terdapat 24 sampai dengan 25 orang anak stunting. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas dan kemampuan daya saing manusia, sehingga harus di tangani sejak dini.

Permasalahan yang selanjutnya yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan di tahun 2022. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. IKG yang tinggi merefleksikan rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Pembangunan dibidang kepemudaan perlu ditingkatkan, agar memiliki pengetahuan yang inovatif dan kreativitas yang tinggi, karena merupakan salah satu aktor dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan pemuda di Kabupaten Kerinci selanjutnya masih rendahnya lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda di Kabupaten Kerinci. hal ini dilihat dari tingkat pengangguran terbuka pemuda yaitu tamatan Sekolah Menengah Atas masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 67,56 persen.

Keberagaman budaya merupakan modal dasar yang kuat dalam pembangunan. Dimensi ekonomi budaya (aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan)



dan ekspresi budaya (aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat) perlu dioptimalkan. Pemajuan kebudayaan melalui pemanfaatan objek budaya untuk menggerakkan perekonomian belum sepenuhnya menjadi sumber daya tarik atraksi di sektor pariwisata. penguatan daya tarik objek kebudayaan menjadi atraksi wisata perlu dikembangkan dalam rangka pemajuan kebudayaan Kerinci. Ruang-ruang ekspresi budaya seperti pusat budaya serta arena ruang publik untuk pagelaran seni dan budaya perlu terus dikembangkan dalam rangka pelestarian kebudayaan Kerinci serta menciptakan SDM Kerinci yang berkualitas dan berkarakter.

Pembangunan desa yang diukur dengan indeks Desa Membangun (IDM), IDM Kabupaten Kerinci meningkat dari tahun sebelumnya dari 0,6725 menjadi 0,7077. Secara keseluruhan pada tahun 2023, Kabupaten Kerinci berada pada peringkat ke-221 nasional dengan status maju, sehingga masih perlu ditingkatkan.

#### **4.1.3.Aspek Daya Saing Daerah**

Permasalahan pada aspek daya saing daerah mencakup permasalahan terkait dengan ekosistem inovasi, penguatan, kualitas SDM serta pasar.

##### **4.1.3.1. Daya Saing Ekonomi**

Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian masih belum sebanding dengan potensinya Upaya penciptaan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan memerlukan sumberdaya investasi yang tidak sedikit. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan masih belum menjangkau keseluruhan angkatan kerja. Selain faktor pendidikan, masih rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat antara lain disebabkan oleh kapasitas teknologi dalam menghasilkan nilai tambah masih terbatas. Berbagai sektor perekonomian masih belum dikembangkan optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas

perekonomian daerah. Sektor pertanian, sektor kreatif, serta industri pengolahan skala kecil (IKM/UMKM).

Kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas, hal ini disebabkan oleh kapasitas usaha, termasuk di dalamnya kapasitas teknologi dan akses pembiayaan IKM dan UMKM masih terbatas, penguatan dalam penciptaan wirausaha baru dan *start up*, maupun peningkatan skala usaha belum optimal, pembangunan pemuda di sektor ekonomi masih rendah, daya saing produk masih rendah, serta kelincahan UMKM dan keberlanjutannya masih kurang dikarenakan ketidakmampuan untuk memahami teknologi.

Tingginya Investasi belum diikuti oleh percepatan peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi investasi dan pemerataanya perlu ditingkatkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya di wilayah Kerinci Selatan dan masih belum dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara optimal.

Dalam jangka panjang, seiring dengan perkembangan teknologi di sektor industri yang menuju padat modal maka kapasitas penyerapan tenaga kerja manufaktur akan semakin menurun dikarenakan otomasi dan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam proses produksinya. Percepatan peningkatan pendapatan masyarakat membutuhkan investasi serta SDM yang lebih berkualitas. Kinerja ekosistem ekonomi digital masih belum optimal. dan terbatasnya literasi digital dari pelaku usaha. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong peningkatan konsumsi, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi barang dan jasa di berbagai sektor perekonomian.

#### **4.1.3.2. Daya Saing SDM**

Masih rendahnya Partisipasi Sekolah, Kabupaten Kerinci dengan jumlah penduduk yang cukup besar, belum sebanding dengan kualitas sumberdaya. Hal ini dapat dilihat dari capaian Angka



Partisipasi Murni SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. APM untuk jenjang SMP/ sederajat tahun 2020 sebesar 87,40 persen, naik menjadi 87,86 persen pada tahun 2021, dan turun pada tahun 2022 menjadi 87,36. Pada tahun 2020, APM SMA/ sederajat sebesar 77,22 persen dan mengalami penurunan menjadi 72,11 persen pada tahun 2021, dan turun pada tahun 2022 menjadi 71,84 persen. Permasalahan pendidikan selanjutnya yaitu kurikulum yang belum mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja global serta belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Keterkaitan yang lemah (*link and match*) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja. Lemahnya keterkaitan (*link and match*) antara lulusan pendidikan sekolah menengah atas dengan dunia kerja diindikasikan oleh tingkat pengangguran terbuka disumbang paling banyak dari lulusan Tingkat SMA/ sederajat yaitu sebesar 67,56 persen. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurikulum pendidikan tingkat SMA/ sederajat yang belum adaptif dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wirausaha mandiri.

Belum Optimalnya Literasi Digital dan Pemanfaatan TIK dalam Meningkatkan Daya Saing SDM. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kemampuan literasi digital yaitu masih rendahnya kemampuan digital *skill* masyarakat dalam kehidupan sehari- hari. Kurangnya SDM yang kompeten juga disebabkan oleh keterbatasan BLK yang tersertifikasi, baik dari aspek sarana prasarana maupun tenaga pelatih yang kompeten, serta belum berkembangnya pusat pendidikan dan inovasi.

Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Kerinci yang cenderung meningkat selama periode tahun 2020-2022 (masih dibawah angka ketergantungan nasional) yang dibarengi dengan makin meningkatnya Total Fertility Rate (TFR). Hal tersebut erat kaitannya dengan makin menurunnya dan menyempitnya kesempatan pendidikan untuk semua, terkhusus bagi kaum



perempuan, sehingga berdampak pada meningkatnya angka kelahiran.

#### **4.1.3.3. Daya Saing Infrastruktur**

Pemerataan dan kualitas infrastruktur belum optimal dalam mengimbangi peningkatan kebutuhan layanan masyarakat dan perkembangan perkotaan berkelanjutan. Keselarasan pembangunan infrastruktur konektivitas dengan perkembangan kegiatan ekonomi masih perlu ditingkatkan.

Transportasi perkotaan masih belum terintegrasi dengan seluruh moda yang ada, sehingga menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum masih kecil. Sehingga masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum.

Dari aspek infrastruktur sumberdaya air, kinerja layanan jaringan irigasi belum sepenuhnya menopang peningkatan produktivitas pertanian. Beberapa faktor penyebabnya antara lain intensitas kejadian bencana alam yang tidak diimbangi dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi, umur bangunan jaringan irigasi yang telah melewati umur konstruksi, serta alih fungsi lahan.

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman belum menjangkau keseluruhan masyarakat. Akses sanitasi layak, akses air minum layak serta akses rumah layak huni yang belum optimal. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan infrastruktur pengolahan limbah. Program penanganan sampah melalui *Reduce, Reuse & Recycle* (3R) mulai dari hulu masih belum diterapkan secara optimal, serta layanan persampahan yang belum optimal. Kesemuanya memberikan gambaran kompleksnya permasalahan infrastruktur dasar yang perlu ditangani di masa depan dengan infrastruktur dasar yang layak, aman, dan memenuhi standar, yang menjangkau ke seluruh wilayah

Kabupaten Kerinci.

Meskipun tingkat rasio elektrifikasi Kerinci pada tahun 2022 telah mencapai 95,22 % dari total rumah tangga namun secara kualitas di beberapa wilayah masih belum optimal dari aspek stabilitas pasokan dan kualitasnya.

Hal ini disebabkan oleh kondisi sarana ketenagalistrikan seperti kapasitas infrastruktur distribusi yang masih belum dapat mengimbangi sisi kebutuhannya. Isu *global green investment* mempersyaratkan pasokan listrik untuk sektor industri yang berkualitas dengan sumber energi terbarukan. Potensi sumber energi terbarukan di Kerinci diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kecamatan Batang Merangin, sumber panas bumi (geothermal) berada di Kecamatan Gunung Raya dan Air Hangat. Percepatan transformasi sumber energi menuju terbarukan akan meningkatkan daya saing infrastruktur yang atraktif bagi investasi di daerah.

Infrastruktur Digital belum merata, masih terdapat Desa Blank Spot area dimana area tersebut tidak bisa di akses jaringan internet. Disrupsi digitalisasi memiliki perkembangan yang sangat pesat dan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Permasalahan dalam pencapaian daya saing digital Kabupaten Kerinci yaitu perkembangan penggunaan digitalisasi belum optimal dalam meningkatkan perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas serta ketenagakerjaan.

#### **4.1.3.4. Daya Saing Iklim Investasi**

Regulasi terkait insentif kemudahan investasi masih perlu ditingkatkan. Disamping itu alokasi ruang untuk investasi perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan daya saing investasi wilayah.

Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan Pada tahun 2022, tercatat sekitar 0,94 persen penduduk di Kabupaten

Kerinci pernah menjadi korban kejahatan. Selama satu tahun terakhir, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan mengalami penurunan sebesar 0,62 persen. Sejak tahun 2021 hingga 2022 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak menjadi korban kejahatan daripada penduduk perempuan.

#### **4.1.4.Aspek Pelayanan Umum**

Birokrasi belum sepenuhnya adaptif dengan dinamika global yang cepat dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Kapasitas birokrasi diperlukan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan serta menghadapi disrupsi global. Kabupaten Kerinci dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga diperlukan peningkatan jangkauan pelayanan dalam upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Di tengah dinamika mobilitas, permasalahan dan kebutuhan penduduk yang semakin kompleks, digitalisasi menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, adaptif, transparan, dan akuntabel, yang dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi digital secara terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, pengembangan inovasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik masih perlu peningkatan kolaborasi antara sektor pemerintah, sektor swasta serta akademisi.

Belum Optimalnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Budaya inovasi dapat ditanamkan melalui pengenalan hal-hal baru, pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya seperti gagasan, metode, atau alat. Tantangan ke depan adalah menghadirkan SDM birokrasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Diperlukan peningkatan difusi pengetahuan, keterampilan, dan praktik kepada masyarakat serta keterkaitannya dengan permasalahan



pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi untuk sektor layanan publik dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian relatif masih sangat terbatas. Dalam pengembangan inovasi daerah masih diperlukan kolaborasi untuk memperkuat sistem inovasi yang melibatkan institusi riset, pemerintah, akademisi dan sektor swasta. Sistem inovasi yang terbangun diharapkan dapat membawa perubahan Kerinci dalam jangka panjang.

Masih Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berintegritas. dalam mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia. Integritas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi unsur penting tata kelola pemerintahan. Tata laksana pemerintahan, sistem meritokrasi dan sistem akuntabilitas pemerintahan, masih perlu ditingkatkan.

Rasio kapasitas fiskal Kabupaten Kerinci yang masih rendah sebesar 1,304. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, pemerintah daerah dapat memperluas dan mengatur pertumbuhan atau perkembangan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, penggalian sumber penerimaan baru diharapkan tidak menimbulkan terjadinya distorsi kegiatan ekonomi di daerah, dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga menimbulkan keengganan investor masuk dalam bisnis di daerah. Di samping itu, kebijakan pemerintah daerah tentang pajak/retribusi daerah tidak menimbulkan kelesuan iklim berusaha di kalangan pengusaha daerah.

## **4.2. Isu Strategis Pembangunan**

### **4.2.1. Isu Global**

#### **4.2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals***

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata

kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB dalam hal ini telah ditetapkannya RAD TPB/SDGs Kabupaten Kerinci Tahun 2022- 2023.

#### **4.2.1.2. Demografi Global dan Bonus Demografi**

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2022), bahwa proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 di Kab. Kerinci mencapai 274.561 jiwa.

Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 64,16 % dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 55,86 % pada tahun 2045. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan



kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

#### **4.2.1.3. Geopolitik dan Geoekonomi**

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global- nasional-regional.

Posisi Kabupaten Kerinci yang berbatasan langsung dengan Kota Sungai Penuh menjadi potensi mendorong sektor sekunder dan tersier. Selain itu kerja sama antar negara dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Kerinci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Asean Free Trade Area (AFTA) juga berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan Kabupaten Kerinci. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya.

#### **4.2.1.4. Perkembangan Teknologi**

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpenaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IOT), Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, nanotechnology, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan



berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

#### **4.2.1.5. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon**

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada Paris Agreement tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019) menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci.

#### **4.2.2. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Selama

dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

- rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global
- kualitas dan kuantitas sdm dalam penelitian belum memadai
- deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
- belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
- belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
- rendahnya kontribusi umkm dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
- produktivitas tenaga kerja indonesia relatif tertinggal
- pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan
- rendahnya penggunaan ebt dan efisiensi energi
- kualitas pendidikan yang masih rendah
- belum meratanya akses jaminan sosial
- disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi
- belum meratanya kualitas pelayanan publik
- tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan visi “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional mengikat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan.

#### **4.2.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Kerinci 2025-2045**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun

berdasarkan Undang- Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Muatan KLHS RPJPD Kabupaten Kerinci berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian ini juga menetapkan isu-isu terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi daerah yang dimiliki sebagai berikut.

#### **4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Kerinci**

Isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan signifikan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode tahun 2025-2045. Perumusan isu strategis pembangunan daerah Tahun 2025-2045 secara lebih rinci sebagaimana diuraikan pada tabel 4.1 Isu strategis Pembangunan Daerah Kerinci dirumuskan sebagai berikut:

##### **4.2.4.1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Kabupaten Kerinci memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Kerinci. Sementara rasio



ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut juga cenderung meningkat.

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Kabupaten Kerinci untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Memperhatikan karakter budaya dan sosial di Kabupaten Kerinci, sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga perlu ditingkatkan.

#### **4.2.4.2. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi**

Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Kerinci.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci memiliki tren yang cenderung stagnan dan belum berkinerja secara optimal. Sektor

produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Kerinci, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, konstruksi dan perdagangan besar. Namun, jika dilihat tren pertumbuhan ketiga sektor tersebut yang fluktuatif dan cenderung melambat pada empat tahun terakhir, belum menunjukkan kinerja yang optimal karena produktivitasnya yang stagnan. Permasalahan ini dipicu oleh kapasitas SDM dan kelembagaan sektor belum optimal, angkatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi pasar kerja dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing. Faktor penting yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan regenerasi petani.

Belum optimalnya pengembangan ekowisata terintegrasi, disebabkan oleh masih terbatasnya amenities yang dilengkapi dengan fasilitas maupun pengembangan ekonomi kreatif di dalam kawasan ekowisata. Pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif secara terintegrasi berbasis kawasan memberikan *trickle down effect* lebih besar dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih inklusif.

Transformasi pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor-sektor perekonomian berbasis sumber daya manusia yang adaptif, inovatif memanfaatkan IPTEK, penguatan sektor IKM, UMKM dan Ekraf agar dapat berdaya saing dalam rangka mempercepat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor lapangan usaha. Struktur ekonomi yang berbasis potensi bahan baku lokal dan resiliensi terhadap berbagai guncangan faktor internal maupun eksternal, adanya pergeseran sektor-sektor perekonomian dan pengarusutamaan *green economy*.

#### **4.2.4.3. Penataan Ruang yang Berkelanjutan**

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam

jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah yang berdampak pada kebutuhan sarana prasarana dan infrastruktur. peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan yang meningkat akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

Pusat pemerintahan yang sebelumnya di Sungai Penuh saat ini berpindah ke Komplek Perkantoran Bukit Tengah, yang mengakibatkan terjadi perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kerinci, karena sektor ekonomi perkotaan yang sebelumnya terkonsentrasi di Sungai Penuh. Jika semula struktur perekonomian tersebut relatif seimbang antara sektor ekonomi pedesaan dan perkotaan, maka dalam jangka pendek sektor ekonomi perkotaan akan berkurang, sehingga sektor ekonomi pedesaan akan lebih dominan. Agar struktur ekonomi Kabupaten Kerinci lebih seimbang antara sektor ekonomi pedesaan dan perkotaan, dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan agropolitan dan kawasan ekowisata terintegrasi.

Penguatan konektivitas, pemerataan akses dan penyediaan infrastruktur dasar seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur fasilitas pendidikan akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Kerinci. Oleh sebab itu, perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur dan fasilitas yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

#### **4.2.4.4. Pengendalian Lingkungan Hidup**

Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Target



permbangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kerinci jangka panjang.

Lebih dari 50% dari luas Kabupaten Kerinci merupakan kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sementara itu pengelolaan kawasan budidaya belum dilakukan secara optimal dan efisien yang ditandai dengan banyaknya lahan-lahan yang tidak produktif. Keterbatasan lahan juga menyebabkan meningkatnya perambahan kawasan TNKS, kebakaran lahan serta pemanasan global. Disamping itu, Kabupaten Kerinci secara geologi berada dalam sistem patahan (sesar) Sumatera yaitu sesar semangko, sehingga Kabupaten Kerinci rawan terhadap gempa bumi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan dan daerah dataran rendah. Kawasan-kawasan tersebut membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dijadikan kawasan limitasi ataupun kawasan budidaya dengan pengelolaan semaksimal mungkin. Pengelolaan kawasan budidaya harus dapat memahami keberadaan alam dan mengakomodasi fonomena alam yang kemungkinan akan terjadi. Selain itu, Kabupaten Kerinci memiliki potensi *geodiversity* dan *geoheritage* yang beragam dan unik untuk dikembangkan menjadi *geopark* (taman bumi) Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumberdaya serta kehidupan sosial budaya

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

#### **4.2.4.5. Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Wilayah Kabupaten Kerinci yang luas dan jumlah penduduk yang cukup besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

## **BAB 5**

### **TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **5.1. Tujuan**

Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Bupati untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun kedepan. Dengan demikian, Tujuan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kerinci ini akan mengarahkan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci tahap ke satu dalam periode Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kerinci 2025-2045.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2019-2024; memperhatikan hasil analisis isu strategis; berpedoman pada Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kerinci 2025-2045; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka Tujuan pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

#### **1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing.**

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, yang diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan melalui perwujudan capaian sasaran pokok dan dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Pendidikan berkualitas yang merata Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja pendidikan berkualitas yang merata adalah : Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, indeks literasi dan indeks literasi digital.
2. Kesehatan untuk semua Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja kesehatan untuk semua adalah : Usia



harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk, cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan.

3. Perlindungan sosial adaptif Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja perlindungan sosial adaptif adalah : Persentase penduduk miskin, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Kehidupan Sosial yang Aktif dan Kondusif Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja kehidupan sosial yang aktif dan kondusif adalah : Warisan budaya yang teregistrasi, indeks pembangunan pemuda, tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum dan persentase kasus konflik antar beragama.
5. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender adalah : Persentase kasus perceraian, indeks keluarga sehat, indeks perlindungan anak dan indeks ketimpangan gender.

## **2. Meningkatkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan.**

Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan dapat dilihat atau diukur dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita, yang diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan melalui perwujudan capaian sasaran pokok dan dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Produktivitas Ekonomi Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja produktivitas ekonomi adalah : Rasio kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
2. Inovasi dan Investasi Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja inovasi dan investasi adalah : Peningkatan nilai komualtif investasi, indeks daya saing daerah, tingkat

pengangguran terbuka, gini rasio dan persentase angkatan kerja yang berusaha sendiri (%).

3. Penerapan ekonomi hijau Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja penerapan ekonomi hijau adalah indeks kualitas udara.

### **3. Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas.**

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Infrastruktur Wilayah, yang diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan melalui perwujudan capaian sasaran pokok dan dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya sebagai berikut :

1. Penataan ruang yang optimal Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja penataan ruang yang optimal adalah : Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan persentase rumah layak huni.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja pemenuhan sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh adalah : Persentase cakupan pelayanan air minum, Persentase pelayanan sanitasi, Persentase pelayanan persampahan, Persentase luas lahan persawahan yang teraliri dengan irigasi teknis dan tingkat kemantapan jalan.
3. Konektifitas antar wilayah Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja konektivitas antar wilayah adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.

### **4. Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.**

Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan melalui perwujudan capaian sasaran pokok dan dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya sebagai berikut :

1. Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan adalah indeks ketahanan pangan
2. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan adalah : Rasio elektrifikasi, akses rumah terhadap air perpipaan dan indeks ketahanan pangan.
3. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah Indeks risiko kebencanaan dan persentase penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK).

#### **5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi.**

Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks reformasi birokrasi, yang diterjemahkan secara lebih rinci dan diarahkan melalui perwujudan capaian sasaran pokok dan dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien adalah Indeks SPBE dan Indeks Desa Membangun.
2. Inovasi dan pelayanan publik Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Inovasi daerah dan pelayanan publik adalah : Indeks inovasi daerah dan indeks pelayanan publik.
3. Pengelolaan keuangan yang akuntabel Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah rasio kapasitas fiskal.

Untuk memberikan gambaran tentang alur keterkaitan antara tujuan, sasaran serta Indikator Sasaran pada RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026, dapat dilihat sebagaimana Tabel 5.1.



**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026**

1	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal realisasi 2022	Target		Kondisi Akhir Tahun 2026
						2025	2026	
	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing</b>	<b>IPM</b>	<b>Indeks</b>	<b>BPS</b>	<b>76,35</b>	<b>80,16</b>	<b>84,17</b>	<b>84,17</b>
1.1	Meningkatnya Pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	BPS /Diknas	8,57	9	9,44	9,44
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	BPS /Diknas	13,89	15,58	15,31	15,31
		Indeks Literasi	Indeks	Dinas Perpustakaan	53,15	63,14	65,15	65,15
1.2	Meningkatnya Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	BPS	70,28	73,79	77,48	77,48
		Angka kematian ibu		BPS/Dinkes	246	234,29	223,13	223,13
		Angka kematian bayi		Dinkes	15,29	14,56	13,86	13,86
		Prevalensi stunting		Dinkes	24,2	18	14	14
		Insidensi Tuberkulosis		Dinkes	69,26	65,96	62,82	62,82

		per 100.000 penduduk							
		cakupan kepesertaan jaminan sosial	Persen	Dinkes	76,00	85,00	90,00	90,00	
1.3	Meningkatnya Perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin	Persen	BPS	7,57	7,42	7,06	7,06	
1.4	Meningkatnya Kehidupan Sosial Yang Aktif dan Kondusif	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	Dispora	50,35	54,06	56,06	56,06	
		Warisan Budaya yang teregistrasi	jumlah	Disparbud	18	19	20	20	
		Persentase kasus konflik sosial	Persen	Kesbangpol	100%	100%	100%	100%	
1.5	Meningkatnya Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	BPS	0,398	0,37	0,36	0,36	
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>	<b>Gini Rasio</b>	<b>Indeks</b>	<b>BPS</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	
2.1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	BPS	4,43	4,65	4,88	4,88	
		Rasio kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	BPS	46,97	51,4	53,97	53,97	



		Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	BPS	0,77	0,8	0,84	0,84
		Peningkatan nilai komulatif investasi	Miliar	PMPTSP	3174	3332	3499	3499
		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	BRIN/ Bappeda	2,88	2,88	2,88	2,88
2.2	Meningkatnya Inovasi dan Investasi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	BPS	2,48	2,4	2,38	2,38
		PDRB Perkapita	Juta (Rp)	BPS	48,16	50,56	53,09	53,09
		Persentase angkatan kerja yang berusaha sendiri (%)	Persen	BPS	27,23	28,59	30	30
2.3	Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	IKLH	Indeks	DLH	69,77	70	70,1	70,1
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas</b>	<b>Indeks Infrastruktur Wilayah</b>	<b>Indeks</b>	<b>Dinas PU</b>	<b>34,53</b>	<b>36,25</b>	<b>38,06</b>	<b>38,06</b>
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	Dinas PU	91,08	92,5	93	93
3.1	Meningkatnya Penataan ruang yang optimal	Persentase rumah layak huni	Persen	Dinas PU	57,8	60,69	63,72	63,72



		Persentase cakupan pelayanan air minum	Persen	Dinas PU		55,84	56,84	56,84
		Persentase pelayanan sanitasi	Persen	Dinas PU	38,11	39,11	40,11	40,11
	3.2	Meningkatnya Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh	Persen	Dinas LH	60	80	83	83
		Persentase luas lahan persawahan yang teraliri dengan irigasi teknis	Persen	Dinas PU	87,21	89,82	92,52	92,52
		Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	Dinas PU	49,12	51,57	54,15	54,15
	3.3	Meningkatnya Transportasi yang terintegrasi	Indeks	Dishub	73,78	77,46	81,34	81,34
<b>4</b>	<b>Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</b>		<b>IKLH</b>	<b>Indeks</b>	<b>Dinas LH</b>	<b>69,77</b>	<b>70</b>	<b>70,1</b>
	4.1	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Dinas LH	76,35	80,16	84,17

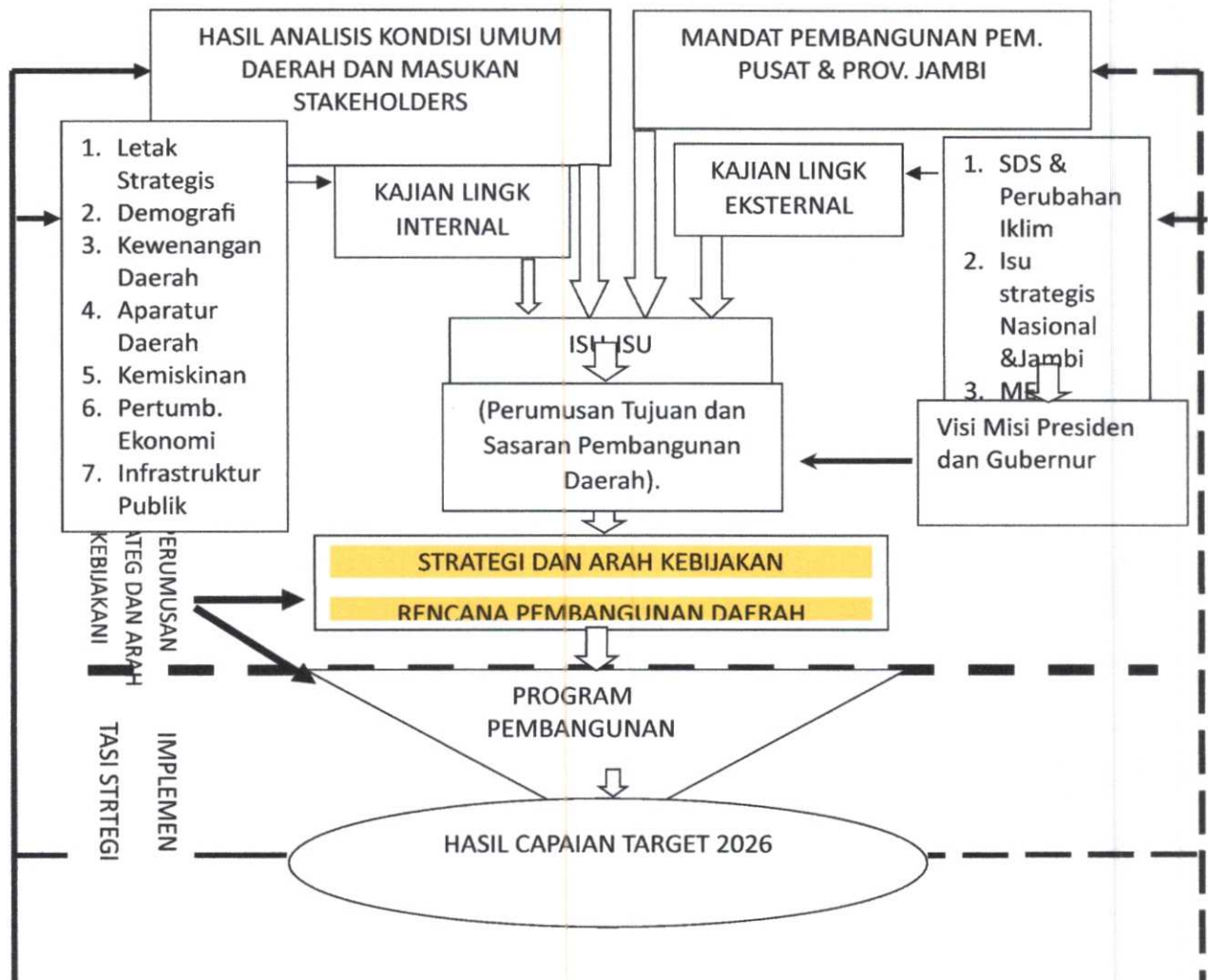
4.2	Meningkatnya Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Akses rumah terhadap air perpipaan	Persen	Dinas PU	43,8	45,99	48,28	48,28
		Indeks ketahanan Pangan	Indeks	Dinas Ket Pangan	81,94	90,5	90,7	90,7
4.3	Meningkatnya Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	Indeks Risiko Kebencanaan	Indeks	BPBD	125,06	119,1	113,43	113,43
<b>5</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>Kemenpan/Bag Organisasi</b>	<b>47,47</b>	<b>49,84</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>
5.1	Meningkatnya Tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	Indeks	Seluruh SKPD	1,98	2,1	2,3	2,3
5.2	Meningkatnya Inovasi dan Pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Seluruh SKPD	49,53	52	54,6	54,6
		MCP	Persen	Inspektorat	80	82	82	82
		Penilaian Sakip	Indeks	Seluruh SKPD	B	BB	BB	BB
5.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Nilai	Seluruh SKPD	WDP	WTP	WTP	WTP
		Rasio Kapasitas Fiskal	Rasio	BKPD	1,304	1,369	1,437	1,437



## BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah, secara skematis alur perumusan strategi pembangunan daerah dapat dilihat pada 6.1.

**Gambar 6.1**  
**Alur Perumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah**





Sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kerinci tahun 2025-2026 diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana dan terukur. Arah kebijakan akan menjadi panduan langkah kerja bagi Perangkat Daerah (PD) di dalam merumuskan program-program pembangunan dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing PD.

### **6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2026**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 2 (dua) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar terintegrasi antar sektor memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci pada 2 (dua) tahun mendatang dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**

**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2025 - 2026**

## **6.2. Program Pembangunan**

Penjabaran lebih detail dari visi misi tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dua tahun kedepan dalam Rancangan RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2026.

### **6.2.1. Program Prioritas**

Sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Penjabat Bupati, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing PD diselaraskan dengan Rancangan RPD Kabupaten Kerinci, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2**  
**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencana naan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK DAN BERDAYA SAING</b>	<b>IPM</b>	<b>76,35</b>	<b>80,16</b>		<b>84,17</b>		<b>84,17</b>		
1.1	<b>MENINGKATNYA PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA</b>									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Lama Sekolah	8,57 Tahun	8,61 Tahun	93.366.237.500	8,62 Tahun	93.277.237.500	8,62 Tahun	186.643.475.000	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	13,89 Tahun	13,93 Tahun		13,95 Tahun		13,95 Tahun		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kemampuan Literasi SD	47,84%	52,64%	65.000.000	57,91%	70.000.000	57,91%	135.000.000	Dinas Pendidikan
		Kemampuan Literasi SMP	36,58%	BAB		46,31%		46,31%		
		Kemampuan Numerasi SD	56,97%	57,12%		57,26%		57,26%		
		Kemampuan Numerasi SMP	51,15%	59,24%		68,61%		68,61%		
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Proporsi Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	31,75%	33,28%	295.000.000	34,88%	310.000.000	34,88%	605.000.000	Dinas Pendidikan
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	102,28%	106,37%	25.000.000	110,63%	30.000.000	110,63%	55.000.000	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi	97,40%	98,16%		98,92%		98,92%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sekolah (APS) 7 - 15								
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	14,82%	16,42%		18,19%		18,19%		
5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Literasi	53,15	63,14	360.000.000	65,15	445.000.000	65,15	805.000.000	Dinas Perputakaan dan Arsip
6	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	22	33	100.000.000	44	120.000.000	44	220.000.000	Dinas Perputakaan dan Arsip
7	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1120	1200	335.000.000	1300	395.000.000	1300	730.000.000	Dinas Perputakaan dan Arsip
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan akibat bencana	N/a	100	100.000.000	100	120.000.000	100	220.000.000	Dinas Perputakaan dan Arsip
<b>1.2</b>	<b>MENINGKATKANNYA KESEHATAN UNTUK SEMUA</b>									
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Usia Harapan Hidup	70,28	71,15	53.068.355.843	71,45	58.375.191.427	71,45	111.443.547.270	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu Per 100.000	214,00	192,00		182,00		182,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kelahiran Hidup								
		Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	15,29	15,20		15,15		15,15		
		Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk	24,45	14,50		14,00		14,00		
		Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	19,30	19,30		27,35		27,35		
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan	76,00	85,00		90,00		90,00		
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	70	75	1.465.000.000	80	1.611.500.000	80	3.076.500.000	Dinas Kesehatan
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes yang berizin	90	100	120.000.000	100	132.000.000	100	252.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85	95	1.200.000.000	100	1.320.000.000		2.520.000.000	Dinas Kesehatan
<b>1.3</b>	<b>MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF</b>									
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	99,56	99,61	1.091.367.195	99,66	1.200.503.915	99,66	2.291.871.110	Dinas Sosial
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	99,06	99,11	565.670.914	99,16	622.238.005	99,16	1.187.908.919	Dinas Sosial
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	99,57	99,9	143.257.906	99,95	157.583.697	99,95	300.841.603	Dinas Sosial
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	99,9	99,95	1.225.159.735	100	1.347.675.709	100	2.572.835.444	Dinas Sosial
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan	2	2	100.000.000	2	110.000.000	2	210.000.000	Dinas Sosial



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kabupaten/ Kota								
1.4	<b>MENINGKATNYA KEHIDUPAN SOSIAL YANG AKTIF DAN KONDUSIF</b>									
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	50,35	1.102.420.000	54,06	1.174.126.000	56,06	2.276.546.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	71	8.011.099.500	75	8.011.099.500	80	16.022.199.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat Berwawasan Kebangsaan	100%	100%	1.690.500.000	100%	2.144.212.500	100%	3.834.712.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	75%	80%	1.071.969.548	85%	1.125.568.025	85%	2.197.537.573	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang dibina	100%	100%	573.000.000	100%	594.150.000	100%	1.167.150.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	313.970.000	100%	327.018.500	100%	640.988.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	100%	100%	650.000.000	100%	892.500.000	100%	1.542.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.5	<b>MENINGKATNYA KELUARGA BERKUALITAS DAN KESETARAAN GENDER</b>									
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pengarusutamaan Gender	81	92	1.155.000.000	96	1.270.500.000	96	2.425.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	69,87	76	60.000.000	78	66.000.000	78	126.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	40	75	30.000.000	85	33.000.000	85	63.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan	Persentase	Na	100.000.000	80	110.000.000	85	210.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan pembinaan tumbuh kembang anak								
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase	69,87	50.000.000	76	55.000.000	78	105.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,72	0,72	60.000.000	0,72	66.000.000	0,72	126.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	43	75	6.566.218.000	85	7.222.839.800	85	13.789.057.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	40	75	300.000.000	85	330.000.000	85	630.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan	96%	98%		96%		96%		Dinas Kependudukan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.02		Penerbitan KK								n dan Catatan Sipil
		Persentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	97%	98%	1.005.000.000	99%	1.105.500.000	99%	2.110.500.000	
		Persentase Cakupan Penerbitan KIA	60%	70%		75%		75%		
<b>2</b>	<b>MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN</b>									
<b>2.1</b>	<b>MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS EKONOMI</b>									
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	0%	10%	82.500.000	10%	90.750.000	10%	173.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	100%	5.728.800.000	100%	6.301.680.000	100%	12.030.480.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kestabilan Harga dan Tingkat Inflasi	3±1	3±1	159.500.000	3±1	175.450.000	3±1	334.950.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Promosi dan Pameran dagang	% N/B	6	852.500.000	10	937.750.000	10	1.790.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera/ terulang dalam tahun berjalan	0,961538 462	1,73	269.500.000	1,97	937.750.00 0	1,97	1.207.250.0 00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan			3.233.737.70 0		3.395.424.5 85		6.629.162.2 85	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan Produktifitas Tanaman Hortikultura								
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Luas Lahan Perkebunan			1.433.485.00 0		1.648.507.7 50		3.081.992.7 50	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Peningkatan Populasi Peternakan								
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan			5.370.476.58 0		5.639.000.4 09		11.009.476. 988	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan Produktifitas Tanaman Hortikultura								
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Luas Lahan Perkebunan			5.896.135.96 8		6.780.556.3 63		12.676.692. 331	Dinas Peternakan dan Perkebunan
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit			268.729.350		309.038.75 3		577.768.10 3	Dinas Peternakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								dan Perkebunan
11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pesentase lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani	100	100	5.240.000.000	100	5.502.000.000	100	10.742.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
12	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pesentase lahan perkebunan terdampak bencana yang tertangani			303.000.000		348.450.000		651.450.000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
13	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian Memiliki Izin	Na	25	200.000.000	30	250.000.000	30	450.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	30	33	1.395.712.100	36	1.465.497.705	36	2.861.209.805	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani			399.800.000		459.770.000		859.570.000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
16	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Na	11,21%	2.550.000.000	12,43%	2.961.250.000	12,43%	5.511.250.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Na	11,21%	1.055.000.000	12,43%	1.120.500.000	12,43%	2.175.500.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber daya Ekonomi Kreatif yang terbina	Na	10 Kelompok	50.000.000	10 Kelompok	55.000.000	10 Kelompok	105.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>2.2</b>	<b>MENINGKATNYA INOVASI DAN INVESTASI</b>									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik		Baik		Baik	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (miliar)	2,879	3,023	349.900.000	3,325	367.395.000	3,325	717.295.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (miliar)	2,879	3,023	550.000.000	3,325	557.500.000	3,325	1.107.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (miliar)	2,879	3,023	450.000.000	3,325	472.500.000	3,325	922.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	91,08	91,08	900.000.000	92	990.000.000	92	1.890.000.000	PUPR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kualitas pemenuhan SPM Bidang Perumahan			385.000.000		423.500.000		808.500.000	PUPR
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase penataan kawasan permukiman yang layak huni	66,04	66,5	803.000.000	70	883.300.000	70	1.686.300.000	PUPR
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)			385.000.000		423.500.000		808.500.000	PUPR
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)			2.145.000.000		2.359.500.000		4.504.500.000	PUPR
<b>3.2</b>	<b>MENINGKATNYA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH YANG MENYELURUH</b>									
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Lahan Persawahan yang teraliri dengan irigasi		48,88	22.911.000.000	55,54	25.202.100.000	55,54	48.113.100.000	PUPR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan air minum		55,84	800.000.000	56,84	880.000.000	56,84	1.680.000.000	PUPR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sapras Persampahan							0	PUPR
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pelayanan Sanitasi	38,11	39,11	1.350.000.000	40,11	1.485.000.000	40,11	2.835.000.000	PUPR
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik			1.350.000.000		1.485.000.000		2.835.000.000	PUPR
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang telah di Bangun			34.060.000.000		37.466.000.000		71.526.000.000	PUPR
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya			30.000.000.000		33.000.000.000		63.000.000.000	PUPR
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	49,12	49,12	45.800.000.000	50	50.380.000.000	50	96.180.000.000	PUPR
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Tenaga Kerja			724.000.000		796.400.000		1.520.400.000	PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Konstruksi bersertifikat								
<b>3.3</b>	<b>MENINGKATNYA TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI</b>									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								0	Dinas Perhubungan
<b>4</b>	<b>MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS</b>									
<b>4.1</b>	<b>MENINGKATNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN</b>									
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	69,77	70	6.283.930.00 0	70,1	6.383.930.0 00	70,1	12.667.860. 000	Dinas Lingkungan Hidup
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah MHA yang diakui	5	5	1.280.000.00 0	5	1.370.000.0 00	5	2.650.000.0 00	Dinas Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Tertangani	100	100	173.000.000	100	200.000.00 0	100	373.000.00 0	Dinas Lingkungan Hidup
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Kelompok Izin Usaha yang mengurus Izin Lingkungan	100	100	213.000.000	100	250.000.00 0	100	463.000.00 0	Dinas Lingkungan Hidup
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	5	5	375.000.000	5	400.000.00 0	5	775.000.00 0	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	100	200.000.000	100	240.000.000	100	440.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	60	80	8.053.000.000	83	8.760.000.000	83	16.813.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>4.2</b>	<b>MENINGKATNYA BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>									
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100	100	1.660.000.000	100	1.730.000.000	100	3.390.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	100%	3.505.000.000	100%	3.830.000.000	100%	7.335.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan	100	100	510.000.000	100	525.000.000	100	1.035.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100	100	308.000.000	100	348.000.000	100	656.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Pengembangan Daerah
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA			ADA		ADA	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA	2.704.900.000	ADA	2.975.390.000	ADA	5.680.290.000	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA		ADA		ADA		
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	1.956.900.000	100	2.152.590.000	100	4.109.490.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD	100	100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kedalam APBD								
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Indeks MCP	Na	80	3.009.600.000	82	3.461.010.000	82	6.470.610.000	Inspektorat
5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Indeks MCP	Na	80	525.000.000	82	603.750.000	82	1.128.750.000	Inspektorat
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK	WDP	WTP	342.534.418.323	WTP	431.418.737.128	WTP	773.953.155.451	BPKPD
7	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	56	85	767.286.581	100	805.650.910	100	1.572.937.491	BPKPD
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa	N/a	100%	55.000.000	100%	60.637.500	100%	115.637.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri	8,77	10	978.000.000	13	1.026.900.000	13	2.004.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	1.791.000.000	Baik	1.819.650.000	Baik	3.610.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	1.689.267.987	Baik	1.890.720.786	Baik	3.579.988.773	KECAMATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	2.318.126.779	Baik	2.479.407.839	Baik	4.797.534.617	KECAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencana naan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01. 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	2.404.528.86 2	Baik	2.686.011.7 47	Baik	5.090.540.6 09	KECAMATAN
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	3.319.411.22 4	Baik	3.402.226.6 37	Baik	6.721.637.8 61	KECAMATAN
<b>5.3</b>	<b>MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH</b>									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	5	8	1.522.106.38 2	15	1.598.211.7 01	15	3.120.318.0 83	BPKPD



## **BAB 7**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*outcomes*). Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Disamping itu, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambarannya tentang prospek pencapaian target tersebut bagi masyarakat di satu sisi, serta menjadi acuan kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendanaan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

**Tabel 7.1**  
**Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026**

KODE	URAIAN	PROYEKSI	
		Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>36.814.335.164,25</b>	<b>38.655.051.922,46</b>
4.1.01	Pajak Daerah	16.912.093.128,00	17.757.697.784,40
4.1.02	Retribusi Daerah	5.977.020.000,00	6.275.871.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.725.222.036,25	10.211.483.138,06
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.274.000.000.000,00</b>	<b>1.388.660.000.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.172.000.000.000,00	1.277.480.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.000.000.000,00	111.180.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>12.570.000.000,00</b>	<b>13.431.300.000,00</b>

KODE	URAIAN	PROYEKSI	
		Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.570.000.000,00	10.431.300.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.323.384.335.164,25</b>	<b>1.440.746.351.922,46</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	-	-
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>836.000.000.000,00</b>	<b>903.560.000.000,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	560.000.000.000,00	604.800.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.000.000.000,00	293.760.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi		
5.1.05	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>152.300.000.000,00</b>	<b>173.500.000.000,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.000.000.000,00	63.000.000.000,00



KODE	URAIAN	PROYEKSI	
		Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000.000,00	80.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.300.000.000,00	2.500.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>22.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	22.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>336.084.335.164,25</b>	<b>362.186.351.922,46</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.288.911.312,80	2.403.356.878,44
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.795.423.851,45	359.782.995.044,02
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.344.384.335.164,25</b>	<b>1.461.746.351.922,46</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>- 21.000.000.000,00</b>	<b>- 21.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-	-
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>

KODE	URAIAN	PROYEKSI	
		Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21.000.000.000,00</b>	<b>21.000.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-	-

**Tabel 7.2**  
**Proyeksi Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat**

NO	URAIAN	PROYEKSI	
		2025	2026
1	Belanja Pegawai	560.000.000.000,00	604.800.000.000,00
2	Belanja Bunga	-	-
3	Belanja bagi hasil	2.288.911.312,80	2.403.356.878,44
4	Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
a	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-	-
c	Penyertaan Modal	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	Total Belanja Wajib Dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	571.288.911.312,80	616.203.356.878,44



Tabel 7.3

## Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026

No.	Uraian	Proyeksi	
		Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	1.323.384.335.164	1.440.746.351.922
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	30.000.000.000	30.000.000.000
	<b>Total penerimaan</b>	<b>1.353.384.335.164</b>	<b>1.470.746.351.922</b>
	<b>Dikurangi:</b>		
1.	Belanja pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	560.000.000.000	604.800.000.000
	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>560.000.000.000</b>	<b>604.800.000.000</b>
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>793.384.335.164</b>	<b>865.946.351.922</b>

**Tabel 7.4**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026**

NO	URAIAN	PROYEKSI	
		2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	<b>793.384.335.164,00</b>	<b>865.946.351.922,00</b>
2	Belanja Barang dan Jasa	272.000.000.000,00	293.760.000.000,00
3	Belanja Subsidi	-	-
4	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	-	-
6	Belanja Modal	152.300.000.000,00	173.500.000.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	22.500.000.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	333.795.423.851,45	359.782.995.044,02

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kerinci berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (*outcomes*) yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip "*money follow program*" sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet tanggal 10 Februari 2016, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma "*money follow function*" menjadi "*money follow program*".

Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Adapun Program pembangunan yang direncanakan disertai pendanaan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten disajikan pada **Error! Reference source not found.**



**Tabel 7.5**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
1.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				<b>380.530.787.500</b>		<b>381.718.837.500</b>		<b>762.249.625.000</b>	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	286.779.550.000	Baik	288.031.600.000	Baik	574.811.150.000	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Lama Sekolah	8,57 Tahun	8,61 Tahun	93.366.237.500	8,62 Tahun	93.277.237.500	8,62 Tahun	186.643.475.000	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	13,89 Tahun	13,93 Tahun		13,95 Tahun		13,95 Tahun		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kemampuan Literasi SD	47,84%	52,64%	65.000.000	57,91%	70.000.000	57,91%	135.000.000	Dinas Pendidikan
		Kemampuan Literasi SMP	36,58%	41,16%		46,31%		46,31%		
		Kemampuan Numerasi SD	56,97%	57,12%		57,26%		57,26%		
		Kemampuan Numerasi SMP	51,15%	59,24%		68,61%		68,61%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Proporsi Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	31,75%	33,28%	295.000.000	34,88%	310.000.000	34,88%	605.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	102,28 %	106,37 %	25.000.000	110,63 %	30.000.000	110,63 %	55.000.000	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	97,40%	98,16%		98,92%		98,92%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	14,82%	16,42%		18,19%		18,19%		
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>125.510.707.871</b>		<b>138.466.062.043</b>		<b>263.976.769.915</b>	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	69.657.352.028	Baik	77.027.370.616	Baik	146.684.722.645	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Usia Harapan Hidup	70,28	71,15	53.068.355.843	71,45	58.375.191.427	71,45	111.443.547.270	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu Per	214,00	192,00		182,00		182,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		100.000 Kelahiran Hidup								
		Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	15,29	15,20		15,15		15,15		
		Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk	24,45	14,50		14,00		14,00		
		Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	19,30	19,30		27,35		27,35		
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan	76,00	85,00		90,00		90,00		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	70	75	1.465.000.000	80	1.611.500.000	80	3.076.500.000	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes yang berizin	90	100	120.000.000	100	132.000.000	100	252.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	85	95	1.200.000.000	100	1.320.000.000		2.520.000.000	Dinas Kesehatan
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>150.294.975.000</b>		<b>164.147.474.250</b>		<b>314.442.449.250</b>	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	12.399.975.000	Baik	12.462.974.250	Baik	24.862.949.250	PUPR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Lahan Persawahan yang teraliri dengan irigasi		48,88	22.911.000.000	55,54	25.202.100.000	55,54	48.113.100.000	PUPR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan		55,84	800.000.000	56,84	880.000.000	56,84	1.680.000.000	PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		pelayanan air minum								
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Saprassampahan							0	PUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pelayanan Sanitasi	38,11	39,11	1.350.000.000	40,11	1.485.000.000	40,11	2.835.000.000	PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik			1.350.000.000		1.485.000.000		2.835.000.000	PUPR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang telah di Bangun			34.060.000.000		37.466.000.000		71.526.000.000	PUPR
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya			30.000.000.000		33.000.000.000		63.000.000.000	PUPR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam	49,12	49,12	45.800.000.000	50	50.380.000.000	50	96.180.000.000	PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		Kondisi Mantap								
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat			724.000.000		796.400.000		1.520.400.000	PUPR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	91,08	91,08	900.000.000	92	990.000.000	92	1.890.000.000	PUPR
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>3.718.000.000</b>		<b>4.089.800.000</b>		<b>7.807.800.000</b>	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kualitas pemenuhan SPM Bidang Perumahan			385.000.000		423.500.000		808.500.000	PUPR
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase penataan kawasan pemukiman yang layak huni	66,04	66,5	803.000.000	70	883.300.000	70	1.686.300.000	PUPR
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas			385.000.000		423.500.000		808.500.000	PUPR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		Umum (PSU)								
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)			2.145.000.000		2.359.500.000		4.504.500.000	PUPR
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>37.389.026.528</b>		<b>42.111.095.431</b>		<b>79.500.121.959</b>	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	10.064.694.528	Baik	11.178.242.281	Baik	21.242.936.809	POL-PP dan Damkar
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	3.318.896.000	Baik	3.947.675.200	Baik	7.266.571.200	POL-PP dan Damkar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	5.490.500.000	Baik	5.795.754.750	Baik	11.286.254.750	BPBD
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Kebencanaan	132,02	134	10.285.000.000	136,02	11.313.500.000	136,02	21.598.500.000	BPBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Indeks Kepuasan	Baik	Baik	8.229.936.000	Baik	9.875.923.200	Baik	18.105.859.200	POL-PP dan Damkar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		Masyarakat								
1.06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>6.882.079.523</b>		<b>7.570.287.475</b>		<b>14.452.366.998</b>	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	3.756.623.773	Baik	4.132.286.150	Baik	7.888.909.923	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	99,56	99,61	1.091.367.195	99,66	1.200.503.915	99,66	2.291.871.110	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	99,06	99,11	565.670.914	99,16	622.238.005	99,16	1.187.908.919	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	99,57	99,9	143.257.906	99,95	157.583.697	99,95	300.841.603	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	99,9	99,95	1.225.159.735	100	1.347.675.709	100	2.572.835.444	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	2	100.000.000	2	110.000.000	2	210.000.000	Dinas Sosial
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>782.693.000</b>		<b>288.892.562.300</b>		<b>289.675.255.300</b>	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik		Baik	288.031.600.000		288.031.600.000	Dinas Pendidikan
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Tenaga Kerja			66.000.000		72.600.000		138.600.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih			428.485.000		471.333.500		899.818.500	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penempatan Kerja yang terdaftar			136.474.000		150.121.400		286.595.400	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				151.734.000		166.907.400		318.641.400	Dinas Koperasi



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
										dan Tenaga Kerja
2.08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				14.612.162.550		16.073.378.805		30.685.541.355	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	13.217.162.550	Baik	14.538.878.805	Baik	27.756.041.355	Dinas Pendidikan
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pengarusutamaan Gender	81	92	1.155.000.000	96	1.270.500.000	96	2.425.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	69,87	76	60.000.000	78	66.000.000	78	126.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.034	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka	40	75	30.000.000	85	33.000.000	85	63.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		Panjang (MKJP)								Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase	Na	100.000.000	80	110.000.000	85	210.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase	69,87	50.000.000	76	55.000.000	78	105.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>5.983.000.000</b>		<b>6.433.000.000</b>		<b>12.416.000.000</b>	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya Pengelolaan Sumberday	100	100	1.660.000.000	100	1.730.000.000	100	3.390.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		a Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan								
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	100%	3.505.000.000	100%	3.830.000.000	100%	7.335.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan	100	100	510.000.000	100	525.000.000	100	1.035.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100	100	308.000.000	100	348.000.000	100	656.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>32.243.130.000</b>		<b>36.255.680.000</b>		<b>68.498.810.000</b>	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	14.065.200.000	Baik	16.871.750.000	Baik	30.936.950.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS	Ada	Ada	1.600.000.000	Ada	1.780.000.000	Ada	3.380.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	69,77	70	6.283.930.000	70,1	6.383.930.000	70,1	12.667.860.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah MHA yang diakui	5	5	1.280.000.000	5	1.370.000.000	5	2.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Tertangani	100	100	173.000.000	100	200.000.000	100	373.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Kelompok Izin Usaha yang mengurus Izin Lingkungan	100	100	213.000.000	100	250.000.000	100	463.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	5	5	375.000.000	5	400.000.000	5	775.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya penanganan pengaduan	100	100	200.000.000	100	240.000.000	100	440.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		lingkungan hidup								
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	60	80	8.053.000.000	83	8.760.000.000	83	16.813.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				12.328.402.970		13.624.243.267		<b>25.952.646.237</b>	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	10.663.402.970	Baik	11.792.743.267	Baik	22.456.146.237	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Penerbitan KK	96%	98%	1.005.000.000	96%	1.105.500.000	96%	2.110.500.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	97%	98%		99%		99%		
		Persentase Cakupan Penerbitan KIA	60%	70%		75%		75%		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Penerbitan	94%	95%		95%	308.000.000	95%		Dinas Kependudukan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2.12.03		Akta Kelahiran								Catatan Sipil
		Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	280.000.000	100%		100%	588.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	300.000.000	Ada	330.000.000	Ada	630.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil kependudukan Kabupaten	Ada	Ada	80.000.000	Ada	88.000.000	Ada	168.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>6.703.572.500</b>		<b>7.261.088.625</b>		<b>13.964.661.125</b>	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	3.879.572.500	Baik	4.353.901.125	Baik	8.233.473.625	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa	N/a	100%	55.000.000	100%	60.637.500	100%	115.637.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri	8,77	10	978.000.000	13	1.026.900.000	13	2.004.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	1.791.000.000	Baik	1.819.650.000	Baik	3.610.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>6.926.218.000</b>		<b>7.618.839.800</b>		<b>14.545.057.800</b>	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,72	0,72	60.000.000	0,72	66.000.000	0,72	126.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	43	75	6.566.218.000	85	7.222.839.800	85	13.789.057.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8	40	75	300.000.000	85	330.000.000	85	630.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		fungsi keluarga								
2.15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>								0	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik		Baik		Baik	0	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								0	Dinas Perhubungan
2.16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				10.880.330.000		11.983.987.500		22.864.317.500	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	7.661.575.000	Baik	8.105.857.000	Baik	15.767.432.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	60,2	90	1.383.755.000	90	1.522.130.500	90	2.905.885.500	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	1,98	2,1	1.835.000.000	2,3	2.356.000.000	2,3	4.191.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.470.637.000		1.617.700.400		3.088.337.400	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	740.656.000	Baik	814.721.600	Baik	1.555.377.600	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Bersentase BPR/LKM aktif			66.550.000		73.205.000		139.755.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif			130.000.000		143.000.000		273.000.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat			133.100.000		146.410.000		279.510.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang dilatih			93.528.000		102.880.800		196.408.800	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif			50.000.000		55.000.000		105.000.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha			133.000.000		146.300.000		279.300.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		Mikro (UMKM) Yang Diperdayakan								
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang			123.803.000		136.183.000		259.986.000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>2.054.900.000</b>		<b>2.172.895.000</b>		<b>4.227.795.000</b>	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik			Baik	Baik	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (miliar)	2,879	3,023	349.900.000	3,325	367.395.000	3,325	717.295.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (miliar)	2,879	3,023	550.000.000	3,325	557.500.000	3,325	1.107.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (miliar)	2,879	3,023	450.000.000	3,325	472.500.000	3,325	922.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (miliar)	2,879	3,023	635.000.000	3,325	698.500.000	3,325	1.333.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (miliar)	2,879	3,023	70.000.000	3,325	77.000.000	3,325	147.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>9.113.519.500</b>		<b>9.185.225.500</b>		<b>18.298.745.000</b>	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik		Baik		Baik	0	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	50,35	1.102.420.000	54,06	1.174.126.000	56,06	2.276.546.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	71	8.011.099.500	75	8.011.099.500	80	16.022.199.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
2.22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				215.000.000		221.000.000		436.000.000	
2.22.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedia Buku Statistik Sektoral	Ada	Ada	215.000.000	Ada	221.000.000	Ada	436.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				255.000.000		261.000.000		516.000.000	
2.22.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Na	90	255.000.000	100	261.000.000	100	516.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				1.737.474.800		1.864.348.540		3.601.823.340	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang di bina	14 Sanggar	14 Sanggar	772.474.800	14 Sanggar	811.098.540	14 Sanggar	1.583.573.340	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Pembinaan Sejarah	2 kali	2 kali	65.000.000	2 kali	68.250.000	2 kali	133.250.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang Terkelola	18 BCB	18 BCB	800.000.000	18 BCB	880.000.000	18 BCB	1.680.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		Masyarakat								dan Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan			3.233.737.700		3.395.424.585		6.629.162.285	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan Produktifitas Tanaman Hortikultura								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Luas Lahan Perkebunan			1.433.485.000		1.648.507.750		3.081.992.750	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Peningkatan Populasi Peternakan								
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan			5.370.476.580		5.639.000.409		11.009.476.988	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		Peningkatan Produktifitas Tanaman Hortikultura								
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Luas Lahan Perkebunan			5.896.135.968		6.780.556.363		12.676.692.331	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			268.729.350		309.038.753		577.768.103	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani	100	100	5.240.000.000	100	5.502.000.000	100	10.742.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan perkebunan terdampak bencana			303.000.000		348.450.000		651.450.000	Dinas Peternakan dan Perkebunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		yang tertangani								
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian Memiliki Izin	Na	25	200.000.000	30	250.000.000	30	450.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	30	33	1.395.712.100	36	1.465.497.705	36	2.861.209.805	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani			399.800.000		459.770.000		859.570.000	Dinas Peternakan dan Perkebunan
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>150.092.800.000</b>		<b>165.443.380.000</b>		<b>315.536.180.000</b>	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	143.000.000.000	Baik	157.000.000.000	Baik	300.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	0%	10%	82.500.000	10%	90.750.000	10%	173.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana	100%	100%	5.728.800.000	100%	6.301.680.000	100%	12.030.480.000	Dinas Perindustrian dan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		distribusi perdagangan								Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kestabilan Harga dan Tingkat Inflasi	3±1	3±1	159.500.000	3±1	175.450.000	3±1	334.950.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Promosi dan Pameran dagang	% N/B	6	852.500.000	10	937.750.000	10	1.790.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera/terulang dalam tahun berjalan	0,961538462	1,73	269.500.000	1,97	937.750.000	1,97	1.207.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>7.205.000.000</b>		<b>7.925.500.000</b>		<b>15.130.500.000</b>	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Laju Pertumbuhan IKM	0% (Tetap)	0,59	6.913.500.000	0,68	7.604.850.000	0,68	14.518.350.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	0	6,91	110.000.000	7,22	121.000.000	7,22	231.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		n (IUI) dan (IPUI)								
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Perusahaan industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	0	7,22	181.500.000	8,25	199.650.000	8,25	381.150.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>55.083.320.319</b>		<b>60.591.652.349</b>		<b>115.674.972.668</b>	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	44.756.869.399	Baik	49.232.556.338	Baik	93.989.425.737	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	6.768.643.982	Baik	7.445.508.380	Baik	14.214.152.362	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	3.557.806.938	Baik	3.913.587.631	Baik	7.471.394.569	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
4.02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				42.159.128.800		38.896.400.000		<b>81.055.528.800</b>	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	27.437.128.800	Baik	24.504.600.000	Baik	51.941.728.800	Sekretariat Dewan
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	ADA	ADA	14.722.000.000	ADA	14.391.800.000	ADA	29.113.800.000	Sekretariat Dewan
5.01	<b>PERENCANAAN</b>				<b>12.388.777.022</b>		<b>13.626.033.762</b>		<b>26.014.810.784</b>	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	7.726.977.022	Baik	8.498.053.762	Baik	16.225.030.784	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan	ADA	ADA	2.704.900.000	ADA	2.975.390.000	ADA	5.680.290.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		dengan PERDA								dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA		ADA		ADA		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA		ADA		ADA		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	1.956.900.000	100	2.152.590.000	100	4.109.490.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100		100		100		
5.02	KEUANGAN				356.304.974.204		445.877.820.803		802.182.795.007	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	11.481.162.918	Baik	12.055.221.064	Baik	23.536.383.982	BPKPD
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK	WDP	WTP	342.534.418.323	WTP	431.418.737.128	WTP	773.953.155.451	BPKPD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	56	85	767.286.581	100	805.650.910	100	1.572.937.491	BPKPD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	5	8	1.522.106.382	15	1.598.211.701	15	3.120.318.083	BPKPD
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>8.631.443.565</b>		<b>9.535.087.921</b>		<b>18.166.531.486</b>	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	6.853.602.945	Baik	7.489.463.239	Baik	14.343.066.184	BKPSDMD
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah			1.777.840.620		2.045.624.682		3.823.465.302	BKPSDMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu								
5.04	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				1.511.730.000		1.662.903.000		3.174.633.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			1.511.730.000		1.662.903.000		3.174.633.000	BKPSDMD
5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				750.000.000		800.000.000		1.550.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	49,53	52	750.000.000	54,6	800.000.000	54,6	1.550.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				14.978.260.994		15.672.220.143		30.650.481.137	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	11.443.660.994	Baik	11.607.460.143	Baik	23.051.121.137	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Indeks MCP	Na	80	3.009.600.000	82	3.461.010.000	82	6.470.610.000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Indeks MCP	Na	80	525.000.000	82	603.750.000	82	1.128.750.000	Inspektorat
7.01	<b>KECAMATAN</b>				<b>78.987.486.897</b>		<b>86.921.775.137</b>		<b>165.909.262.034</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	69.256.152.045	Baik	76.463.408.129	Baik	145.719.560.174	KECAMATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	1.689.267.987	Baik	1.890.720.786	Baik	3.579.988.773	KECAMATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	2.318.126.779	Baik	2.479.407.839	Baik	4.797.534.617	KECAMATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	2.404.528.862	Baik	2.686.011.747	Baik	5.090.540.609	KECAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	3.319.411.224	Baik	3.402.226.637	Baik	6.721.637.861	KECAMATAN
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>8.572.134.553</b>		<b>10.876.104.630</b>		<b>19.448.239.183</b>	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	4.272.695.005	Baik	5.792.655.605	Baik	10.065.350.610	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat Berwawasan Kebangsaan	100%	100%	1.690.500.000	100%	2.144.212.500	100%	3.834.712.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	75%	80%	1.071.969.548	85%	1.125.568.025	85%	2.197.537.573	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang dibina	100%	100%	573.000.000	100%	594.150.000	100%	1.167.150.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengemban	100%	100%	313.970.000	100%	327.018.500	100%	640.988.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja Penanggung Jawab
				2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
		gan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SO	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	100%	100%	650.000.000	100%	892.500.000	100%	1.542.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



## **BAB 8**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Penjabat Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPD Kabupaten Kerinci tahun 2025-2026 dijadikan dasar oleh OPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **8.1. Indikator Makro**

**Tabel 8.1**  
**Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2025 -2026**

NO	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kerinci	Kondisi Awal (2023)	TARGET	
			2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,73	6,2	6,5
2	Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu)	52,42	54,42	56,5
3	Indeks Pembangunan Manusia	73,77	73,53	73,83
4	Angka Kemiskinan (%)	7,54	7,52	7,50
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,48	2,46	2,43
6	Indeks Gini	0,30	0,28	0,28

#### **8.2. Indikator Kinerja Utama**

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah periode 2025-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program

pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama dan target capaian dua tahun mendatang sebagai berikut :

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2025 -2026**

Indikator	Kondisi Awal realisasi 2023	Target		Kondisi Akhir Tahun 2026
		2025	2026	
<b>IPM</b>	<b>76,35</b>	<b>80,16</b>	<b>84,17</b>	<b>84,17</b>
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,57	9	9,44	9,44
Harapan Lama Sekolah	13,89	15,58	15,31	15,31
Indeks Literasi	53,15	63,14	65,15	65,15
Usia Harapan Hidup (UHH)	70,55	73,79	77,48	77,48
Angka kematian ibu	246	234,29	223,13	223,13
Angka kematian bayi	15,29	14,56	13,86	13,86
Prevalensi stunting	24,2	18	14	14
Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	69,26	65,96	62,82	62,82
cakupan kepesertaan jaminan sosial	76,00	85,00	90,00	90,00
Persentase Penduduk Miskin	7,57	7,42	7,06	7,06
Indeks Pembangunan Pemuda	50,35	54,06	56,06	56,06
Warisan Budaya yang teregistrasi	18	19	20	20
Persentase kasus konflik sosial	100%	100%	100%	100%
Indeks Ketimpangan Gender	0,398	0,37	0,36	0,36
<b>Gini Rasio</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,43	4,65	4,88	4,88
Rasio kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	46,97	51,4	53,97	53,97
Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,77	0,8	0,84	0,84



Peningkatan nilai kumulatif investasi	3174	3332	3499	3499
Indeks Daya Saing Daerah	2,88	2,88	2,88	2,88
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,48	2,4	2,38	2,38
PDRB Perkapita	48,16	50,56	53,09	53,09
Persentase angkatan kerja yang berusaha sendiri (%)	27,23	28,59	30	30
IKLH	69,77	70	70,1	70,1
<b>Indeks Infrastruktur Wilayah</b>	<b>34,53</b>	<b>36,25</b>	<b>38,06</b>	<b>38,06</b>
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	91,08	92,5	93	93
Persentase rumah layak huni	57,8	60,69	63,72	63,72
Persentase cakupan pelayanan air minum		55,84	56,84	56,84
Persentase pelayanan sanitasi	38,11	39,11	40,11	40,11
Persentase pelayanan persampahan	60	80	83	83
Persentase luas lahan persawahan yang teraliri dengan irigasi teknis	87,21	89,82	92,52	92,52
Tingkat Kemantapan Jalan	49,12	51,57	54,15	54,15
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	73,78	77,46	81,34	81,34
<b>IKLH</b>	<b>69,77</b>	<b>70</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
Indeks Ketahanan Daerah	76,35	80,16	84,17	84,17
Akses rumah terhadap air perpipaan	43,8	45,99	48,28	48,28
Indeks ketahanan Pangan	81,94	90,5	90,7	90,7
Indeks Risiko Kebencanaan	125,06	119,1	113,43	113,43
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>47,47</b>	<b>49,84</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>
Indeks SPBE	1,98	2,1	2,3	2,3



Indeks Inovasi Daerah	49,53	52	54,6	54,6
MCP	80	82	82	82
Penilaian Sakip	B	BB	BB	BB
Opini Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP
Rasio Kapasitas Fiskal	1,304	1,369	1,437	1,437

### 8.3. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Penjabat Kepala Daerah pada akhir periode jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat tercapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau *impact*. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan

perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8.3**  
**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kerinci**  
**Tahun 2025-2026**

## **BAB 9**

### **P E N U T U P**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Penjabat Bupati Kerinci Tahun 2025-2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci

#### **9.1. Pedoman Transisi**

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPD Tahun 2025-2026, maka dokumen RPD ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir masa RPD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada tahun pertama masa pemerintahan Kepala Daerah yang baru.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I RPD ini, alasan utama yang melatarbelakangi penyusunan RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 yaitu berakhirnya masa jabatan Bupati Kerinci Periode 2019-2024 serta adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah yang dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024. Dampak dari kedua hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan



mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

## **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen RPD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dokumen RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengantugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026.
2. Dokumen RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 merupakan perencanaan pembangunan dua tahun sebagai dokumen perencanaan transisi di Kabupaten Kerinci yang akan dijabarkan lagi menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedomandalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Dokumen RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengatur perencanaan pembangunan dua tahun bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja).

4. Program yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah harus konsisten dengan Renstra dan Dokumen RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026. Kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah harus konsisten dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program/kegiatan benar-benar menjamin terlaksananya tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026.
5. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kerinci, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility (CSR)*, hibah/bantuan dalam dan luar negeri, dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
6. Pasca penetapan Dokumen RPD, apabila ada perubahan struktur organisasi tata kelembagaan (SOTK) Perangkat Daerah maka SOTK baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPD ini namun harus membuat Renstra baru.
7. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renja/Renstra serta konsistensinya dengan RPD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Dokumen RPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 tidak dapat dirubah namun apabila terdapat hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan dapat dilakukan perbaikan di dalam kegiatan Perangkat Daerah; termasuk apabila terdapat substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan apabila terjadi

perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional maka perubahan RPD dapat dilaksanakan apabila setelah dilaksanakan konsultasi ke Gubernur Jambi.

Siulak, 21 FEBRUARI 2024  
**Pj. BUPATI KERINCI**



ASRAF